



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN Lampung
dan Bengkulu
2025

Kata Pengantar



Ferdinan Lengkong
Plt. Kepala Kantor Wilayah
DJKN Lampung Dan Bengkulu

Tabik pun!

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Tahun 2025 telah dilalui dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki *core business* pengelolaan

kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Pada tahun anggaran 2024, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu berhasil mencapai prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 sebesar **115,87 %** (istimewa) yang didapatkan dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 dan WBBM tahun 2024 ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi internal Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dengan pihak *stakeholders* dan masyarakat yang memuaskan. Oleh karena itu, kami berharap LAKIN Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu ini dapat memberikan gambaran sekaligus pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh DJKN pada umumnya dan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu pada khususnya.

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu selalu berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, dengan semangat **TAPIS** (Tepat-Amanah-Profesional-Integritas-Sakai Sambayan), terbukti dengan pelayanan yang kami berikan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani di tahun 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* dan para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, yang telah

bekerja, berkolaborasi dan bersinergi dengan penuh dedikasi dan integritas dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis organisasi.

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN
Lampung dan Bengkulu,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



IKHTISAR EKSEKUTIF

NKO

KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

115,87

19 IKU Kemenkeu - Two		
19	0	0
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025		
<i>Stakeholder Perspective</i>	33,46%	30%
<i>Customer Perspective</i>	23,29%	20%
<i>Internal Process Perspective</i>	29,37%	25%
<i>Learning & Growth Perspective</i>	29,74%	25%
NKO Q4 Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun 2025	115,87	Istimewa

Catatan status NKO:

100 ≤ x < 120 = memenuhi ekspektasi;

80 ≤ x < 100 = belum memenuhi ekspektasi

X < 80 = tidak memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu selama periode Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, LAKIN Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu periode Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu atas penggunaan anggaran.

Dalam menyusun laporan kinerja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu selama tahun 2025.

VISI DJKN

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Keuangan Negara.

MISI DJKN

- (1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- (2) Mewujudkan layanan penilaian dan *advisori* yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
- (3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029

- (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- (2) Layanan penilaian dan *advisori* yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
- (3) Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- (1) Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- (2) Layanan penilaian dan advitori yang profesional dan relevan;
- (3) Layanan lelang yang modern dan tepercaya; dan
- (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dalam mencapai visi tersebut Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi, pengembangan lelang; teknis, penggalan potensi, dan verifikasi lelang serta
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang
- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;

- k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis. satu sasaran strategis pada *stakeholder perspective* sebesar (30%), dua sasaran strategis pada *customer perspective* sebesar (20%), dua sasaran strategis pada *internal process perspective* sebesar (25%) dan tiga sasaran strategis pada *learning and growth perspective* sebesar (25%).

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

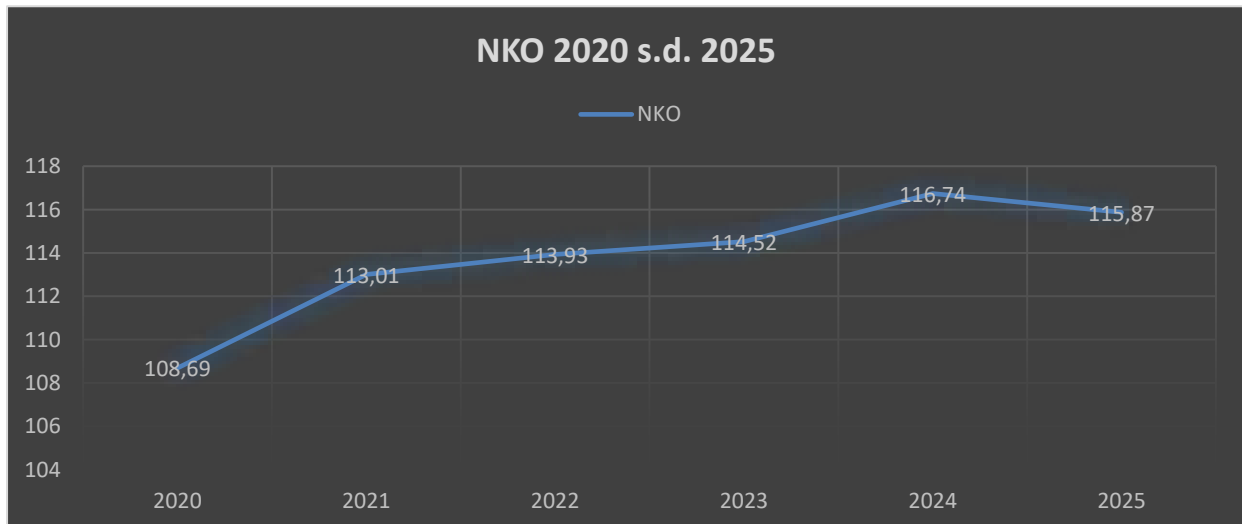
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*).

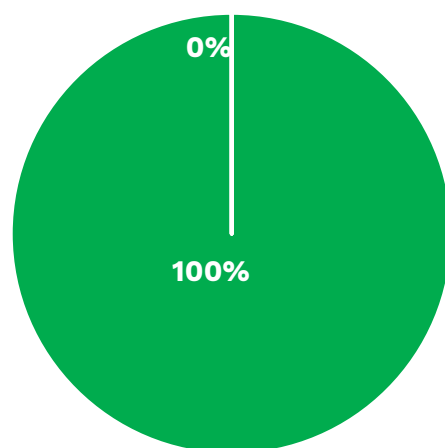
Pada tahun 2025 ini dihasilkan 19 IKU pada level Eselon II yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian IKU Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu terdiri dari 19 IKU Kemenkeu-*Two* berstatus hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,87 %.



Capaian Kinerja IKU Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun 2025



Dari 19 IKU Kemenkeu-*Two* semua berstatus hijau.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja secara langsung pada beberapa unit eselon III di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra) yang memuat

pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU, serta Matriks *cascading* dan *alignment*.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi.

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, sepanjang tahun 2025, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalan *early warning system* sebagai bentuk *awareness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyesuaian manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu sebagai organisasi yang kondusif semakin meningkat.

Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, *dan* sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan.

Daftar Isi



I

Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
Peran Strategis	11
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	14
Isu Strategis	15
Sistematika Laporan	16

II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Strategis	19
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Pengukuran Kinerja	36
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	70



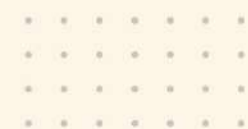
Akuntabilitas Kinerja

III

Capaian Kinerja Organisasi	89
Realisasi Anggaran	199
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	201
Kinerja Lain-lain	202




Penutup	210
Lampiran	213

IV





Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
 - B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - C. Peran Strategis
 - D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
 - E. Isu Strategis
 - F. Sistematika Laporan
- 
- 
- 

BAB I | Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit Eselon I Kementerian Keuangan yang dibentuk sejak November 2006 dan mengemban misi pengelolaan kekayaan negara sebagai salah satu pilar peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal. Sesuai Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DJKN sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJKN selama tahun 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam kedudukan sebagai organisasi vertikal DJKN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

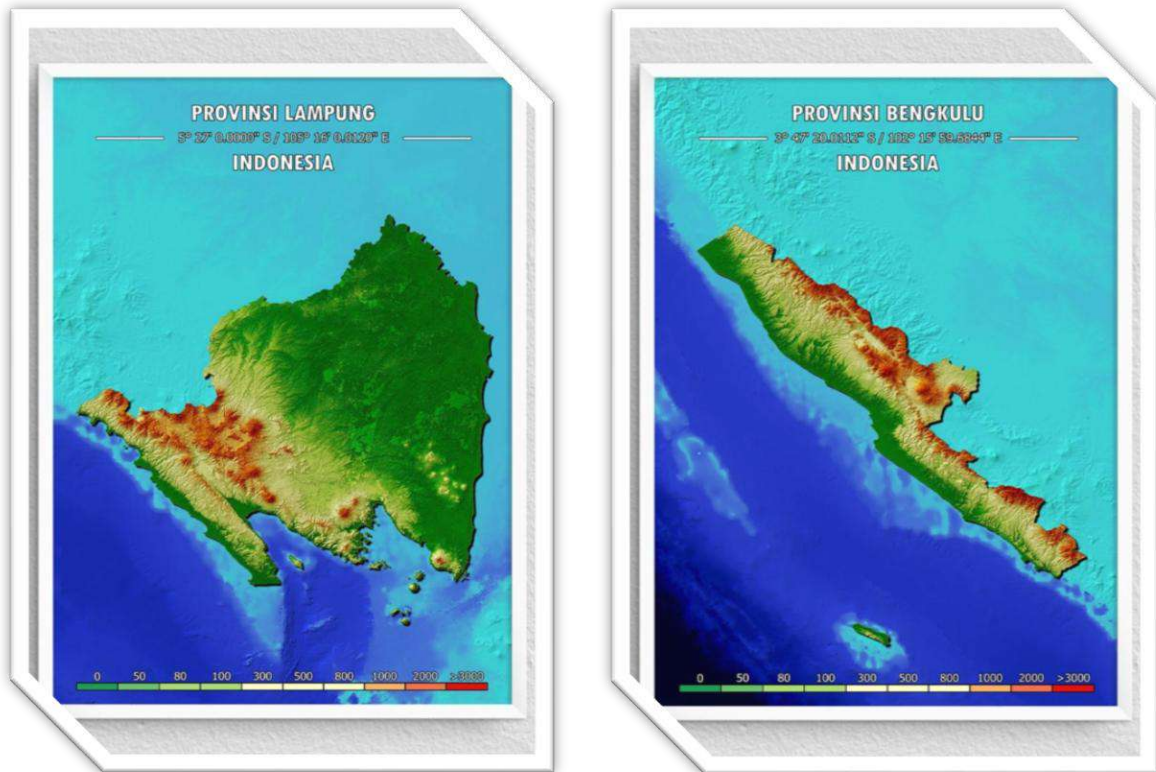
- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Pengelolaan kekayaan negara, sebagai salah satu pelayanan utama (*core business*) Kementerian Keuangan, secara langsung memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan mempengaruhi keberhasilan Kementerian Keuangan mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Selain melaksanakan fungsi pengelolaan kekayaan negara, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu juga melaksanakan fungsi pelayanan penilaian, pelayanan pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Sebagai bukti pelayanan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pelayanan efektif yang menjadi faktor kunci dalam meraih predikat WBBM tahun 2024. Pelayanan publik yang memuaskan menciptakan citra positif, mendorong partisipasi *stakeholders*, dan memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah.

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu merupakan salah satu unit eselon dua di lingkungan DJKN yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki wilayah kerja meliputi Kota dan Kabupaten pada Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Gambar 1.1.



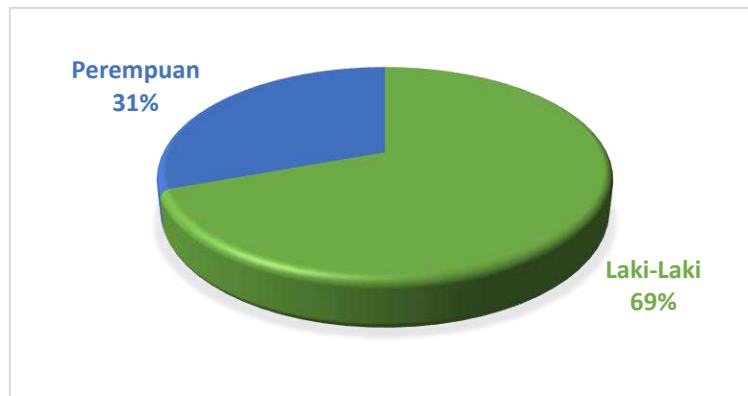
Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki motto “**TAPIS**” sebagai pedoman para pegawai dalam memberikan layanan, yaitu:

T epat	➔	Menerapkan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat aturan dalam memberikan layanan
A manah	➔	Menjunjung tinggi kode etik dan dapat dipertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan
P rofesional	➔	Senantiasa memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan komitmen untuk meningkatkan kinerja
I ntegritas	➔	Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
S akai S ambayan	➔	Menjunjung kerja sama dan kekeluargaan antar pegawai dalam mencapai tujuan organisasi

Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu diampu oleh total pegawai pada akhir tahun 2025 sejumlah 49 orang dengan komposisi sebagai berikut:

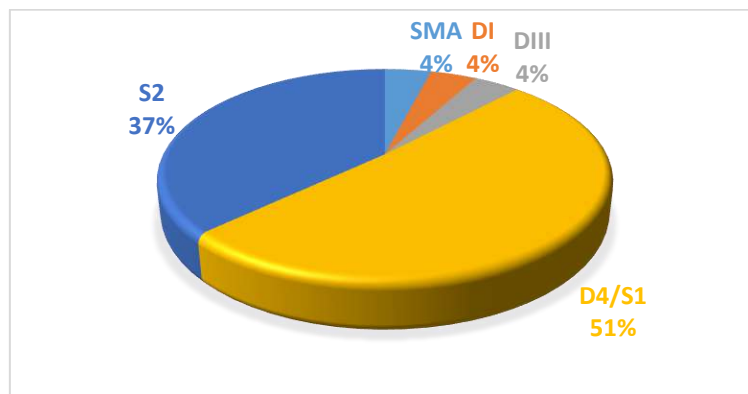
- Berdasarkan gender: 34 laki-laki (69%) dan 15 perempuan (31%).

Gambar 1.2.



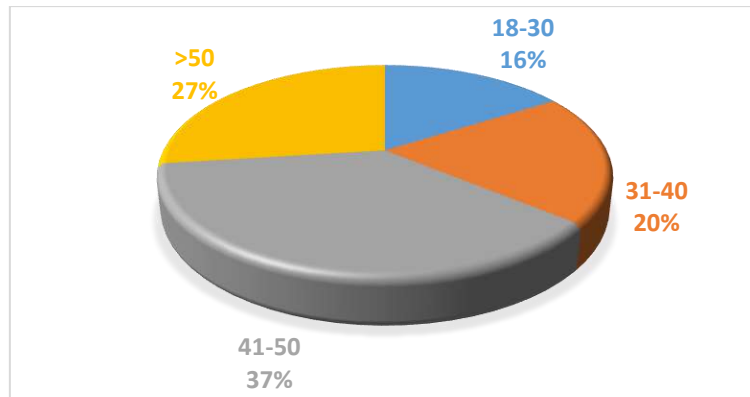
- Berdasarkan pendidikan: SMA sebanyak 2 orang (4%), D1 sebanyak 2 orang (4%), D3 sebanyak 2 orang (4%), D4/S1 sebanyak 25 orang (51%), dan S2 sebanyak 18 orang (37%).

Gambar 1.3.



- Berdasarkan rentang usia: kelompok usia 18-30 tahun sejumlah 8 orang (16%), 31-40 tahun sejumlah 10 orang (20%), 41-50 tahun sejumlah 18 orang (37%) dan usia di atas 50 sejumlah 13 orang (27%).

Gambar 1.4.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam perilaku sehari-harinya, para pegawai pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu berupaya untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan, 10 (sepuluh) perilaku utama Kementerian Keuangan meliputi bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati, memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*), bersikap proaktif dan cepat tanggap, melakukan perbaikan terus menerus (*continuous improvement*), dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta budaya kerja Kementerian Keuangan meliputi Integritas, *Profesionalisme*, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Adapun struktur organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang terdiri dari:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional; pelaksanaan urusan sumber daya manusia; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga

serta kearsipan; dan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Umum terdiri dari Subbag Sumber Daya Manusia, Subbag Keuangan, dan Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara; penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara; penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara ini terdiri dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, dan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.

c. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara; penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara; penyiapan bahan pemantauan, dan negara; dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara. Bidang Piutang Negara terdiri atas Seksi Piutang Negara I dan Seksi Piutang Negara II.

d. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian; penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian; penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. Bidang Penilaian terdiri dari Seksi Penilaian I dan Seksi Penilaian II.

e. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan; penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang, dan pengawasan lelang; pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang; penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Bidang Lelang terdiri atas Seksi Bimbingan Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II.

f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah; penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum; penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum, dan Seksi Informasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki satu orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda, satu orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, satu orang Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan

Kuangan APBN Pertama, satu orang Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Mahir, dan satu orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 1.5.



Dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh *stakeholders*, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang berkantor di Jalan Raden Intan Nomor 121, Kota Bandar Lampung didukung dengan sarana dan prasarana pendukung layanan, seperti Area Pelayanan Terpadu (APT), pojok SMV, pojok UMKM dan pojok konsultasi, tempat parkir motor dan mobil, termasuk parkir prioritas ibu hamil dan juga parkir prioritas difabel, *kids corner* dan ruang laktasi, mushola, toilet difabel, kursi roda, dan wastafel dan pojok payung.



C. PERAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan dasar bagi Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu selaku instansi vertikal menyusun kebijakan dan strategi. Adapun kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- b. pengamanan kekayaan negara yang akuntabel; dan
- c. pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- a. melaksanakan utilisasi nilai kekayaan negara;
- b. mengusulkan perbaikan dan pengaturan yang dianggap perlu di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP No. 28 Tahun 2020);
- c. implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN), sebagai bahan untuk menyusun LKPP;
- d. meningkatkan kualitas penyajian nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- e. monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif; dan
- f. percepatan sertifikasi BMN berupa tanah.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah:

- a. pengembangan Penilai yang profesional; dan
- b. pembangunan dan pengembangan *database* penilaian yang andal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. mengusulkan perbaikan dan pengaturan serta pedoman yang dianggap perlu di bidang penilaian;
- b. melaksanakan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah;
- c. penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah melalui *peer review*; dan
- d. riset data dan pemusatan informasi penilaian.

3. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. tahap pengurusan piutang negara yang optimal;

- b. PNPB dari pengurusan piutang negara yang optimal; dan
- c. penyelesaian dan percepatan pengurusan BKPN melalui Program Keringanan Hutang (*crash program*).

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. optimalisasi tahap pengurusan;
- b. pemetaan debitur yang berpotensi untuk dilakukan penagihan piutang negara;
- c. koordinasi dengan penyerah piutang dan melibatkan Anggota PUPN dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Kejaksaan;
- d. melibatkan Anggota PUPN dalam proses penagihan piutang negara seperti tembusan surat panggilan pada unsur Pemerintah Daerah dan unsur Kejaksaan;
- e. koordinasi dan sosialisasi terkait *crash program* kepada debitur potensial dan Penyerah Piutang;
- f. melaksanakan program kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas 1 miliar dengan fokus pada penyerahan dari Direktorat PKN dh. Direktorat PKNSI; dan
- g. penggalan potensi piutang pada satuan kerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Layanan Publik, serta Badan Layanan Umum.

4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. pelayanan lelang yang optimal; dan
- b. PNPB dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. modernisasi lelang melalui *e-auction*;
- b. penguatan Jabatan Fungsional Pelelang; dan
- c. penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.

5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. organisasi yang kondusif;
- b. monitoring dan evaluasi yang efektif;
- c. SDM yang kompetitif; dan
- d. peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
- b. mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
- c. optimalisasi penggunaan TIK yang terintegrasi;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core bussiness*;
- e. peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
- f. optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal; dan
- g. peningkatan efektivitas layanan dibidang hukum dan informasi.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu sepenuhnya mendukung Program Reformasi Birokrasi, salah satu buktinya pada tahun 2022 Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mendapatkan predikat sebagai unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu terus berkomitmen untuk mengembangkan inovasi dan perbaikan pelayanan kepada para pengguna, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dimulai dari tahun 2022.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mengikuti penilaian Pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan berhasil sampai pada tahapan Penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) pada tahap *Desk Evaluation/Wawancara Virtual*. Lalu, pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu berhasil mencapai prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mendukung pencapaian Transformasi Kelembagaan melalui implementasi Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan yakni terwujudnya budaya kerja Kemenkeu Satu yang kolaboratif dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah dengan pembentukan Tim Duta Transformasi yang bergerak untuk melakukan internalisasi setiap perubahan dan transformasi di Kementerian Keuangan kepada para pegawai Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

E. ISU STRATEGIS

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Penilai yang kompeten adalah Sumber Daya Manusia Penilai di lingkungan DJKN dan non DJKN yang memenuhi kompetensi teknis dan diukur kualitas SDM Penilai tersebut melalui kegiatan *quality assurance* yang diikuti setiap tahun melalui kegiatan verifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) dan penilai pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi PFPP secara berkala mengadakan bimbingan teknis baik melalui *focus group discussion* secara online maupun pembinaan secara langsung. PFPP di wilayah kerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mencakup PFPP pada KPKNL, PFPP pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi dan PFPP pada Instansi Daerah.
2. Penilaian Sumber Daya Alam (SDA). Dalam rangka mewujudkan terbentuknya Neraca SDA secara nasional sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip SEEA (*System of Environmental Economic Accounting*) Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mengadakan koordinasi dan audiensi terkait potensi penilaian sumber daya alam pada Taman Nasional Way Kambas yang bertempat di Balai Taman Nasional Way Kambas, Raja Basa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selain itu, PFPP juga berkesempatan untuk melaksanakan koordinasi dan pemetaan potensi penilaian

SDA terbarukan berupa *geothermal* (panas bumi) dengan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Audensi mencakup proses bisnis PGE Ulubelu, luasan wilayah project PGE, kapasitas energi listrik yang dihasilkan, distribusi pemasaran produk, dan potensi pengembangan *project* di masa depan.

3. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 berdampak pada pergeseran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pembentukan Kabinet Merah Putih ini memberikan implikasi adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (pemisahaan, penggabungan, perubahan nomenklatur, dan pembentukan baru), penyesuaian tata kelola keuangan dan aset, dan perubahan sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya penyesuaian dari aspek pengelolaan BMN dan alokasi anggarannya.
4. Penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dan aset eks BLBI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dimana dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala akibat objek sertifikasi masih belum *free and clear*.
5. Penyelarasan implementasi aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 47 Tahun 2024) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK No. 240/PMK.06/2016) di tingkat instansi vertikal. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah strategisnya adalah memberikan kemudahan pembiayaan melalui penghapusan piutang macet, yang dilaksanakan secara adil, terukur, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses baru untuk pembiayaan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2025.

Bab IV Penutup dan Lampiran

Bab ini menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II | **Perencanaan Kinerja**

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa hal. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi-strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.



VISI DJKN

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Keuangan Negara.

MISI DJKN

- (1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- (2) Mewujudkan layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;

- (3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029.

- (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset;
- (2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian;
- (3) Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
- (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029.

- (1) Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- (2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan;
- (3) Layanan lelang yang modern dan terpercaya; dan
- (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dukungan DJKN pada Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

DJKN mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional melalui pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, Adapun rincian keterlibatan DJKN pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pada Perioritas Nasional tersebut DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik, yang dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dan penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup. Dalam rangka implementasi strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas integrasi data dan pengayaan IPTEK keanekaragaman hayati dengan target *output* berupa rekomendasi penguatan pengelolaan sumber daya alam. Terkait implementasi strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, DJKN akan mengimplementasikan Proyek Prioritas pemulihan ekosistem *mangrove* dan lahan rusak dengan target *output* rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha berdampak penting pada lingkungan.

b. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pada Perioritas Nasional tersebut DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Perioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara. Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatkan efektifitas belanja pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut:

- 1) Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).
- 2) Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target *output* berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
- 3) Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target *output* berupa:

- a. rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;
- b. rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dan
- c. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN).

Dalam rangka implementasi strategi peningkatan efektifitas belanja pemerintah pusat, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut:

1. Kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan target *output* berupa rekomendasi penyiapan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+).
2. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan terintegrasi, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.

Dalam Renstra DJKN pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 DJKN diamanatkan untuk berkontribusi secara langsung antara lain:

- a. Tujuan Kemenkeu Nomor 4 yaitu Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
- b. Tujuan Kemenkeu Nomor 5 yaitu Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.
- c. Tujuan Kemenkeu Nomor 2 yaitu pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
- d. Tujuan kemenkeu Nomor 3 yaitu pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis DJKN, diusulkan tiga rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas DJKN yang akan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029, yaitu RUU Tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU tentang Penilai. Selain dari 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tersebut, DJKN juga mengusulkan beberapa regulasi turunan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meliputi RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan RPP tentang Pengelolaan Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) meliputi RPMK tentang perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, RPMK tentang Pejabat Lelang Swasta, RPMK tentang Pejabat Lelang Negara, RPMK tentang Risalah Lelang, RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, RPMK tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, RPMK tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya dan RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mengacu pada peraturan-peraturan dimaksud, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah dilaksanakan *refinement* Penyusunan Peta Strategi, IKU, Target IKU, Manual IKU dan IKU Mandatory di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Nomor PK-14/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025 dan Adendum Perjanjian Kinerja Nomor 14-a/KN/2025 pada tanggal 18 November 2025. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu bertindak sebagai pimpinan rapat dan rapat ini dihadiri oleh para pejabat fungsional, pejabat administrator, pejabat pengawas serta seluruh Pegawai di Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Hasil pelaksanaan *refinement* ini kemudian disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Adapun visi DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Keuangan Negara. Dalam rangka mewujudkan atau penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, DJKN memiliki empat misi DJKN yaitu:

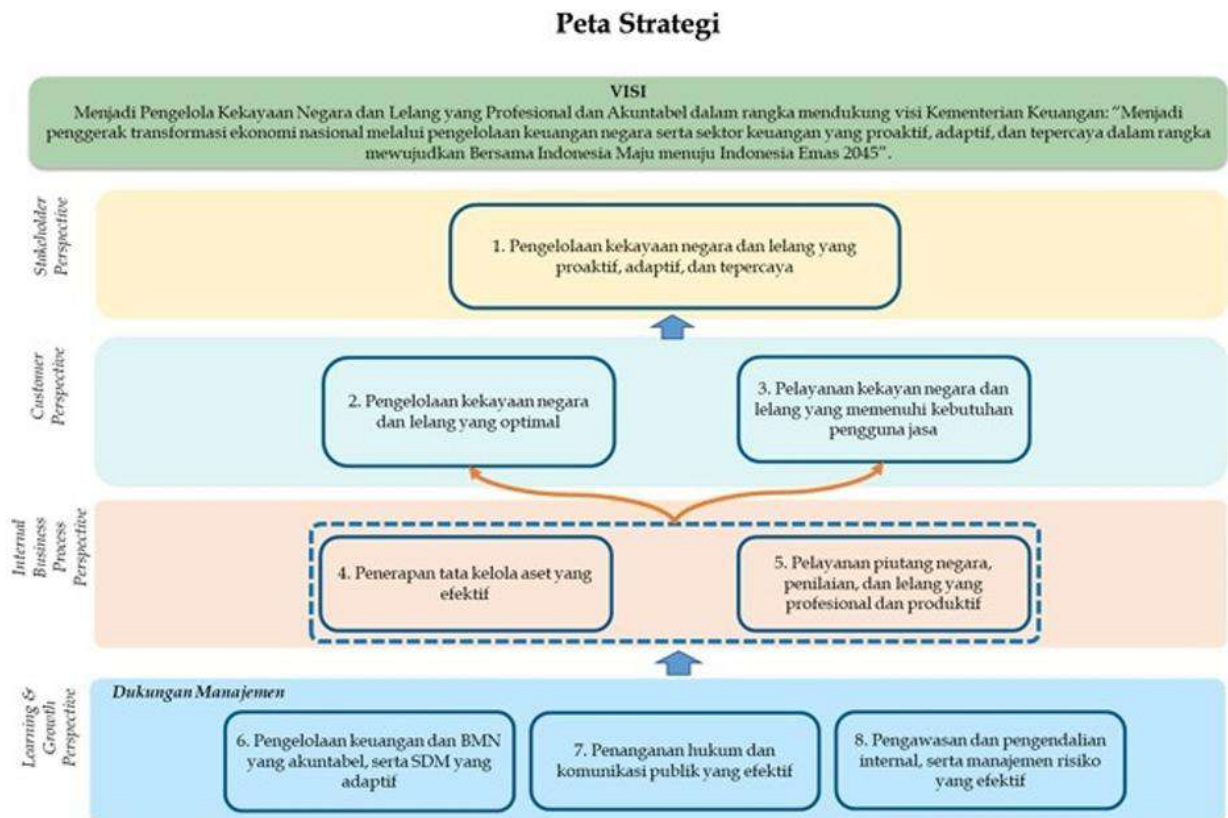
1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dari visi dan misi tersebut di atas kemudian dirumuskan Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis pada Tahun 2025, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Gambar 2.1



Peta Strategi DJKN menerapkan empat perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*

Stakeholders perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang meliputi pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. *Customer Perspective*

Customer perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer* (pengguna layanan) yang merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Internal process perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. *Learning and Growth Perspective*

Learning and Growth Perspective mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Selain itu, terdapat pula Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak dua puluh (19) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realiasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektifitas ekosistem kehumasan	3,55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 dibagi berdasarkan *trajectory* (triwulanan, semesteran, tahunan) sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							

Kode SS/IKU	SS/IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
	3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
	3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif								
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS/IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
		tanah yang disertipikatkan							
	4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								
	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	5c-CP	Persentase produktifitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif								
	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif								
	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target								
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y		
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif									
	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	100	100	

Selanjutnya, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki inisiatif strategis yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, dirumuskan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko yang dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, yang dituangkan dalam bentuk Piagam Manajemen Risiko Nomor 14/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya Pelaksanaan Pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	5
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	11	2

		2.2	Adanya Pembatalan Lelang	22	7
		2.3	Piutang Negara yang disetor rendah	15	1
		2.4	Bertambahnya frekuensi lelang PL II	8	18
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1	Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	11	2
		3.2	Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	12	7
		3.3	Adanya Penilai Pemerintah Non DJKN yang tidak berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis di Kanwil DJKN	10	1
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1	BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	11	2
		4.2	Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	11	2
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1	Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	15	1
		5.2	Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional	11	2
		5.3	Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	13	3
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1	<i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	10	1
		6.2	Tidak tercapainya target <i>output</i> yang telah ditetapkan	11	2
		6.3	Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/renovasi yang terlambat/tidak sesuai jadwal/ketentuan/kontrak	11	2

		6.4	Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/banyak terjadi pengunduran diri diklat	6	2
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	16	2
		7.2	Putusan Pengadilan Kalah	16	2
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1	<i>Awareness</i> terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	11	2
		8.2	Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	2

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki alokasi anggaran sebesar Rp20.227.277.000,- (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Program/Komponen/ Sub-komponen	Volume	Jumlah Biaya
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				
1.	4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		68.550.000
	4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.00 orang	15.000.000
	4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.00 orang	43.590.000
	4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.00 orang	9.960.000
2.	4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		243.937.000
	4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1.0 rekomendasi	174.957.000
	4797.FAE.002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di	2.0 rekomendasi	40.000.000

		Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara		
	4797.FAE.003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	12.0 rekomendasi	28.980.000
3.	4798	Pengelolaan Aset		Rp417.315.000
	4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	15.0 Surat Keputusan	20.000.000
	4798.FAC.004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	55.0 Orang	68.338.000
	4798.FAC.005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1.0 Orang	14.564.000
	4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2.0 rekomendasi	17.500.000
	4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	3.0 rekomendasi	63.380.000
	4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	1.0 rekomendasi	18.761.000
	4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	9.0 Unit	214.772.000
4.	4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		13.100.000
	4801.ACE.001	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	6.0 Orang	13.100.000
Program Dukungan Manajemen				
5.	4700	Legislasi dan Litigasi		23.100.000
	4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5.0 Layanan	23.100.000
6.	4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		19.366.149.000
	4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12.0 Layanan	121.503.000
	4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Layanan	1.878.940.000
	4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	49.0 Unit	238.226.000

	4701.EBB.003	Kendaraan Bermotor	1.0 Unit	28.000.000
	4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	780.0 M2	17.099.480.000
7.	4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		73.126.000
	4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	100.0 Orang	23.200.000
	4702.BMB.002	Kehumasan	6.0 Kegiatan	26.726.000
	4702.BMB.003	Pameran/Eksibisi	2.0 Kegiatan	23.200.000
8.	4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		22.000.000
	4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	3.0 Dokumen	22.000.000

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

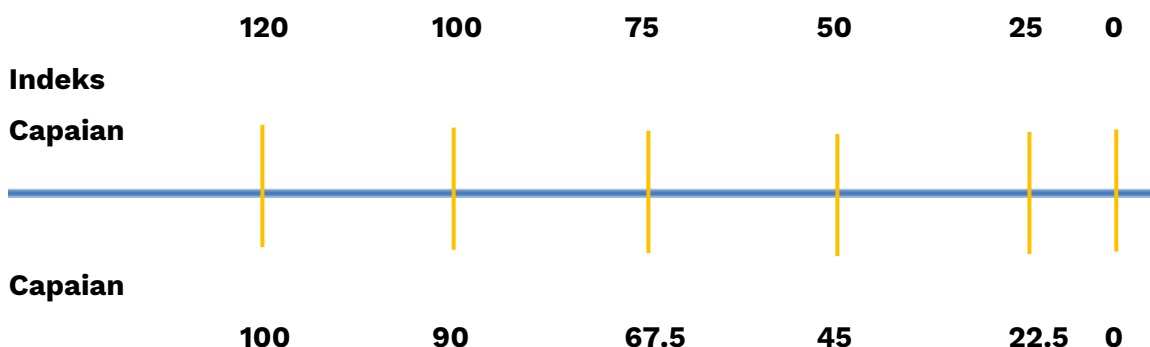
IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Realisasi/Target}] \text{ Capaian} = \left[1 + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n) \right] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian dibawahnya
- In-1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/target x 100%

Cn= Capaian dengan ketentuan:

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka:

C_n	=	Capaian awal
C_{n-1}	=	Capaian dibawahnya
C_{n+1}	=	Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



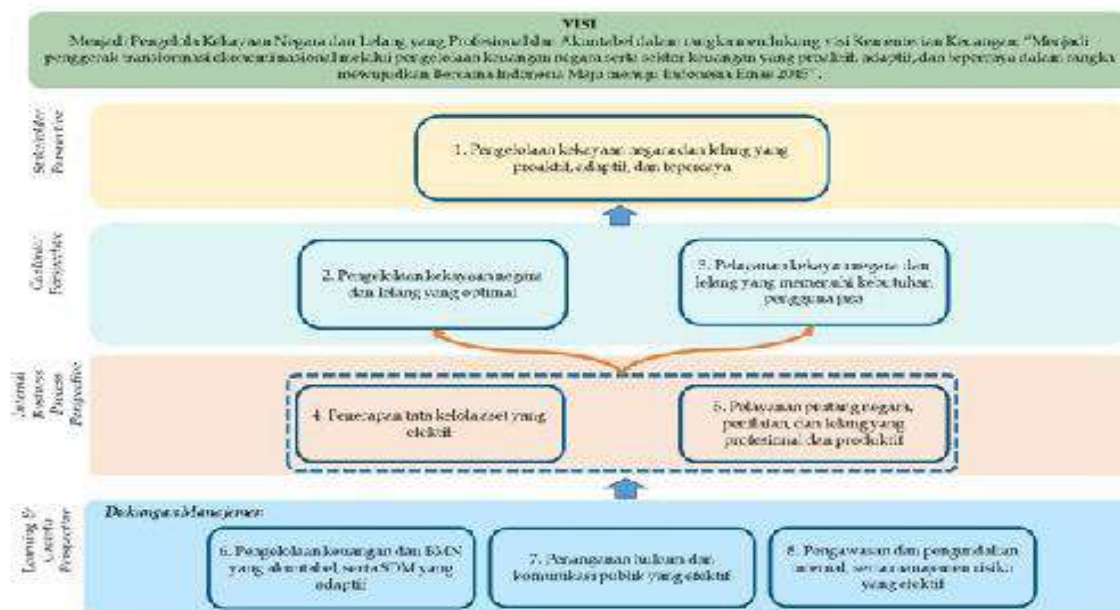
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan dibastakan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp742,902,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp68,550,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp243,937,000
3. Pengelolaan Aset	Rp417,315,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp31,100,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp19,484,375,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigas	Rp23,100,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp19,366,149,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp73,126,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp22,000,000

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Perjalanan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
 Nikodemus Sigit Rahardjo

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo		NAMA	Ronald Silaban
NIP	19720902 199301 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001

Pecanjan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	134 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,2 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

19720902 199301 1 001

Pejabat Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.





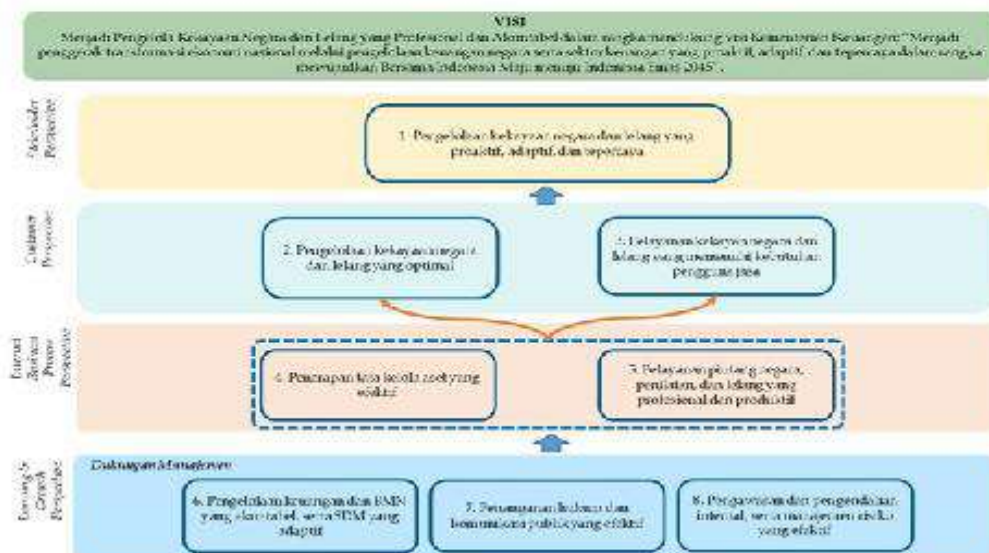
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14a/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)
		2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,26 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3c-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6c-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp742,902,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp68,550,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp243,937,000
3. Pengelolaan Aset	Rp417,315,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp31,100,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp19,484,375,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigas	Rp23,100,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp19,366,149,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp73,126,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp22,000,000

Bandar Lampung, 18 November 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih

Perjanjian kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,26 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Bandar Lampung, 18 November 2025

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Bandar Lampung, 18 November 2025

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
 Cuti Asih

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Cuti Asih	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	19740317 199403 2 001	NIP	19660423 199010 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,26 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



	kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



Bandar Lampung, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Cuti Asih

19740317 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pejabat Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	128 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,26 M)
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



Bandar Lampung, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Cuti Asih

19740317 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pejabat Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 14/KN/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan
Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

«Tanggal Penandatanganan»



DAFTAR RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	5
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	11	2
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	22	7
		2.3 Piutang negara yang di setor rendah	15	1
		2.4 Bertambahnya frekuensi lelang PL II	8	18
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	11	2
		3.2 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	12	7
		3.3 Adanya Penilai Pemerintah Non DJKN yang tidak berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis di Kanwil DJKN	10	1
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	11	2
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	11	2
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	15	1
		5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan profesional	11	2
		5.3 Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	13	3
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1 Ownership pegawai terhadap organisasi	10	1
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	11	2
		6.3 Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/ renovasi yang terlambat/ tidak sesuai jadwal/ ketentuan/ kontrak	11	2

«Tanggung Penandatanganan»



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
		6.4 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/Banyak terjadi pengunduran diri diklat	6	2
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	16	2
		7.2 Putusan Pengadilan Kalah	16	2
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1 Awareness terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	11	2
		8.2 Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	2

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan
Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

«Tanggal Penandatanganan»



D. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/KN/2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

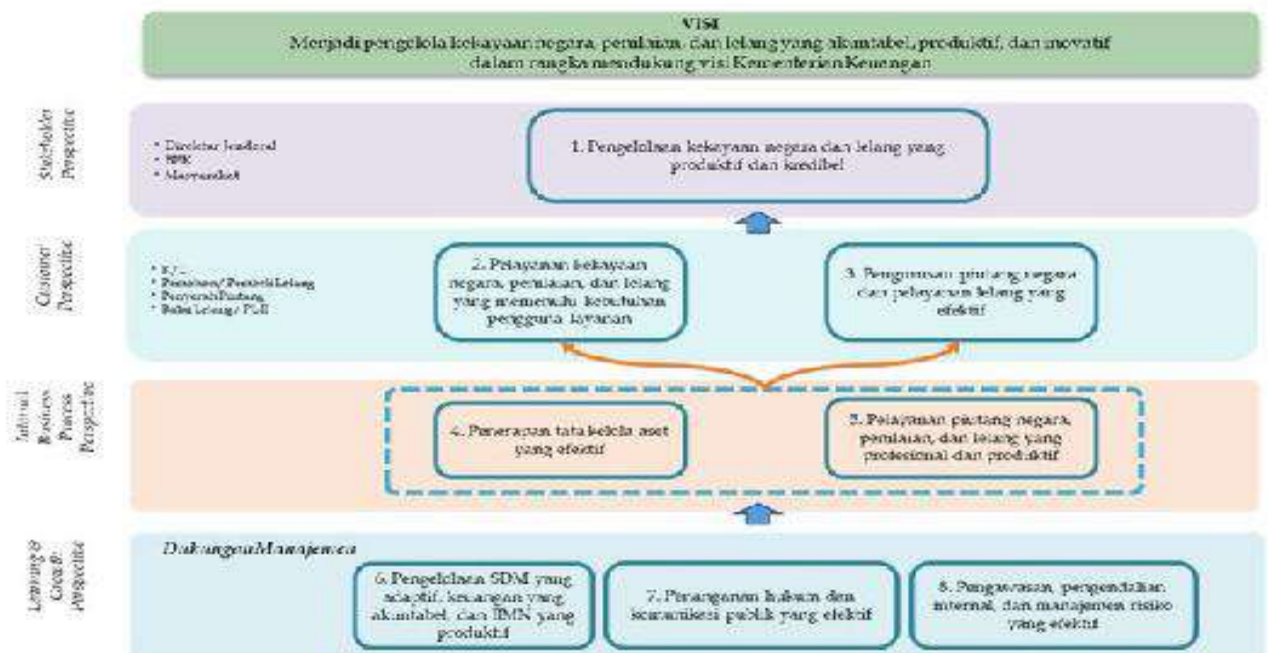
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026





Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp38,2M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,27M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp500M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp902,095,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp161,419,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp353,218,000
3. Pengelolaan Aset	Rp381,058,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administrasi	Rp6,400,000

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp19,111,094,000
----------------------------	------------------

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi	Rp23,100,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp19,007,503,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp59,491,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,000,000

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp38,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,27 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp500M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ferdinan Lengkong		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19661212 199103 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp38,2M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
		Persentase standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,27M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp500M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ferdinan Lengkon
19661212 199103 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Pejabat Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026.



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	130 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp38,2M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,27M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp500M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ferdinan Lengkong
19661212 199103 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Peperangan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://sat.kemankes.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.kemdigi.go.id/verifyPDF>



**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026
NOMOR: 14/KN/2026**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

30 Januari 2026



DAFTAR RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
TAHUN 2026

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	10	1
		1.2 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	18	8
2.	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2.1 Adanya ketidaksesuaian data sertipikat fisik, database pertanahan nasional, dan kondisi riil di lapangan	24	13
		2.2 Adanya keterlambatan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembinaan	10	1
		2.3 Nilai rata-rata hasil verifikasi kompetensi tertulis (verkom) tertulis PFPF pada instansi pemda masih rendah	10	5
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3.1 Piutang negara yang di setor rendah	14	4
		3.2 Terjadinya pembatalan lelang akibat faktor selain pelunasan utang oleh Debitur	6	2
		3.3 Bertambahnya frekuensi lelang PL II (<i>upside risk</i>)	6	13
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 Adanya BMN yang mempunyai nilai SBSK<50% yang tidak teroptimalisasi	14	8
		4.2 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	24	13
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya tingkat penyelesaian BKNP melalui mekanisme pelunasan	14	4
		5.2 Terdapat nilai kaji ulang atas laporan penilaian yang dihasilkan oleh PFPF DJKN yang belum memenuhi standar (minimal nilai 85)	6	1
		5.3 Rendahnya rasio keterlaksanaan lelang	12	9

30 Januari 2026



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6.1 Pendokumentasian pengetahuan (aset intelektual) dalam kegiatan Learning Organization belum optimal	8	1
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	20	12
		6.3 Pemberkasan kearsipan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	8	1
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	5
		7.2 Putusan Pengadilan Kalah	12	10
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1 Adanya tangkap tangan, pungutan liar, tindakan korupsi	15	10
		8.2 Ownership pegawai terhadap organisasi	3	2
		8.3 Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	2
		8.4 Awareness terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	11	2

Jakarta, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://sata.kemendagri.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://ns.kominfo.go.id/verifyPDF>

Bab III Akuntabilitas Kinerja

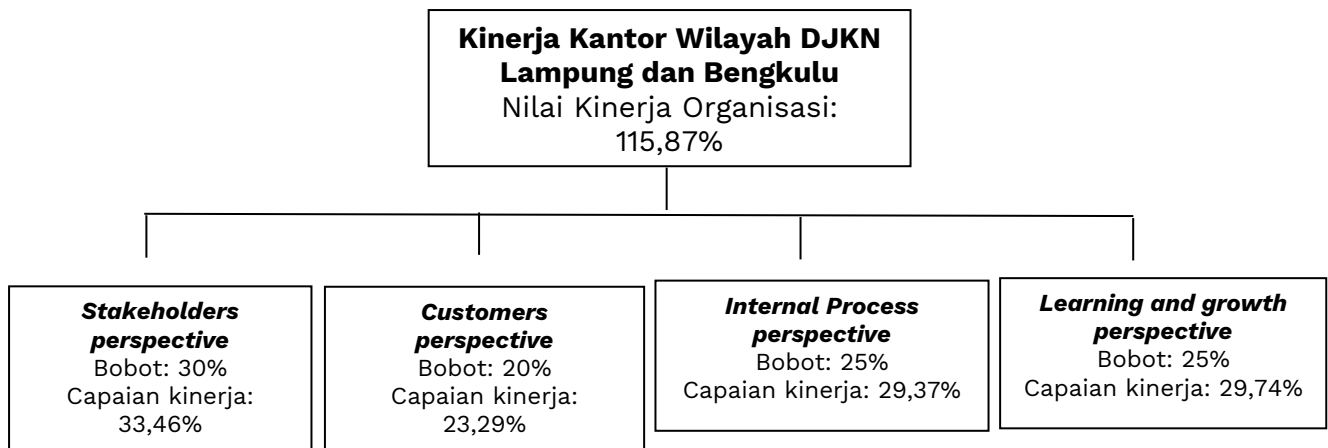
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain



BAB III | Akuntabilitas Kinerja

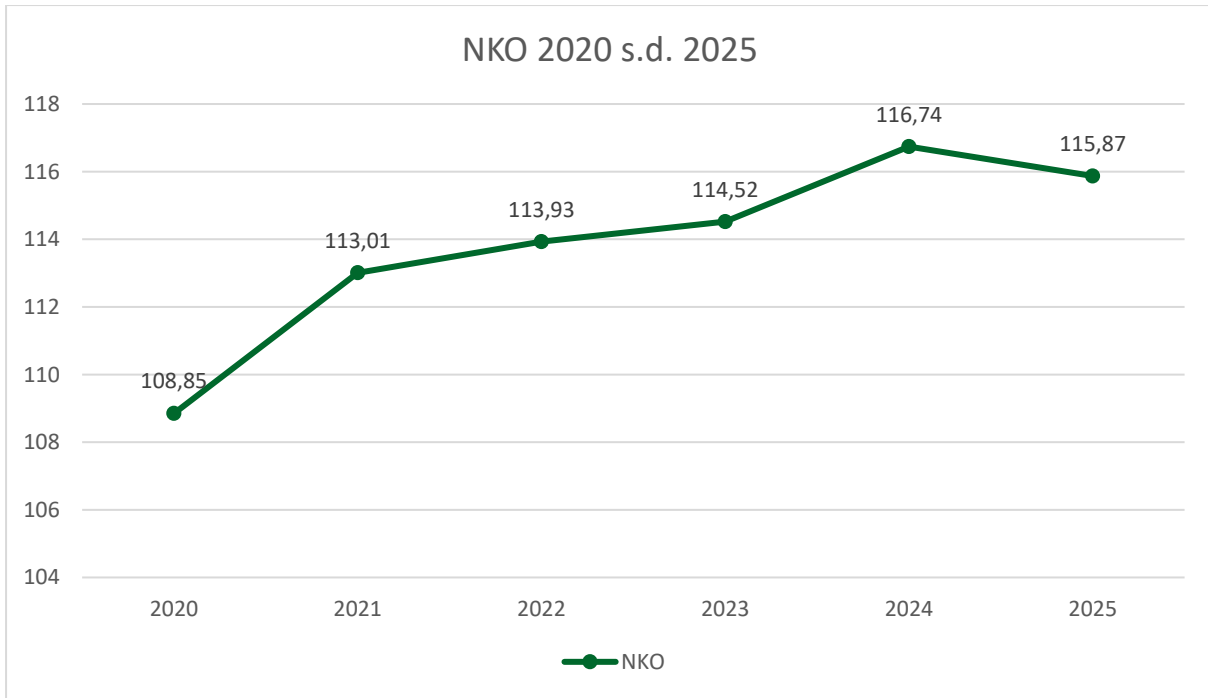
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar **115,87%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



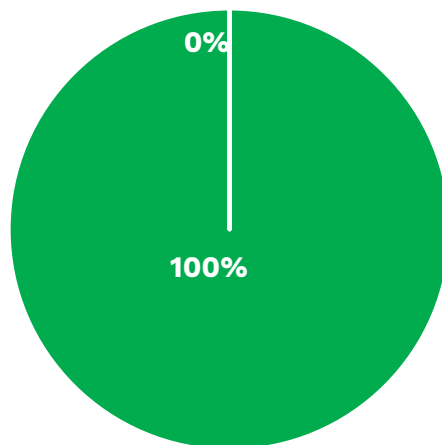
Berikut ini adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 pada Kanwil DJKN lampung dan Bengkulu dengan capaian sebagai berikut:

Tahun	NKO
2025	115,87
2024	116,74
2023	114,52
2022	113,93
2021	113,01
2020	108,85



Selama tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki capaian 19 IKU berstatus hijau. Indeks capaian tertuang pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Capaian Kinerja IKU Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
Tahun 2025



Dari 19 IKU Kemenkeu-Two semua berstatus hijau.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN

melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks integritas	100	105,32	105,32%
2.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)	126,73%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks integritas

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun

maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.

- Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;

- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Formula:				
Komponen I - Indeks Integritas, target di Q4 = 100 (89,37)				
merupakan hasil penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Dilakukan di Q3 s.d Q4				
Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%)				
*Faktor Koreksi : OTT/Fraud (40% x Skor) + Audit Investigasi (30% x Skor) + Pengondisian (20% x Skor) + Informasi APH (10% x Skor)				
*Apresiasi antara lain realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK				
Realisasi Kegiatan Pencegahan				
Penilaian dilakukan atas:				
- Realisasi Kegiatan Pencegahan				
- Persentase realisasi kegiatan internalisasi				
- Kesesuaian topik kegiatan internalisasi				
- Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)				
Komponen II - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q3 = 100%)				
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI.				
Formula = Realisasi Kegiatan / Jumlah Rencana kegiatan Rencana Aksi pada triwulan tersebut				
Max capaian 120%				
Keterangan:				
Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI				
- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII				
- Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut				
- Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi				
Simulasi Penilaian:	Internal+Eksternal+FGD (A)	Faktor Koreksi (B)	Apresiasi (C)	Indeks Akhir (=A-B+C)
	=(89*0,45)+(93*0,45)+(91*0,1)	=((0)+(60*0,3)+(1,81*0,2)+(0))*0,2	=84	=A-B+C

	91	3,67	4,20	91,53
Tujuan:				
IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.				

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Integritas.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	105,32
2024	89,17	-	89,17	-	-	92,44
2023	88,67	-	88,67	-	-	89,17
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	117	117	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100	117	117	120	120	105,32	105,32	
Nilai Kinerja	100	117	117	120	120	105,32	105,32	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2025.
2. Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi Tahun 2025.
3. Melakukan pengelolaan dan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi.
4. Melakukan sosialisasi/amplikasi tolak dan laporkan gratifikasi melalui nota dinas dan media sosial.
5. Sosialisasi Antikorupsi internal.
6. Internalisasi kebijakan penggunaan kendaraan dinas (nota dinas).

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN.
2. Lemahnya sistem tata kelola dan regulasi.
3. Potensi risiko praktik korupsi (gratifikasi/suap) meskipun persepsi risiko gratifikasi eksternal rendah, DJKN tetap mewaspadaai risiko gratifikasi/suap/pemerasan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan, terutama dalam proses pengaduan dan layanan.
4. Menjaga praktik bersih dari risiko internal dan eksternal korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui layanan yang lebih baik, sejalan dengan peta jalan strategis yang telah ditetapkan.

2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b) pemanfaatan barang milik negara; dan
- c) pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pejabat Lelang Kelas I diperoleh dari:

1. Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I;
2. Biaya permohonan lelang Pejabat Lelang Kelas I;
3. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi Pejabat Lelang Kelas I;
4. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Pejabat Lelang Kelas I;
5. Pembatalan lelang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pejabat Lelang Kelas II diperoleh dari:

1. Bea lelang Pejabat Lelang Kelas II;
2. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi Pejabat Lelang Kelas II;
3. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Pejabat Lelang Kelas II;
4. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang; (akun 425839);
5. Pemberian izin operasional Balai Lelang dan pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang; (satker kantor pusat - akun lain 425699);
6. Pengangkatan dan perpanjangan Pejabat Lelang Kelas II; (akun 99), pengangkatan (satker Kantor Pusat DJKN), perpanjangan (satker Kanwil);
7. Kertas sekuriti untuk pembuatan kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II; (satker Kanwil akun: 425699 jasa lainnya).

Komponen Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang berasal dari:

1. PNBP Barang Milik Negara.
 - a. penerimaan dari penggunaan Barang Milik Negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan nilai *revenue* yang diterima) atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit,
 - b. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu serta KPKNL di wilayah kerjanya (KPKNL Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro),
 - c. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu serta KPKNL di bawahnya,

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan KPPN setempat/ Ditjen Perbendaharaan.
2. PNBP Piutang Negara

Nilai hasil pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Biaya administrasi pengurusan piutang negara terdiri dari:

 - a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara 1% dari saldo Hak Penyerah Piutang apabila dilunasi sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit.
 - b. Biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% dari saldo Hak Penyerah Piutang apabila dilunasi setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.

- c. Biaya administrasi penarikan piutang negara 2,5% dari saldo Hak Penyerah Piutang apabila Penyerah Piutang akan melakukan penarikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. PNBP Lelang

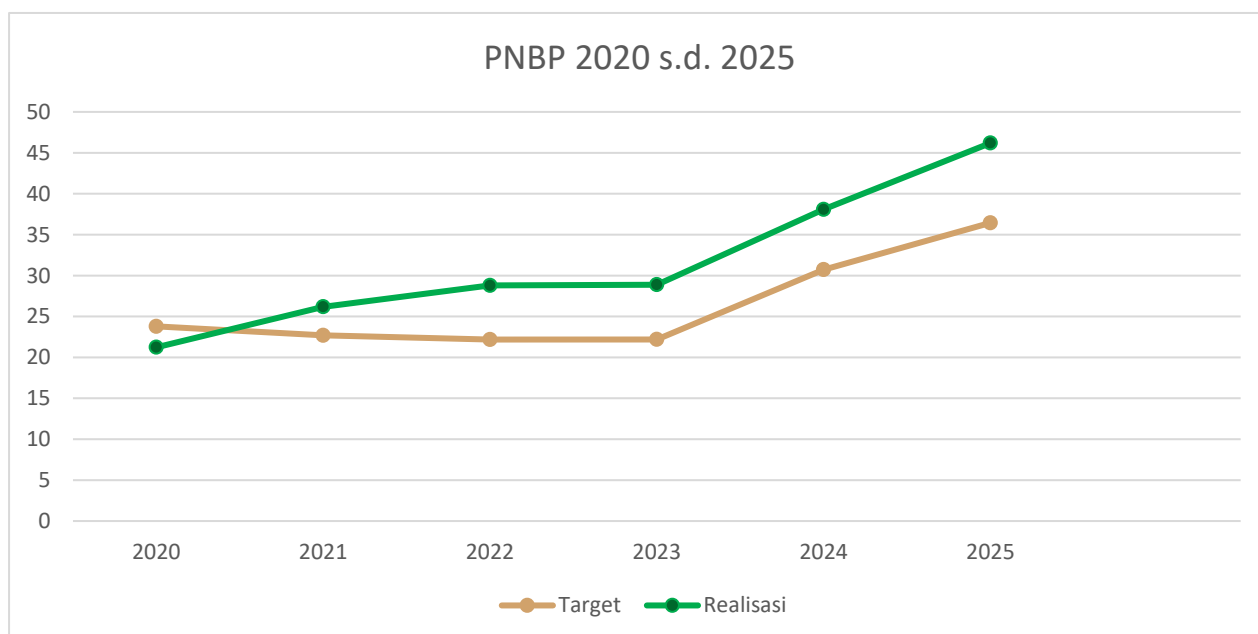
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kantor Wilayah dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian,
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. perijinan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II,
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang,
- h. kertas *security paper* untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II, dan
- i. penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak,
- j. bea perpanjangan masa jabatan PL II.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp 46.191.705.855,80 dari target 2025 sebesar Rp36.448.780.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV Tahun 2025 sebesar 126,73%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1.	Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu	1.379	1.640,42	118,96%
2.	KPKNL Bengkulu	6.970,78	8.831,73	126,70%
3.	KPKNL Bandar Lampung	20.711	26.836,41	129,58%
4.	KPKNL Metro	7.388	8.883,13	120,24%
	Total	36.448,78	46.191,70	126,73%

**dalam juta rupiah*



Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1b-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100 % (Rp36,44 M)	-	100 % (Rp36,44 M)	-	-	126,73% (Rp46,19)
2024	100 % (Rp30,71 M)	-	100 % (Rp30,71 M)	-	-	123,97% (38,07 M)
2023	100% (Rp26,43 M)	-	100% (Rp26,43 M)	-	-	129,79% (Rp34,31 M)
2022	100% (Rp22,18 M)	-	100% (Rp22,18 M)	-	-	129,5% (Rp28,72 M)
2021	100% (Rp22,69 M)	-	100% (Rp22,69 M)	-	-	115,38% (Rp26,18 M)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	255%	162,64%	162,64%	139,05%	139,05%	126,73%	126,73%	
Capaian	255%	162,64%	162,64%	139,05%	139,05%	126,73%	126,73%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain berupa:

1. kurangnya identifikasi potensi pemanfaatan BMN oleh satuan kerja sehingga aset BMN tidak termanfaatkan sesuai dengan potensinya, hal ini disebabkan antara lain masih rendahnya pemahaman dan kesadaran satuan kerja dalam mengelola asetnya khususnya dalam pemanfaatan BMN untuk menunjang penerimaan PNBP;
2. masih banyak BMN yang digunakan secara tidak efisien atau berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi namun tidak segera dilakukan penghapusan melalui penjualan lelang;
3. keterbatasan SDM pada satker yang profesional dalam mengelola BMN sehingga berdampak kurang maksimalnya pengelolaan BMN;
4. kewenangan pengajuan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan pada sebagian Kementerian/Lembaga masih berada pada Pengguna Barang atau Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga, belum didelegasikan kepada Kepala Satker/Kuasa Pengguna Barang, sehingga memakan waktu dalam mengajukan permohonan;
5. debitur tidak kooperatif, alamat debitur tidak ditemukan, tidak terdapat barang jaminan, terdapat barang jaminan namun tidak ditemukan atau nilainya sudah tidak Ekonomis;

6. keterbatasan SDM dan anggaran untuk melakukan pengurusan piutang negara;
7. K/L terkait tidak kooperatif dalam membantu mempercepat pengurusan piutang negara;
8. debitur tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang;
9. banyaknya lelang TAP karena nilai limit sesuai dengan harga pasar;
10. potensi lelang sukarela pada Pejabat Lelang Kelas II terbatas karena belum adanya aplikasi lelang *online* pada Pejabat Lelang Kelas II;
11. penggalian potensi lelang yang belum optimal; dan
12. barang yang dilelang tidak *free and clear* sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang untuk mengikuti lelang;
13. implementasi Aplikasi Lelang.go.id generasi 2 yang masih banyak kendala;
14. perubahan kebijakan pada PT. Pegadaian (Persero) atas penanganan kredit macet;
15. ketersediaan data PNBPN yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Layanan Umum (BLU);
16. pengaturan pelimpahan kewenangan pada Kementerian/Lembaga di satuan Kerja yang menghambat proses pengelolaan BMN;
17. perlunya penyempurnaan aplikasi SIMAN V2 yang lebih *user friendly* seperti penambahan notifikasi atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);

Tindakan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU:

1. melaksanakan pembinaan kepada KPKNL untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir serta satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan,
2. melakukan pendampingan sosialisasi pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh KPKNL bagi satuan kerja di wilayah kerjanya,
3. monitoring dan evaluasi kepada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu,
4. pembinaan secara berkala kepada KPKNL terutama para kepala seksi piutang negara, jurusita, pemeriksa dan pelaksana seksi piutang negara di KPKNL,
5. melakukan BKO Perbantuan SDM dalam pengurusan piutang negara,
6. melaksanakan pendampingan dalam pengurusan piutang negara,
7. melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait untuk mempercepat pengurusan piutang negara

8. melaksanakan ekstensifikasi penggalan piutang negara/daerah misalnya Koordinasi dan penggalan potensi piutang daerah pada Pemerintah Daerah ataupun kepada Kementerian/Lembaga,
9. melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara pada Penyerah Piutang Kementerian/Lembaga dan KPKNL,
10. melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara oleh K/L Badan Hukum Publik/Lembaga/BUN dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN kepada Penyerah Piutang dan KPKNL,
11. menghimbau KPKNL mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/2024 dari Kantor Pusat tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Hukum Publik oleh PUPN dan mulai melakukan koordinasi dengan BPJS sesuai wilayah kerja masing-masing,
12. menghimbau KPKNL mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 dari Kantor Pusat tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dan mulai melakukan profiling debitur yang telah memenuhi syarat untuk segera dilakukan optimalisasi pengurusan baik berupa pemeriksaan kondisi ekonomi debitur dan peningkatan pengurusan Surat Paksa sampai PSBDT,
13. asistensi Pemeriksaan oleh Bidang Piutang Negara terkait perbantuan Pemeriksaan Barang Jaminan/ *Asset Tracing/Debtor Tracing*,
14. monitoring dan evaluasi SOP persetujuan *Crash Program* atas permohonan persetujuan dan menyediakan alat bantu untuk perhitungan bagi KPKNL dan menyediakan aplikasi notifikasi bagi debitur dalam mengingatkan batas waktu pembayaran keringanan,
15. monitoring evaluasi kinerja piutang BPD LH dan penggalan potensi piutang BPD LH pada Ditjen Perbendaharaan dan BLU BPD LH (Penyerah Piutang),
16. monitoring evaluasi semua kinerja IKU piutang Negara secara triwulan oleh aplikasi bantu Master Pengambilan Keputusan yang datanya diextract dari aplikasi FocusPN,
17. melakukan evaluasi digitalisasi data pengurusan piutang negara pada *focuspn* sehingga sudah sesuai dengan data akurasi dan melaporkan kepada Kantor Pusat secara tepat waktu setiap triwulan,
18. melaksanakan kegiatan *Asset Talk* berupa sosialisasi terkait pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang kepada *stakeholder* di Wilayah

- kerja KPKNL dan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara ke-19,
19. pembinaan dan pemeriksaan rutin Pejabat Fungsional Pelelang KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang,
 20. koordinasi dan penggalan potensi lelang pada Kantor Wilayah Pegadaian Wilayah III Palembang,
 21. monitoring kinerja lelang dan penggalan potensi lelang di Balai Lelang serasi Palembang,
 22. sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang kepada Kemenkeu Satu Lampung,
 23. asistensi Pejabat Fungsional Pelelang dan Bendahara terkait Aplikasi Lelang.go.id V 2,
 24. monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Lelang sukarela Pejabat Lelang Kelas II atas permohonan PT. Balai Lelang JBA,
 25. monitoring evaluasi kinerja lelang dan penggalan potensi lelang UUHT Pasal 6 pada Perbankan,
 26. penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang kepada UMKM di wilayah Lampung dan Bengkulu,
 27. pameran dan lelang Produk UMKM Expo Kemenkeu Satu Lampung pada 30 Oktober 2025 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung,
 28. optimalisasi pemanfaatan aset dengan meningkatkan utilisasi aset yang idle atau kurang termanfaatkan agar memberikan kontribusi lebih besar bagi APBN dan melakukan penilaian (*appraisal*) aset secara berkala dan akurat agar nilai lelang yang dihasilkan optimal,
 29. penguatan kebijakan dan regulasi lelang dengan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) lelang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kepastian hukum pelaksanaan lelang dan melaksanakan kebijakan di bidang lelang secara efektif, termasuk pengembangan lelang berbasis teknologi (*e-Auction*),
 30. pengembangan SDM dan Sistem Informasi dengan membina profesi Pejabat Lelang Kelas II dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang lelang dan memperkuat analisis data lelang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis,
 31. kontribusi langsung melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kegiatan lelang, baik lelang sukarela maupun lelang eksekusi dan

- pemanfaatan hasil lelang dan pengelolaan aset untuk mendukung pembiayaan APBN,
32. rutin melaporkan monev Implementasi V2 kepada TSI dan Dit Lelang, melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II, melaksanakan dan pembinaan dan pemeriksaan ke Balai Lelang JBA, melakukan pembinaan dan pemeriksaan Minuta ke KPKNL Bandar Lampung, pemeriksaan dan pembinaan Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Metro, melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II Sdr. Reza Berawi dan Sdr. Srimulyono Herlambang,
 33. melaksanakan rapat koordinasi dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Kota Batam,
 34. pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Bengkulu,
 35. pembinaan dan pemeriksaan kepada Pejabat Lelang Kelas II di Provinsi Bengkulu,
 36. bersama dengan KPKNL Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dengan satuan kerja terkait Lelang.go.id versi 2,
 37. melakukan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara pada saat pengukuran portofolio aset dan penggalian potensi penjualan barang rampasan,
 38. pembinaan dan pemeriksaan rutin kepada Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro guna memberikan apresiasi serta arahan kepada Kepala Bidang kepada KPKNL terkait peningkatan transaksi lelang,
 39. pembinaan dan pemeriksaan kepada Pejabat Lelang Kelas II lingkup Provinsi Lampung guna berdiskusi terkait kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi penyelesaian,
 40. mengarahkan kepada KPKNL agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir serta persetujuan pemindahtanganan untuk segera ditindaklanjuti dengan lelang Barang Milik Negara.

Action plan selanjutnya adalah:

1. melaksanakan pembinaan dan pendampingan sosialisasi pengelolaan BMN kepada KPKNL untuk satuan kerja dibawahnya,
2. melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga untuk percepatan persetujuan permohonan pemanfaatan BMN,
3. melaksanakan pembinaan kepada KPKNL, Jurusita, Pemeriksa dan Pelaksana seksi Piutang Negara baik secara luring maupun daring dalam rangka pencapaian IKU pada Bidang Piutang Negara,

4. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh KPKNL dan menghimbau untuk melakukan optimalisasi dan percepatan PSBDT dalam rangka mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024,
5. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Hukum Publik/Lembaga Khusus terkait Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Hukum Publik oleh PUPN dan mulai melakukan koordinasi dengan BPJS, OJK, dan BI sesuai wilayah kerja masing-masing,
6. mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara oleh Kementerian/Lembaga/BUN dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN kepada Penyerah Piutang dan KPKNL,
7. mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dan mulai melakukan *profiling* debitur yang telah memenuhi syarat untuk segera dilakukan optimalisasi pengurusan baik berupa pemeriksaan kondisi ekonomi debitur dan peningkatan pengurusan Surat Paksa sampai PSBDT,
8. meningkatkan koordinasi dan intimasi dengan Penyerah Piutang BPD LH terkait kegiatan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM,
9. melakukan sosialisasi dan penggalan potensi penghapusan piutang daerah kepada Pemda,
10. melakukan rapat PUPN secara rutin untuk menggali permasalahan dan menemukan solusi,
11. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Anggota PUPN terutama unsur Kejaksaan dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengurusan piutang negara yang bermasalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut,
12. melaksanakan pembinaan kepada KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang baik secara langsung maupun tidak langsung,
13. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan lelang sukarela yang dilaksanakan oleh Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II,
14. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Perbankan terkait strategi dalam mengoptimalkan capaian target kinerja lelang,

15. mensosialisasikan Aplikasi Lelang.go.id Versi II kepada *Stakeholder* Lelang dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang.go.id Versi II ke Kantor Pusat DJKN,
16. meningkatkan koordinasi dan intimasi dengan PT. Pegadaian terkait penatausahaan PNBP Lelang dan pencapaian target kinerja lelang pegadaian, dan
17. melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang sukarela produk UMKM.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	105,71%	105,71%
2	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)	119,56% (Rp681,76 M)	120%
3	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)	128,07% (Rp2,90 M)	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

A. Tahap Pengujian NUP BMN Target

$X = \frac{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil optimalisasi (b)}}{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil pengukuran (a)}}$

keterangan:

X = Hasil Pengujian Awal

(a) = merupakan target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$

(b) = merupakan hasil optimalisasi atas BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$

Catatan Tahap Pengujian Awal NUP Target:

1. Pengujian tingkat kesesuaian menggunakan formulir pendataan dan formulir perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
2. Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujiannya menghasilkan > 1 ", NUP target tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi.
3. Terhadap NUP target yang "hasil pengujiannya menghasilkan < 1 ", NUP target tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. NUP target dimaksud merupakan objek pembinaan guna meningkatkan tingkat optimalisasi.

B Tahap Perhitungan Optimalisasi

Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1" dilakukan perhitungan tingkat optimalisasinya, dengan formula dan pembobotan:

1. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
 - a) Penggunaan Sendiri:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5
 - b) Penggunaan Sementara: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan sementara berikutnya.
 - c) Penggunaan Bersama: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan bersama K/L ke-2, ke-3, dst pada pelaksanaan berikutnya.
2. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
 - a) Sewa dan/atau Pinjam Pakai:
 - * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3
 - * 2 atau lebih kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 100% dari 5 --> 5
 - b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) / Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) / Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) / Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) bernilai 100% dari 5 --> 5

Catatan Tahap Perhitungan Optimalisasi:

1. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sendiri dapat dilakukan beberapa kali, dengan pembobotan:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5
(contoh mengadakan 2 Ruang, yaitu Ruang Laktasi dan Ruang bermain anak pengguna layanan, maka nilainya adalah 50% dari bobot 5, yaitu 2,5);
2. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sementara dan penggunaan bersama dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaannya berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL) dan diberlakukan kelipatan capaian.
3. Pemberian capaian dengan mekanisme Pemanfaatan BMN Sewa dan/atau Pinjam

Pakai dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaan pemanfaatan tersebut berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL),

dengan pembobotan capaian:

* 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3

* 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5

C. Tahap Perhitungan Realisasi Optimalisasi BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN = $[(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan} + \text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})/3] \times 100\%$

Objek Target:

1. Tanah Kantor;
2. Bangunan/Gedung Kantor;

Pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun berjalan

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100 %	-	100 %	-	-	105,71 %
2024	100 %	-	100 %	-	-	114,51 %
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	50 %	60 %	60 %	80 %	80 %	100 %	100 %	Max/ TLK
Realisasi	118,40%	104,17%	104,17%	103,82%	103,82%	105,71%	105,71%	
Capaian	236,80%	173,62%	173,62%	129,78%	129,78%	105,71%	105,71%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	106%	106%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan kepada KPKNL untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir serta satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.
2. Melakukan pendampingan sosialisasi pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh KPKNL bagi Satuan Kerja di wilayah kerjanya.
3. Melakukan Identifikasi dan penargetan aset dengan memilah Barang Milik Negara (BMN) yang berpotensi untuk dioptimalkan (NUP BMN Target).
4. Pembinaan ke satuan kerja (Satker) untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pengguna barang untuk meningkatkan pengelolaan aset mereka.
5. Pendataan dan pengujian dengan melakukan pendataan hasil optimalisasi dan mengujinya untuk memastikan kesesuaian dengan standar.
6. Perhitungan dan pelaporan menghitung capaian tingkat optimalisasi lalu melakukan review, konsolidasi dan pelaporan hasil pengukuran.

7. Pemanfaatan dan peningkatkan nilai dengan mengoptimalkan potensi fisk, lokasi, nilai dan legalitas aset, termasuk melalui studi (*Highest and Best Use*) dan pengembangan strategi optimalisasi.
8. Peningkatan Akuntabilitas dengan menjadikan pengelolaan aset yang akuntabel dan produktif sebagai salah satu sasaran strategis didukung oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan kesadaran pengguna BMN yang perlu dipupuk untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan BMN.
2. Kewenangan pengajuan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan pada sebagian Kementerian/Lembaga masih berada pada Pengguna Barang atau Koordinator Wilayah Kementerian /Lembaga, belum didelegasikan kepada Kepala Satker/Kuasa Pengguna Barang, sehingga memakan waktu dalam mengajukan permohonan.
3. Data dan informasi meliputi lemahnya pendataan, aset belum tercatat atau tidak sesuai kodefikasi barang (tidak akurat) dan keterbatasan basis data aset yang komprehensif.
4. Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih antara lain peraturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, kompleksitas regulasi dan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan dan sengketa kepemilikan aset, terutama tanah yang sering terjadi.
5. Kapasitas SDM meliputi kurangnya pemahaman/pengetahuan tentang pengelolaan aset negara (BMN), minimnya sikap tanggung jawab dan kepedulian dari pimpinan dan staf dan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan.
6. Tata Kelola (*governance*) dan Komitmen meliputi kurangnya komitmen pimpinan sebagai faktor dominan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan risiko penyalahgunaan, mekanisme pemanfaatan aset yang tidak sesuai aturan.
7. Karakteristik Aset meliputi aset yang tidak produktif (*idle*) dan tidak terawat menjadi beban anggaran, aset *likuid* (dana) memiliki imbal hasil rendah atau volatilitas pasar yang tinggi.

2. Persentase realisasi pokok lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) **Pengelolaan Keuangan Negara** melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) **Penegakan Hukum** melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) **Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi** dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target.

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. **Harga lelang** adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}$$

Tujuan:

Optimalisasi kontribusi lelang dalam perekonomian nasional

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp570.249.000.000,00

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I), Pejabat Lelang (PL) Kelas II, dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2025 adalah:

1. Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp351.881.119.865,00 dari target sebesar Rp258.600.000.000,00.
2. Pokok lelang PL Kelas II mencapai Rp273.402.331.333,00 dari target sebesar Rp232.949.000.000,00.
3. Pokok lelang pegadaian mencapai Rp56.486.020.500,00 dari target Rp 78.700.000.000,00.

Pokok lelang secara keseluruhan mencapai Rp681.769.471.698,00 dari target sebesar Rp570.249.000.000,00.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2b-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (Rp570,24 M)	-	100% (Rp570,24 M)	-	-	119,56% (Rp681,76 M)
2024	100% (Rp441,463 M)	-	100% (Rp441,463 M)	-	-	130,36% (Rp575,485 M)
2023	100% (Rp420.4 M)	-	100% (Rp420.4 M)	-	-	98,12% (Rp412,50 M)
2022	100% (Rp400 M)	-	100% (Rp400 M)	-	-	90,12% (Rp360,46 M)
2021	-	-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Max/ TLK
Realisasi	335,73%	198,89%	198,89%	153,20%	153,20%	119,56%	119,56%	
Capaian	335,73%	198,89%	198,89%	153,20%	153,20%	119,56%	119,56%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	119,56%	119,56%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Rutin melaporkan monev Implementasi V2 kepada Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi DJKN dan Dit Lelang.
2. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II dan melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Balai Lelang JBA.
3. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan Minuta Risalah Lelang ke KPKNL Bandar Lampung dan pemeriksaan dan pembinaan Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Metro.
4. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II.
5. Mengadakan rapat koordinasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Kota Batam.
6. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Bengkulu dan melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada Pejabat lelang Kelas II KPKNL Bengkulu.
7. Bersama KPKNL Bandar Lampung mengadakan sosialisasi dengan satuan kerja terkait Lelang.go.id versi 2.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Implementasi Aplikasi lelang.go.id generasi 2 yang masih banyak kendala.
2. Adanya Perubahan kebijakan PT. Pegadaian (Persero) atas penanganan kredit macet.
3. Penentuan harga limit (harga dasar) yang terlalu tinggi mengurangi minat pembeli, sementara yang terlalu rendah menurunkan potensi penerimaan negara (kreditur).
4. Penilaian yang tidak profesional atau kurang mendalam terhadap kondisi rill obyek lelang.
5. Proses lelang yang panjang dan rumit bisa menghambat efisiensi dan partisipasi.

6. Obyek lelang bermasalah status kepemilikan atau legalitas dokumennya, menyebabkan ketidakpastian.
7. Adanya permintaan penjual, penetapan pengadilan, atau kendala lain yang menyebabkan lelang dibatalkan atau ditunda.
8. Daya beli masyarakat menurun bisa mengurangi antusiasme dalam mengikuti lelang.
9. Kurangnya kompetensi atau pemahaman petugas lelang dalam menangani kasus-kasus kompleks.

3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 jls. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas Piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen antara lain:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Target di 2025 persentase realisasi penurunan saldo piutang negara

Formula:

$(\text{Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang negara} / \text{Target Penurunan Nilai Saldo Piutang negara}) \times 100\%$

Tujuan:

Percepatan penurunan saldo piutang Negara pada K/L/Pemda maupun piutang Negara pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2c-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (Rp2,2 M)	-	100% (Rp2,2 M)	-	-	128,07% (Rp2,9 M)
2024	100% (Rp5,32 M)	-	100% (Rp5,32 M)	-	-	145,04% (Rp7,72 M)
2023	100% (Rp3,29 M)	-	100% (Rp3,29 M)	-	-	166,30% (Rp5,48 M)
2022	100% (Rp2,94 M)	-	100% (Rp2,94 M)	-	-	114,44% (Rp3,36 M)
2021	100% (Rp1,55 M)	-	100% (Rp1,55 M)	-	-	141% (Rp2,19 M)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Max/ TLK
Realisasi	128,78%	111,37%	111,37%	113,68%	113,68%	128,07%	128,07%	
Capaian	128,78%	111,37%	111,37%	113,68%	113,68%	128,07%	128,07%	
Nilai Kinerja	120%	111,37%	111,37%	111,37%	111,37%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan kegiatan penggalan potensi dan koordinasi serta Evaluasi pelaksanaan pengurusan/penyelesaian piutang bersama:
 - a. Kejaksaan Tinggi (ASDATUN selaku Anggota PUPN) pada tanggal 27 Februari 2025.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 12 Maret 2025 dan pada tanggal 9 Mei 2025.
 - c. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Perwakilan Provinsi Lampung pada tanggal 14 Maret 2025.
2. Dalam kegiatan tersebut koordinasi dan evaluasi tersebut telah dilakukan peninjauan mengenai dilakukannya upaya penagihan bersama-sama dengan pihak penyerah piutang.
3. Melakukan monitoring secara berkala ke KPKNL di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu terkait pengurusan piutang negara.
4. Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk bisa dilaksanakan penagihan bersama.
5. KPKNL dapat melaksanakan penagihan/pengurusan piutang negara bersama dengan Kantor Wilayah.
6. Mendorong KPKNL untuk melaksanakan intensifikasi pengurusan piutang negara.
7. Melakukan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang yang tidak kooperatif.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran (terutama biaya perjalanan dinas).
2. Terdapat Piutang dengan barang jaminan yang dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penyerah piutang maupun KPKNL, sehingga tindak lanjut pengurusan piutang negara tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. Adanya penyerah piutang yang berasal dari instansi pemerintah daerah yang tidak kooperatif.
4. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menurunkan outstanding piutang dan jumlah BKPN yang bisa diselesaikan, menunjukkan adanya celah dalam eksekusi di lapangan.
5. Kelengkapan dan kualitas data BKPN seringkali tidak memadai, menghambat proses penagihan dan penyelesaian secara optimal.
6. Pembayaran seringkali tidak tepat waktu, bahkan ada penanggung utang yang tidak kooperatif, dipengaruhi oleh kondisi keuangan pribadi atau perusahaan.
7. Proses penagihan mengalami kendala seperti kesalahan administrasi *invoice*, tidak terdeteksinya pembayaran yang sudah masuk, serta kurangnya insentif untuk pembayaran cepat.
8. Kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks dan fluktuasi ekonomi dapat mempersulit penanggung utang untuk melunasi kewajibannya, yang berdampak pada penagihan piutang negara.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.3. dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	97,76	120%
2.	Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi	74	105,01	120%
3.	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70 %	80,40%	115%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian

- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Formula:

Capaian = Hasil survei kepuasan pengguna layanan

Tujuan Strategis:

Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3a-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	-	77	-	-	97,76
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	4,41	-	4,41	-	-	4,69
2021	4,39	-	4,39	-	-	4,66

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ TLK
Realisasi	97,29	98,05	98,05	97,35	97,35	97,76	97,76	
Capaian	126,35%	127,33%	127,33%	126,42%	126,42%	126,96%	126,96%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan nota permintaan data responden ke masing-masing bidang, monitoring pengisian e-SKPL dan mengingatkan bidang untuk memonitor pengisian survei oleh responden.
2. Berkoordinasi dengan PIC masing-masing bidang untuk melakukan monitoring pengisian survei dan optimalisasi hasil.
3. Melaksanakan survei secara berkala untuk mengukur persepsi pengguna layanan.
4. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data mendalam.
5. Menilai unsur-unsur pelayanan utama seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk/kualitas, kompetensi petugas, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan dan saran.
6. Mengidentifikasi unsur dengan nilai kepuasan terendah untuk menjadi fokus perbaikan.
7. Memantau capaian IKU secara rutin untuk melihat tren peningkatan dan penurunan.
8. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas langkah perbaikan yang telah diambil.
9. Menyusun dan melaporkan hasil SKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) kepada Instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan jumlah reponden yang langsung mendapatkan layanan selama periode survei.
2. Kompetensi rendah, kurangnya pelatihan dan motivasi aparatur yang tidak memadai.
3. Minimnya infrastruktur digital dan anggaran untuk inovasi serta pemeliharaan.

2. Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan

pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di **Kanwil** terdiri dari 4 komponen antara lain:

Nama Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4
Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	74	74	74	74
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang	74	74	74	74
Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	74	74	74	74
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	74	74	74	74
IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74
Ketentuan cascading IKU dari Kanwil ke KPKNL				

Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	Hanya di Kanwil, tidak dicascade ke KPKNL
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan seluruh PF Pelelang
Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	Hanya di Kanwil (wajib cascade ke Kabid Penilaian), tidak dicascade ke KPKNL
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan Kasi PN di KPKNL
Rincian tiap komponen silakan lihat manual komponen IKU	
Formula	

Realisasi IKU = Rata-rata Realisasi Komponen 1, 2, 3, dan 4

Tujuan:

Untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3b-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	74	-	-	105,01
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	91	-	91	-	-	97,24
2021	89	-	89	-	-	95,89

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Po/ K P
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	228,50	140,69	140,69	122,79	122,79	105,01	105,01	

Capaian	308,79%	190,12%	190,12%	165,93%	165,93%	141,90%	141,90%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Peta Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan sasaran strategis seperti Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel dan Produktif.
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dari sasaran tersebut.
3. Merencanakan kebutuhan dan anggaran BMN, proses pengadaan barang, penggunaan BMN untuk tupoksi dan Optimalisasi pemanfaatan BMN.
4. Pemantauan, evaluasi dan revisi IKU secara berkala untuk memastikan pencapaian target secara optimal.
5. Mengintegrasikan sasaran strategis (Komunikasi Publik yang efektif dan sistem informasi yang andal untuk mendukung seluruh fungsi, termasuk lelang).
6. Peningkatan *platform* lelang.go.id agar lebih mudah diakses, informatif dan kaya fitur untuk edukasi calon peserta lelang.
7. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar mereka menjadi komunikator dan edukator yang efektif.
8. Mengukur capaian indikator seperti tingkat kepuasan pengguna jasa, jumlah peserta lelang dan jangkauan informasi lelang.
9. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi penilaian oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
10. Pelaksanaan sosialisasi dalam beberapa periode yaitu bulan Januari, Maret dan Juni Tahun 2025.
11. Pelaksanaan evaluasi pasca sosialisasi melalui nilai evaluasi peserta dan nilai rata-rata ujian.
12. Penyesuaian indeks capaian berdasarkan jumlah hari kerja dan indeks kegiatan.
13. Melaksanakan *Asset Tracing* (pemeriksaan harta kekayaan lain penanggung hutang) dan penyitaan jika ditemukan.
14. Penerbitan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) untuk piutang yang sudah optimal tapi belum lunas serta Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) bagi K/L yang tidak menyerahkan pengurusan ke PUPN.

15. Melakukan pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berdasarkan umur, tahap pengurusan dan prioritas penyelesaian.
16. Penyelesaian *outstanding* BKPN aktif yang tinggi menjadi focus untuk mendukung tugas tambahan DJKN.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Permasalahan hukum dan legalitas tanah BMN dikuasai pihak lain, disertipikatkan atas nama pihak lain dan kurangnya pengamanan fisik.
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan BMN di tingkat satker serta kurangnya integritas dan disiplin pegawai.
3. Adanya BMN *idle* (tidak terpakai) belum tercatat dalam SIMAN atau tidak sesuai kodefikasi barang.
4. Keterbatasan dalam harmonisasi regulasi dan implementasi peraturan bersama dengan instansi lain seperti BMN.
5. Keterbatasan atau kurangnya program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk Jafung Pelelang.
6. Strategi sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan massif.
7. Kendala teknis atau kesulitan bagi sebagian pengguna awam dalam mengakses dan bertransaksi di *platform* lelang *online*.
8. Tantangan dalam integrasi sistem informasi lelang yang kompleks dan beragam.
9. Keterbatasan kompetensi, pelatihan yang belum memadai dan resistensi terhadap perubahan dari pegawai dapat memperlambat proses penilaian yang akuntabel dan profesional.
10. Dinamika ekspektasi pengguna jasa (pemerintah, publik) yang terus meningkat menuntut kualitas penilaian yang lebih tinggi sementara kesiapan internal belum selalu sejalan.
11. Masalah Internalisasi yang belum merata, tantangan perubahan budaya kerja, kompleksitas regulasi baru dan keterbatasan kapasitas SDM.
12. BKPN seringkali rumit, tidak memiliki jaminan yang kuat atau lokasinya tidak diketahui (terutama eks BDL/BPPN).
13. Debitur sudah pindah dan alamat baru tidak diketahui.
14. Data piutang yang belum akurat dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.
15. Dana operasional KPKNL terbatas untuk turun kelapangan dan melakukan sita/lelang.

16. Sinergi yang belum optimal antara DJKN (PUPN) dengan Kementerian/Lembaga/Penyerah Piutang.

3. Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilai yang dimaksud adalah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Struktural di Bidang Penilaian yang merupakan Penilai Pemerintah yang telah diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan, dan/atau Penilai yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kapasitas SDM Penilai Instansi Pengguna yang kompeten adalah SDM Penilai di Lingkungan Non DJKN yang memenuhi kompetensi teknis dan diukur kualitas SDM Penilai tersebut yang dilakukan melalui kegiatan *quality assurance* yang diikuti setiap tahun melalui kegiatan verifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas Jafung Penilai Pemerintah dan Penilai Pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu arah kedepannya untuk pengimplementasian secara penuh Jafung Penilai Pemerintah dan menyiapkan kualitas Penilai di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan revaluasi BMD.

Sebagaimana amanat PemenPANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara; Roadmap DJKN (2014-2019) "*Distinguished Asset Manager*"; Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai *Asset Advisory* kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi Stakeholder dari "DJKN Mendengar" yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan asset pada masing-masing Instansi Pengguna.

Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
- 2) Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
- 3) Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
- 4) Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
- 5) Monitoring dan Evaluasi.

Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah Non DJKN dilakukan terpusat oleh DJKN dengan peserta verkom merupakan Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga lain.

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimtek dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;

- 2) Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN.

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan wajib disampaikan resmi secara berkala triwulanan ke Direktorat Penilaian.

Formula : (40% * Rata-rata Nilai Verkom Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna) + (60% * Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN)

***Apabila Pada Triwulan berjalan belum dilaksanakan uji verkom maka perhitungan menjadi :**

100 % * Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN :
Keberhasilan Bimtek / Terselenggaranya Bimtek : 80
Indeks Pengali Penyelenggaraan Bimtek:
a. FGD/Koordinasi : Indeks 1
b. Asistensi/PKL dalam Pelaksanaan Penilaian : Indeks 1.1
c. Review laporan penilaian dan laporan penaksiran Non DJKN : Indeks 1.2
Jika BIMTEK berhasil diselenggarakan (dengan standar 80), maka poin a, b, dan c dapat dijadikan pengali jika kegiatannya dilakukan
Tingkat Kelulusan:
Rata-rata Nilai Verkom Penilai Pemerintah Non DJKN

Capaian Direktur Jenderal KN/Direktorat Penilaian:

Rata-rata Nasional Capaian Kanwil DJKN

Pada Lingkungan Kanwil DJKN, terdapat 10 orang penilai pemerintah non yang telah melaksanakan verkom dengan hasilnya seluruh peserta mendapatkan nilai 75. Maka Perhitungan IKUnya adalah sebagai berikut:	
Rata-Rata Nilai Verkom = Jumlah Nilai Verkom pegawai Non DJKN	=750/10 = 75
jumlah pegawai yang mengikuti verkom	
Kanwil DJKN Jawa Barat melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Penilai Pemerintah, Penilai BMD, dan Calon Penilai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Bimbingan Teknis tersebut berupa FGD yang diikuti sebanyak 50 orang.	
Tingkat Keberhasilan = FGD = 80 x indeks 1 = 80	
(0.4 * Tingkat Kelulusan Verkom Penilai Pemerintah Instansi Pengguna di Lingkungan Kanwil DJKN) + (0.6 * Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN)	

(40% * 75) + (60% * 100)			
Realisasi =		78,00	111,43%
Tujuan : Memelihara kualitas penilai pemerintah			

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3c-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	-	70	-	-	80,40
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
	3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	Max/ TLK
Realisasi	88%	85%	85%	87%	87%	80,40%	80,40%	
Capaian	125,71%	121,43%	121,43%	124,29%	124,29%	114,86%	114,86%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	115%	115%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada satuan kerja dan satuan kerja Pemerintah Daerah agar mau mendorong Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) diunit kerjanya dapat dilibatkan dalam pelatihan penilaian.
2. Melakukan *Fokus Group Discussion* (FGD) dan bimbingan teknis penilaian.
3. Melaksanakan pendampingan penilaian dan kendali mutu Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
4. Mengarahkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) pada Instansi Pengguna untuk mengikuti Diklat Penilaian bekerjasama dengan BPPK.
5. Melakukan pendampingan pembelajaran penilaian bangunan yang akan dibongkar terhadap Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) yang berada di Kejaksaan Tinggi Lampung.
6. Melaksanakan bimtek/FGD penilaian secara berkala kepada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) di Instansi Pengguna.
7. Memberikan penugasan pelatihan penilaian property sederhana sekaligus melaksanakan simulasi *quality assurance*.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Tidak seluruh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) ditempat tugaskan pada bidang yang berkaitan dengan penilaian aset.
2. Terdapat efisiensi anggaran untuk pengajuan diklat penilaian.
3. Belum seluruh pimpinan Unit Kerja Instansi Pengguna memberikan kepercayaan kepada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) untuk melaksanakan tugas penilaian.
4. Belum seluruh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) telah melaksanakan tugas praktek penilaian.

Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penerapan tata kelola aset yang efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,92%	110%
2	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,09%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatkan BMN berupa tanah yang didukung dengan

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMk.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatkan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen

bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan diganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Capaian =	Σ output K1 + K2 + K3 + K4	x 100%
	Σ target sertifikasi	
Output		Penjelasan Output
K1 (SHP elektronik, update dan validasi di SIMAN)		KPKNL mendorong satker untuk Sertifikasi BMN K/L dan Kontraktor KKKS (SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang) dan Kontraktor PKP2B untuk Aset BMN PKP2B untuk pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas dan PKP2B untuk segera mengajukan pensertipikatan, selanjut SHP yang sudah terbit diupload oleh satuan kerja ke SIMAN serta data dan informasi diinput. Upload SHP dan inputan data dan informasi (a.l. luas, atas nama) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPKNL melalui menu valserah
K2 (dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan)		Kelengkapan dokumen pensertipikatan dimaksud, dibuktikan dengan: a. tanda terima penyerahan berkas ke kantah; b. surat kesepakatan satker/Kontraktor KKKS (BMN Hulu Migas)/SKK Migas/Kontraktor BMN PKP2B/KPKNL dengan kantah bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat disertipikatan; atau

	c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen yuridis telah lengkap sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)
K3 (upaya pengosongan/penguasaan secara fisik oleh KL/satker (mediasi, gugatan, atau laporan ke APH)	a. Mediasi dilakukan antara satuan kerja/KL, pihak ketiga yang menguasai, KPKNL, Kontraktor KKKS /SKK Migas/ Kontraktor BMN PKP2B, dan/atau melibatkan kantor desa dan/atau aparat setempat; b. Bukti gugatan/penanganan perkara secara optimal atau laporan ke APH; atau c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah telah clean and clear sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)
K4 (ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN)	Merupakan bidang tanah yg sudah bersertipikat a.n. Pemri c.q. KL namun belum di update di SIMAN atau bidang tanah yang masih Bersertikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) yg dilakukan ganti nama, update, dan validasi di SIMAN
Bukti Dukung K1 s.d K4 wajib diupdate/diupload pada https://linktr.ee/sertipikasi2025	
Tujuan :	
Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.	

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertipikasi BMN ini merupakan langkah untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Kegiatan sertipikasi ini merupakan tanggung jawab dari DJKN, K/L, dan Kementerian ATR/BPN. DJKN berperan selaku pengelola barang dan

penghubung antara K/L dengan Kementerian ATR/BPN, K/L berperan sebagai pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN berperan sebagai pelaksana kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan.

Adapun perhitungan IKU perserntase Barang Milik negara berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebagai berikut:

$$K1 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg disertipikatkan kategori K1} \times 100\%}{\sum \text{target kategori K1}}$$

$$K2 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg terbit PBT kategori K2} \times 100\%}{\sum \text{target kategori K2}}$$

$$K3 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg dilakukan pemblokiran/input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku kategori K3} \times 100\%}{\sum \text{target kategori K3}}$$

$$K4 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg di update \& validasi} \times 100\%}{\sum \text{target kategori K4}}$$

$$\text{Formula Total Capaian} : \frac{\sum \text{bidang tanah capaian K1+K2} + K3 + K4 \times 100\%}{\sum \text{target bidang tanah K1+K2} + K3 + K4}$$

Keterangan:

K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP)

K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)

K3 : Output berupa Pemblokiran/Input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku/Produk Lainnya

K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur

Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	655	-	655	-	-	720
2024	1.477	-	1.477	-	-	1.637

2023	1.196	-	1.196	-	-	1.736
2022	955	-	955	-	-	1.409
2021	1.787	-	1.787	-	-	2.068

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Min/ TLK
Realisasi	6,56%	30,23%	30,23%	71,45%	71,45%	109,92%	109,92%	
Capaian	131,30%	75,57%	75,57%	119,08%	119,08%	109,92%	109,92%	
Nilai Kinerja	120%	76%	76%	119%	119%	110%	110%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan menyeluruh untuk mengetahui tanah Barang Milik Negara yang belum bersertipikat.
2. Menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen kepemilikan tanah Barang Milik Negara secara tertib dan aman.
3. Memasang plang yang mencantumkan kepemilikan negara pada tanah milik Barang Milik Negara.
4. Membangun pagar di area tanah Barang Milik Negara yang kosong atau belum dimanfaatkan.

5. Mengurus penerbitan sertifikat tanah atas nama pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda).
6. Mengadakan rapat, seperti rapat DKO (Daftar Komponen Output) untuk mengevaluasi dan mempercepat target sertipikasi Barang Milik Negara.
7. Mengubah peran dari sekadar penatausahaan aset menjadi manager aset yang lebih optimal dan akuntabel.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Dokumen sumber kepemilikan seringkali tidak ada atau tidak lengkap, menyulitkan proses pembuktian.
2. Tanah sering sudah dikuasai atau bahkan disertipikatkan oleh pihak ketiga, menimbulkan sengketa hukum yang rumit.
3. Banyak tanah Barang Milik Negara masuk dalam kawasan hutan, memerlukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelepasan kawasan.
4. Tidak adanya pagar, plang atau tanda kepemilikan yang jelas membuat tanah rentan dikuasai secara *illegal*.
5. Sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian ATR/BPN, Satuan Kerja Pengguna Barang dan Pemerintah Daerah belum maksimal.
6. Tidak semua tanah sejak awal tercatat dengan baik, sehingga banyak yang tidak jelas statusnya.
7. Standar dan prosedur yang ketat serta beragam masalah di lapangan (seperti tumpang tindih) memperlambat proses.
8. Tanah yang tidak dimanfaatkan menjadi lahan kosong, memicu para pihak yang tidak mempunyai kepentingan ingin menguasai dan menganggap tanah tersebut tidak bertuan.
9. Adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian atau lembaga seringkali menjadi hambatan.

2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja

BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance *measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Formula:		
Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/ Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/ Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	NUP
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		
Tujuan:		

Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4b-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100 %	-	100 %	-	-	120,09 %
2024	100 %	-	100 %	-	-	150,38 %
2023	100 %	-	100 %	-	-	126,00
2022	100 %	-	100 %	-	-	110,17 %
2021	100 %	-	100 %	-	-	101,57 %

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P

Target	15 %	50 %	50 %	75 %	75 %	100 %	100 %	Min/ TLK
Realisasi	16,50%	56,44%	56,44%	83,73%	83,73%	120,09%	120,09%	
Capaian	110,01%	112,88%	112,88%	111,64%	111,64%	120,09%	120,09%	
Nilai Kinerja	110%	113%	113%	112%	112%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dimensi kinerja strategis Barang Milik Negara (akuntabilitas, produktivitas, efisiensi).
2. Mengidentifikasi indikator spesifik yang dapat diukur, seperti tingkat pemanfaatan, kondisi aset atau kepatuhan penggunaan.
3. Mengukur kinerja aset berdasarkan indikator yang ditetapkan dan membuat laporan evaluasi yang komprehensif sebagai penilaian menyeluruh dan terpadu kinerja aset.
4. Membantu mengantisipasi masalah dan mengidentifikasi kebutuhan aset baru dan menyampaikan rekomendasi untuk reformasi dan perbaikan kinerja aset.
5. Menyelaraskan dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian Keuangan.
6. Menerapkan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif dan efisien dan memastikan sistem informasi yang andal untuk mendukung proses pengelolaan dan evaluasi.
7. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian IKU dan menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya evaluasi kinerja Barang Milik Negara.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pengelolaan BMN dan kurangnya pemahaman pegawai di satuan kerja terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan BMN.
2. Proses administrasi yang rumit, terutama penghapusan BMN rusak berat, menyebabkan penumpukan aset. Penatausahaan BMN yang tidak tertib (pencatatan, inventarisasi, pelaporan) dan kendala dalam penindaklanjutan rekomendasi dari BPK terkait BMN.

3. Koordinasi yang kurang efektif antara unit pelaksana pengelolaan BMN dengan satuan kerja pengguna dan kurangnya keterbukaan antar *stakeholder* terkait kendala pengelolaan aset.
4. BMN rusak berat ter bengkalai dan menimbulkan masalah baru (hilang, diserobot) dan BMN idle (tidak terpakai) namun tidak segera dioptimalkan.
5. Belum adanya metode pengukuran kinerja aset tunggal yang terintegrasi untuk menilai kinerja BMN secara komprehensif.

Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang bertujuan untuk mendukung kebijakan keuangan negara dengan memastikan prosesnya berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengurusan piutang, upaya dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang optimal guna menjaga keseimbangan fiskal. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Pelaksanaan pelayanan piutang dan lelang yang efektif mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan piutang negara dan lelang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam sasaran strategis ini, DJKN berkomitmen dalam mewujudkan:

- a) pengurusan piutang negara melalui percepatan penyelesaian BKPN, restrukturisasi, serta proses hukum lainnya dalam mencapai saldo berkas kasus piutang negara yang minimal;
- b) efektivitas pelaksanaan layanan lelang dalam mendapatkan nilai yang optimal yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	130,53%	120%
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	103,95%	120%
3.	Persentase Produktifitas lelang	80%	98,51%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang Prp 49 Tahun 1960 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)

- a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
- b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
- c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)

- a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
- b) Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
- c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)

- a) Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
- b) Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO); yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKN.

Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Formula :
(Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 x 1,2 + Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 x 1,1 + Realisasi BKPN Diselesaikan Komponen 3 x 1)/Target Penyelesaian Berkas Piutang Negara x 100%
Tujuan:
Percepatan penyelesaian piutang Negara yang diurus oleh PUPN dan piutang Negara yang dikelola oleh K/L/Pemda/badan/lembaga khusus/badan hukum publik

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan

standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100 %	-	100 %	-	-	130,53 %
2024	77 %	-	77 %	-	-	60,40 %
2023	100 %	-	100 %	-	-	103,85 %
2022	100 %	-	100 %	-	-	124,07 %
2021	100 %	-	100 %	-	-	103,17 %

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Max/ TLK
Realisasi	118,78%	98,30%	98,30%	99,09%	99,09%	130,53%	130,53%	
Capaian	118,78%	98,30%	98,30%	99,09%	99,09%	130,53%	130,53%	

Nilai Kinerja	118,78%	98,30%	98,30%	99,09%	99,09%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan kegiatan penggalan potensi dan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan pengurusan/penyelesaian piutang bersama Kejaksaan Tinggi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPD LH Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Melakukan monitoring secara berkala ke KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu terkait pengurusan piutang negara.
3. Melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi telah dilakukan peninjauan mengenai dilakukannya upaya penagihan bersama-sama dengan pihak penyerah piutang.
4. Melakukan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang yang tidak kooperatif.
5. Mendorong KPKNL untuk melaksanakan intensifikasi pengurusan piutang negara.
6. KPKNL dan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dapat melaksanakan penagihan/pengurusan piutang bersama.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran (terutama biaya perjalanan dinas).
2. Terdapat piutang dengan barang jaminan yang dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penyerah piutang maupun KPKNL, sehingga tindak lanjut pengurusan piutang negara tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. Terdapat barang jaminan yang lokasinya belum ditemukan.
4. Adanya penyerah piutang yang berasal dari instansi Pemerintah Daerah yang tidak kooperatif.

2. Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan

berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal .

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

Target 2025: 80%

Contoh 1 :

Pada KPKNL A terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 80 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $80/100 = 80\%$. Capaian komponen adalah $80\%/80\% = 100\%$.

Contoh 2 :

Pada KPKNL B terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 70 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $70/100 = 70\%$. Capaian komponen adalah $70\%/80\% = 87,5\%$.

Realisasi dihitung dengan konsolidasi periode TLK sehingga untuk menghitung Realisasi Q2, hasil kajul dari bulan Desember s.d. Mei diperhitungkan.

***Apabila penyelesaian penilaian menggunakan mekanisme bantuan tenaga penilai, maka capaian diakui oleh unit yang diminta untuk bantuan tenaga penilai.**

Formulasi : (40% x Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian) + (30% x Akurasi Data Layanan Penilaian) + (30% x Nilai Hasil Kaji Ulang)

Perhitungan Norma Waktu Layanan Penilaian = Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian * 1 % (1 % = konversi dari indeks ke persen)

Batas waktu penyelesaian	Indeks
1 hari s.d. 30% N	100
N - 60% N	95
N - 45% N	90
N - 30% N	85
N - 15% N	80
<N	75
N	70
N + 15% N	60
N + 30% N	50
N + 45% N	40
N + (>45% N)	30

Perhitungan Akurasi Data Layanan Penilaian = (Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP **dibagi** Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu atau SIMAN).

Perhitungan Persentase Hasil Kaji Ulang = (Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 **dibagi** Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang) : 80 %

Tujuan IKU adalah meningkatkan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5b-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70 %	-	70 %	-	-	103,95 %
2024	70 %	-	70 %	-	-	101,12 %
2023	70 %	-	70 %	-	-	89,95 %
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P

Target	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	Min/ TLK
Realisasi	100,57%	106,78%	106,78%	103,56%	103,56%	103,95%	103,95%	
Capaian	143,68%	152,54%	152,54%	147,94%	147,94%	148,50%	148,50%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan eksekusi penilaian perbantuan dari Kantor Pusat/KPKNL sesegera mungkin.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak yang meminta perbantuan penilaian agar berkas permohonan penilaian yang dimintakan perbantuan ke Kanwil sudah betul-betul lolos verifikasi.
3. Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap tahapan penilaian.
4. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan identifikasi area perbaikan.
5. Mendorong dan memfasilitasi sertifikasi profesi penilai untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kendali IKU Tingkat Kualitas Penilaian yang berasal dari permohonan perbantuan penilaian dari KPKNL/Kantor Pusat tidak sepenuhnya berada pada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP).
2. Penilaian BMN perbantuan yang berasal dari Kantor Pusat maupun dari KPKNL menjadi capaian kantor yang melaksanakan perbantuan (Kanwil), sementara untuk kendali norma waktu dan akurasi data SIP lebih berada pada Kantor yang meminta perbantuan, hal ini mengakibatkan capaian IKU kurang fair.
3. Beban kerja berlebih tanpa dukungan sistem memadai menyebabkan kesalahan.
4. Data tersebar di sistem berbeda, memperlambat akses informasi dan ketergantungan pada metode manual di era digital.
5. Pengguna layanan tidak mendapatkan informasi memadai tentang proses penilaian.

3. Persentase produktifitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Formula

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Catatan :

1) % Lot Laku Lelang per jenis lelang = $\frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$

2) Target Persentase Lot Laku Lelang Per Jenis Lelang :

1. Lelang noneksekusi sukarela : 75%
2. Lelang noneksekusi wajib : 55%
3. Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan : 5%
4. Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan : 25%

3) Capaian maksimal pada masing-masing pembobotan adalah 120%

4) Target frekuensi lelang untuk unit (Kanwil dan KPKNL) merupakan capaian tahun sebelumnya

5) Target frekuensi lelang untuk Jafung = capaian unit sebelumnya / jumlah jafung di unit tsb (yang sudah ditetapkan diawal tahun)

6) Penghitungan pada target frekuensi lelang, Pembagian target untuk JF Pelelang agar memperhatikan target bulanan

Tujuan IKU agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. IKU produktivitas lelang mengukur jumlah presentasi lot laku lelang per jenis barang dibandingkan dengan jumlah jenis lelang yang dilaksanakan dengan bobot 40% ditambahkan dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dibandingkan dengan target frekuensi lelang dengan bobot 60%, capaian maksimal IKU ini sebesar 105%.

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis Lelang, dengan formula sebagai berikut:

Catatan :

1) % Lot Laku Lelang per jenis lelang =
$$\frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$$

2) Target Persentase Lot Laku Lelang Per Jenis Lelang :

1. Lelang noneksekusi sukarela : 75%
2. Lelang noneksekusi wajib : 55%
3. Lelang eksekusi HT : 5%
4. Lelang eksekusi selain HT : 25%

3) Capaian maksimal pada masing-masing pembobotan adalah 120%

4) Target frekuensi lelang untuk unit (Kanwil dan KPKNL) merupakan capaian tahun sebelumnya

5) Target frekuensi lelang untuk Jafung = capaian unit sebelumnya / jumlah jafung di unit tsb (yang sudah ditetapkan diawal tahun)

6) Penghitungan pada target frekuensi lelang. Pembagian target untuk JF Pelelang agar memperhatikan target bulanan

Target Persentase Lot Laku Lelang Per jenis Lelang adalah sebagai berikut:

- a. Lelang Noneksekusi sukarela 75%
- b. Lelang Noneksekusi wajib 55%
- c. Lelang Eksekusi HT 5%; dan
- d. Lelang eksekusi selain HT 25 %

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Produktifitas Lelang.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5c-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80 %	-	80 %	-	-	98,51 %

2024	89 %	-	89 %	-	-	134,83 %
2023	80 %	-	80 %	-	-	105,00 %
2022	36 %	-	36 %	-	-	46,86 %
2021	35 %	-	35 %	-	-	40,73 %

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktifitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	30 %	40 %	40 %	70 %	70 %	80 %	80 %	Min/ TLK
Realisasi	55,04%	64,27%	64,27%	91,11%	91,11%	98,51%	98,51%	
Capaian	183,47%	160,68%	160,68%	130,16%	130,16%	123,14%	123,14%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Rutin melaporkan monev Implementasi V2 kepada Direkrorat Transformasi dan Sistem Informasi dan Direktorat Lelang, melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II, melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Balai

- Lelang JBA, melakukan pembinaan dan pemeriksaan minuta ke KPKNL Bandar Lampung dan pemeriksaan dan pembinaan Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Metro.
2. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II Sdr. Reza Berawi dan Sdr. Srimulyono Herlambang.
 3. Mengadakan rapat koordinasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Kota Batam.
 4. Pembinaan dan Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Bengkulu, Pembinaan dan Pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II Provisni Bengkulu, bersama KPKNL Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dengan satuan kerja terkait Lelang.go.id versi 2.
 5. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan rutin ke Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro guna memberikan apresiasi serta arahan Kepala Bidang kepada KPKNL terkait peningkatan transaksi lelang.
 6. Pembinaan dan pemeriksaan ke Pejabat Lelang Kelas II lingkup Provinsi Lampung guna diskusi terkait kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi penyelesaian.
 7. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan/atau perwakilan Kantor Wilayah perbankan agar makin memperluas jaringan pemasaran objek yang akan dilelang sekaligus selektif dalam mengajukan objek yang akan dilelang (prioritas objek lelang yang marketable).
 8. Mendorong KPKNL untuk memprioritaskan pelaksanaan lelang yang 'berpeluang laku' seperti lelang noneksekusi wajib BMN/D, lelang noneksekusi sukarela dan lelang HT yang ada peminat
 9. Untuk meningkatkan capaian IKU di tahun 2025, kegiatan koordinasi dengan *stakeholder* dan pembinaan di bidang lelang yang telah dilakukan pada periode sebelumnya akan terus dilanjutkan.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Implementasi Aplikasi Lelang.go.id Generasi 2 yang masih banyak kendala (jumlah permohonan lelang yang dikembalikan oleh KPKNL karena terdapat permohonan yang masih menggunakan Lelang V1.
2. Adanya perubahan kebijakan oleh Penyerah Piutang PT. Pegadaian atas penanganan kredit macet.
3. Obyek lelang yang masih dalam sengketa hukum, memiliki isu kepemilikan atau kondisi fisik kurang menarik cenderung sulit terjual.

4. Penetapan nilai limit oleh Penjual yang terlalu tinggi atau tidak realistis akan menurunkan minat pembeli.
5. Kurangnya minat pembeli akibat kualitas objek, informasi yang kurang atau proses yang tidak menarik.

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%

2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80 %	100%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Anggaran dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Kinerja perencanaan anggaran terdiri dari efektivitas capaian RO, penggunaan SBK, dan efisiensi SBK, sementara nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian *Output*.

Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Keluaran (SBK) terbaru tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Formula

Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut :

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 *$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 **$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 **$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

Tujuan IKU :

Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran

Berikut ini rincian dari capaian dari komponen nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran:

KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KEMENTERIAN KEUANGAN Role Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	015.09.506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KEMENTERIAN KELANGAN Role: PihTA (2025) Logout

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN **MAJIS**

Desember Tampilkan

[Download PDF](#) [Download Excel](#)

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode-Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPH (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
I.	Desember	017	015	506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	Nilai	100,00	92,91	100,00	0,00	0,00	99,20	100,00	78,86	80%	0,00	98,57
						Bobot	16	15	20	0	0	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	11,94	20,00	0,00	0,00	9,92	15,00				
						Nilai Aspek	96,44		99,60			100,00					

Sehingga capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

☰ KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KEMENTERIAN KEUANGAN Role Pilih TA (2025) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	015.09.506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	100,00	98,57	99,29

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) **1** [Selanjutnya](#)

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini mengacu pada Pasal 249 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	120
2024	100	-	100	-	-	120
2023	100	-	100	-	-	120
2022	95,5	-	95,5	-	-	96,10
2021	95,5	-	95,5	-	-	96,10

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi anggaran *self blocking* sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum dan Bidang-bidang Teknis mengenai rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
3. Melakukan identifikasi dan administrasi mengenai penambahan/*top up* anggaran pada RO Layanan Perkantoran sebesar Rp40.760.000,-
4. Melakukan revisi dengan kewenangan DJA terhadap pembukaan blokir serta penambahan belanja modal (*top up* belanja modal).
5. Melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran.
6. Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang terkait update sisa anggaran, rencana kegiatan dan rencana penyerapan dana pada setiap bulannya.
7. Memberikan fokus maksimal pada pencapaian *output* dan pemuktahiran Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan pagu setelah blokir.
8. Segera melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan belanja modal sesuai pembukaan blokir dan *top up*.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Melakukan penyesuaian *self blocking* anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
2. Belanja modal baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV (Q4 Tahun 2025) dikarenakan terdapat pembukaan blokir dan *top-up* anggaran.
3. Pelaksanaan optimalisasi belanja modal tidak diperkenankan berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Akhir Tahun Anggaran 2025.

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

- A. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- B. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, *E-Tendering*, *E-Purchasing* Katalog, Non *E-Tendering* dan Non *E-Purchasing*, dan E-Kontrak.

Formula						
Realisasi IKU = $\frac{(\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B}) \times 100\%}{2}$						
A. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri						
Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.						
1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)						
Formula : $\frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$						
Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%						
Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%						
Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV						
2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)						
Formula : $\frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$						
Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%						
Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%						
Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV						
	Persentase Komitmen P3DN	Indeks		Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap	Indeks	
Triwulan I	>30%	120		Triwulan III	>30%	120
	30%	100			30%	100
	<30%	80			<30%	80
Triwulan II s.d. IV	>70%	120		Triwulan IV	>70%	120
	70%	100			70%	100
	<70%	80			<70%	80

B. Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100) target 80

Pembobotan:

SIRUP : 60%

E-Tendering : 10%

E-Purchasing Katalog : 10%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10%

E-Kontrak : 10%

Realisasi:

capaian > 85% = realisasi indeks 120

capaian 80%-85% = realisasi indeks 100

capaian 50% - 79% = capaian sesuai dengan realisasi

capaian < 50% = realisasi indeks 0

Target Q1 = 60 (Self Assessment)

Target Q2 = 70 (Self Assessment)

Target Q3 = 80 (Self Assessment)

Target Q4 = 92 (Perhitungan ITKP dari LKPP)

Keterangan:

'- Self assessment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)

- dalam hal satker tidak memiliki salah satu target komponen perhitungan ITKP, maka diperkenankan untuk dilakukan redistribusi target kepada komponen lainnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-N

TAHUN	TARGET					REALISA
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	120
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Catatan: IKU ini adalah IKU baru sehingga tidak terdapat data pembandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	60	100	100	70	70	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	200%	120%	120%	171,43%	171,43%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Memastikan jumlah dan komposisi Sumber Daya Manusia memadai untuk beban kerja pengadaan barang/jasa.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan katalog elektronik (*e-katalog*) untuk mempercepat proses meningkatkan transparansi dan mengedepankan produk dalam negeri (PDN).
3. Melakukan riset dan analisis pasar untuk menyusun strategi pengadaan yang lebih baik dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, Terukur, Dapat

Dicapai, Relevan dan berbasis waktu (SMART) serta berorientasi pada Efisiensi, Efektivitas dan Akuntabilitas.

4. Inventarisasi dan Analisis kebutuhan dengan melakukan identifikasi kebutuhan yang cermat dan terstruktur dan Penerapan strategi dengan menentukan jenis, cara, paket dan anggaran pengadaan secara tepat.
5. Mengukur kualitas kebijakan pengadaan melalui Indeks Kualitas Kebijakan sebagai dasar perbaikan keberlanjutan.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kapasitas pengelola pengadaan (PPK, Pokja) yang belum memadai, kurang pelatihan berkelanjutan, dan menganggap tugas sebagai rutinitas.
2. Perencanaan yang tidak terintegrasi dilakukan di tahun berjalan dan tidak berdasarkan kebutuhan riil dan kualitas spesifikasi teknis (KAK) dan harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak tepat atau sering direvisi.
3. Anggaran yang tidak memadai atau berpotensi kekurangan/kelebihan serta masalah harga satuan daerah vs pasar.
4. Kendala teknis dan pemahaman penggunaan aplikasi pengadaan dan evaluasi kinerja penyedia yang tidak optimal atau tidak dilakukan.

3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

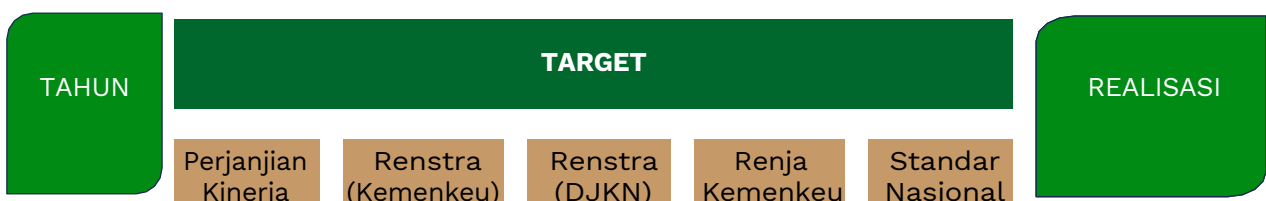
AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembanding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut.
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut).
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret.
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni.
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September.
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Formulasi:
<p>Capaian IKU = (Komponen I x 80%) + (Komponen II x 20%)</p> <p>Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai = Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif</p> <p>Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan = Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil</p>
<p>Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pegawai yang akan pensiun di tahun 2025; - pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon <p>Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan yang sifatnya mandatory
Tujuan:
<p>Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan</p>

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6c-N



2025	80 %	-	80 %	-	-	100 %
2024	100 %	-	100 %	-	-	120 %
2023	100 %	-	100 %	-	-	120 %
2022	100 %	-	100 %	-	-	120 %
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	20 %	40 %	40 %	60 %	60 %	80 %	80 %	Max/ TLK
Realisasi	36,67%	63,33%	63,33%	84,68%	84,68%	100%	100%	
Capaian	183,33%	158,33%	158,33%	141,13%	141,13%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diikuti dalam rangka memenuhi 30 Jam Pelatihan.
2. Mengusulkan diklat sebelum tanggal 20 setiap bulannya melalui Aplikasi Diklat DJKN.

3. Menawarkan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan setiap bulannya melalui Nota Dinas yang disampaikan ke Bidang-bidang.
4. Mengingatkan pegawai untuk mengisi form monitoring pelaporan pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melakukan rekapitulasi terhadap 10 pegawai dengan JP terbanyak dan memberikan apresiasi melalui nota dinas.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Tidak ada panggilan diklat dari Kantor Pusat padahal pegawai telah diusulkan.
2. Minimal Jam Pelatihan telah terpenuhi tetapi pegawai belum mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Pembelajaran menggunakan metode Pelatihan Jarak Jauh menurunkan semangat pegawai dalam mengikuti pelatihan.
4. Pegawai tidak/terlambat melaporkan bukti penyelesaian pelatihan ke UIC.

Sasaran strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK. Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,01	120%
2.	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,85	113,85%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks efektifitas ekosistem kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Agenda Setting;
2. Indeks Efektivitas Employee Advocacy;

Unsur 1 - Agenda Setting

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (Kanwil) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.

▪ Item penilaian terdiri dari:

A. Penilaian Kanver (Kanwil) UE 1:

1. Implementasi taktik (50%)

- Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

2. Jumlah postingan medsos (50%)

- Tidak ada postingan nilai 0.
- 1 < baseline, nilai 90.
- >= baseline, nilai 100.

***Baseline jumlah postingan medsos kanver (Kanwil):**

No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan
1	DJKN (17 Kanwil)	68 (+- 4 post/Kanwil)

Dengan rincian tiap kantor wilayah sebagai berikut:

No	Unit	Baseline Jumlah Postingan
1	Kanwil DJKN Aceh	4 post
2	Kanwil DJKN Sumatera Utara	4 post
3	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	4 post
4	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	4 post
5	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	4 post
6	Kanwil DJKN Banten	4 post
7	Kanwil DJKN DKI Jakarta	4 post
8	Kanwil DJKN Jawa Barat	4 post
9	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	4 post
10	Kanwil DJKN Jawa Timur	4 post
11	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	4 post
12	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	4 post
13	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	4 post
14	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	4 post
15	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	4 post
16	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4 post
17	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	4 post

$$\text{Formula Kanver (Kanwil)} = \Sigma \text{capaian implementasi taktik} + \text{jumlah postingan medsos}$$

Unsur 2 - Indeks Efektivitas *Employee Advocacy*

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. *Cascading* dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi.

Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee Advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver).

Item penilaian terdiri dari:	
A. ACTIVITIES (100%):	
1.	Topik amplifikasi Sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan.
2.	Baseline target pegawai: 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon 1
3.	Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi: - Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100. - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95. - Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93. - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90. - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80.
Formula activities = Σ nilai realisasi unit	

B. Outcome (20%)			
Penilaian:			
Survei Pegawai		Survei Publik	
Capaian $\geq 10\%$	Nilai 100	Capaian $\geq 3\%$	Nilai 100
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80
Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50
Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40
		Capaian 0%	Nilai 0

Outcome = 50% capaian survei pegawai + 50% capaian survei publik	
---	--

Formula :

(Agenda Setting x 50%) + (Indeks Efektivitas Employee Advocacy x 50%)

- konversi skala 1-4 (agar ditulis hingga 4 angka di belakang koma).
- Indeks 3,75 merupakan batas maksimal 120%.
- Berlaku indeks normal apabila capaian <=3,55, maka realisasi dituliskan sesuai capaian.
- Berlaku indeks konversi apabila capaian >3,55, dengan formula sebagai berikut:

Formula Indeks Konversi

$$=(100%+(((\text{Capaian}-3,55)/0.2*100%)*20%))*3.55$$

Contoh:

- Capaian unit = 3.7300
- Maka pada realisasi IKU Unit, dituliskan konversinya menjadi = 4.1890 (atau setara 118%)

Tujuan IKU Mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3,55	-	3,55	-	-	6,01
2024	3,55	-	3,55	-	-	4,69

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	Max/ Average
Realisasi	6,73	6,73	6,73	5,23	5,23	6,01	6,01	
Capaian	189,58%	189,58%	189,58%	147,32%	147,32%	169,23%	169,23%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I								

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Komunikasi Publik dengan melakukan penyusunan strategi komunikasi yang terintegrasi, peningkatan kualitas konten (narasi yang jelas, visual menarik, data akurat) dan penyampaian informasi yang proaktif dan responsive terhadap isu.
2. Pengembangan sistem informasi kehumasan yang andal dan penggunaan analisis data untuk memahami audiens.
3. Peningkatan kompetensi dalam analisis media dan manajemen reputasi dan pelatihan digital *communication* dan *crisis communication* bagi tim kehumasan.

4. Peningkatan kecepatan dalam merespons pertanyaan dan aduan public dan penerapan tata kelola kehumasan yang transparan dan akuntabel.
5. Penggunaan data survei untuk perbaikan berkelanjutan dan survei Indeks Kepuasan Pelayanan dan Indeks Efektifitas Kehumasan secara berkala.
6. Memperbanyak postingan amplifikasi topik Agenda Setting Kemenkeu dan melakukan repost/reshare konten yang di amplifikasi oleh Kemenkeu dan Unit Eselon I yang lain terkait topik Agenda Setting Kemenkeu.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas anggota Pokja Pemangku Tugas Komunikasi dan menyampaikan hasil monitoring melalui jalur formal (nota dinas) maupun jalur informasl (WAG).

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan stakeholder (pemerintah, publik) dan pengguna jasa (misalnya pemohon lelang, pengelola BMN) dengan apa yang dipahami dan dicapai oleh DJKN sehingga menuntut DJKN untuk lebih responsif.
2. Proses internal yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelayanan kehumasan dan keterbatasan sumber daya internal termasuk SDM dan teknologi untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Tugas DJKN yang beragam (pengelolaan BMN, Lelang, Penilaian Investasi) sulit disederhanakan menjadi narasi yang mudah dipahami publik, sehingga menantang dalam membangun citra positif dan edukasi.
4. Belum optimalnya penguatan ekosistem TIK dan budaya kerja kolaboratif di internal DJKN dan dengan unit Kemenkeu lain yang menghambat penyampaian informasi dan pelayanan yang terintegrasi.
5. Bagaimana mengelola persepsi publik dan stakeholder sambil meningkatkan efisiensi internal untuk mencapai mandatnya secara lebih baik.

2. Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen : 80%

Target komponen : 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan.
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025.
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen : 20%

Target komponen : 90

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

Formula :

Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100

Ket: *Nilai Indeks Komponen A = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A*

Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100

Ket: *Nilai Indeks Komponen B = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen B / Σ perkara komponen B*

Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi adalah sebagai berikut:

Kondisi 1: Apabila terdapat nilai pada kedua komponen

Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)

Kondisi 2: Apabila hanya terdapat nilai komponen A

Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 100%)

Kondisi 3: Apabila hanya terdapat nilai komponen B

Realisasi IKU = (Realisasi Komponen B * 100%)

Nilai indeks per komponen sebagai berikut:

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Tahapan Perkara	Peradilan	Indeks
Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) beserta Resume Perkara	Peradilan Umum/Peradilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Khusus/Komisi Informasi/Arbitrase (Menyesuaikan)	80
Menerima Surat Kuasa Khusus (SKU) dari Pemberi Kuasa dan Menyampaikan kepada Pengadilan		90
Mediasi		95
Penyampaian Jawaban		95
Replik/Duplik		95
Pemeriksaan Alat Bukti		95

Pemeriksaan Saksi/Ahli		95
Pemeriksaan Setempat		95
Kesimpulan		95
Mengajukan Perlawanan/Gugatan		100
Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan mengajukan Kontra Memori Banding/Keberatan		100
Menyusun dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi		100
Menyusun dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali		100

--	--	--

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Klasifikasi Putusan	Indeks
Putusan <i>Inkracht</i> Menang	120
Penetapan Damai	110
Penetapan Cabut	100
Penetapan Gugur	90
Putusan Kalah <i>Inkracht Non-executable</i>	80
Putusan Kalah <i>Inkracht</i> diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)	70
Putusan <i>Inkracht</i> Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi	60

--	--	--

Contoh Perhitungan IKU

--	--	--

Kondisi 1

Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan

Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 3 perkara aktif, 2 perkara merupakan perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024 dan 215/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024, dan 1 perkara lainnya merupakan perkara baru pada tahun 2025 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Skt dengan tahapan yang

dilalui masing-masing perkara sebagai berikut:

1. Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt

- a. Tahap Putusan Tingkat Pertama Menang tanggal 4 Januari 2025
- b. Tahap penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2025

(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 100 yaitu indeks untuk Kontra Memori Banding/tahap terakhir)

2. Perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt

- a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025
- b. Tahap Mediasi tanggal 14 Februari 2025
- c. Tahap Jawaban tanggal 14 Maret 2025
- d. Tahap duplik tanggal 28 Maret 2025

(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 95 yaitu indeks untuk Duplik/tahap terakhir)

3. Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PN.Skt

- a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024
- b. Penetapan Cabut pada tanggal 28 Februari 2025

(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen B sebesar 100)

Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Realisasi Komponen A:			
- Nilai indeks perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt		100	
- Nilai indeks perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt		95	
<i>Nilai Indeks Komponen A</i>			
<i>Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A</i>			
	$(100+95) / 2$		97,5
Realisasi Komponen A			
<i>(Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100</i>			
	$97.5 / 85 \times 100$		114,71

2.Realisasi Komponen B:			
<i>Nilai Indeks Komponen B</i>			100
Realisasi Komponen B			
<i>(Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100</i>			
	$(100/90) \times 100$		111,11
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi			
<i>(Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)</i>			
<i>(114.71 x 80%) + (111.11 x 20%)</i>			113,99
Kondisi 2			
<p>Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 2 perkara aktif, 1 perkara merupakan perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024 dan 1 perkara lainnya merupakan perkara baru pada tahun 2025 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Skt dengan tahapan yang dilalui masing-masing perkara sebagai berikut:</p>			
1. Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt			
a. Tahap Putusan Tingkat Pertama Menang tanggal 4 Januari 2025			
b. Tahap penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2025			
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 100)			
2. Perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt			
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025			
b. Tahap Mediasi tanggal 14 Februari 2025			
c. Tahap Jawaban tanggal 14 Maret 2025			
d. Tahap duplik tanggal 28 Maret 2025			
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 95)			

<u>Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:</u>				-
1. Nilai indeks perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt			100	
2. Nilai indeks perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt			95	
Nilai Indeks Komponen A				
Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A				
		$(100+95) / 2$		97,5
Realisasi Komponen A				
$(\text{Nilai Indeks Komponen A} / \text{Target Komponen A}) * 100$				
		$97.5 / 85 \times 100$		114,71
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi				
$(\text{Realisasi Komponen A} * 100\%)$				
$(114.71 \times 100\%)$				114,71
Kondisi 3				
Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan				
Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 1 perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 215/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024, dengan tahapan yang dilalui perkara tersebut sebagai berikut:				
Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PN.Skt				
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024				
b. Penetapan Cabut pada tanggal 28 Februari 2025				
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen B sebesar 100)				
<u>Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:</u>				-
Nilai Indeks Komponen B				100

Realisasi Komponen B			
<i>(Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100</i>			
	<i>(100/90) x 100</i>		111,11
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi			
<i>(Realisasi Komponen B * 100%)</i>			
	<i>(111.11 x 100%)</i>		111,11
Tujuan :			
Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.			

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7b-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	113,85
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

*IKU ini adalah IKU baru, sehingga tidak terdapat data pembandingan pada tahun-tahun sebelumnya

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif							
	7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ Average
Realisasi	112,64	112,57	112,57	111,15	111,15	113,85	113,85	
Capaian	112,64%	112,57%	112,57%	111,15%	111,15%	113,85%	113,85%	
Nilai Kinerja	112,64%	112,57%	112,57%	111,15%	111,15%	113,85%	113,85%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring penanganan perkara perdata pada KPKNL lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu (KPKNL Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro).
2. Membantu penanganan perkara lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu (KPKNL Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro) untuk melakukan pendampingan perkara yang dihadapinya.

3. Melakukan kajian hukum dan merepons dengan cepat terkait adanya permasalahan hukum pada KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu terutama gugatan yang ditujukan kepada KPKNL terkait pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
4. Melakukan monitoring perkara-perkara yang ditangani oleh KPKNL dengan menggunakan Aplikasi Sibankum (Sistem Informasi Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Aplikasi tersebut digunakan untuk mengelola dan memantau perkembangan perkara hukum yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Aplikasi ini menjadi alat bantu bagi pegawai DJKN untuk memonitor proses hukum mulai dari analisis perkara hingga persidangan.
5. Melakukan pembinaan Advokasi Hukum pada KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu terkait banyaknya permasalahan hukum dan gugatan yang ditujukan kepada masing-masing KPKNL.
6. Membantu KPKNL lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKU) yang diterbitkan oleh Kepala kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk berperkara terkait gugatan yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi (TGR), berkaitan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang yang diajukan terhadapnya.
7. Melaksanakan bimbingan teknis kepada KPKNL lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada di bidang hukum.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Banyaknya gugatan yang dilayangkan kepada KPKNL lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu khususnya gugatan atas pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Gugatan yang dilayangkan sebagian besar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Perlawanan Lelang dan Pembatalan Lelang.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia petugas penanganan perkara yang ada pada KPKNL cq. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk melakukan penanganan perkara pada lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama).
3. Banyaknya gugatan yang dilayangkan kepada KPKNL dikarenakan pihak Penjual menetapkan harga limit lelang yang terlalu murah dan jauh dari nilai pasar yang ada sehingga pemilik barang atau debitur merasa keberatan atas obyeknya dilelang.

4. Aplikasi Sibankum sering mengalami kendala atau gangguan yang mengakibatkan proses update perkara yang dilakukan oleh KPKNL mengalami kendala.
5. Kendali IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum proses penyelesaian perkara berada di luar KPKNL (Adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) sehingga target penyelesaian IKU sedikit terkendala.
6. Banyaknya gugatan sejenis yang dilakukan oleh Penggugat (*ne bis in idem*) terhadap obyek dan barang jaminan yang sama yang ditujukan kepada KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,56	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko antara lain:

	TW I		TW II		TW III		TW IV	
	Bagian I (20%)		Bagian II (25%)		Bagian III (25%)		Bagian IV (30%)	
Manajemen Kinerja Organisasi	1)	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	1)	Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW I	1)	Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW II	1)	Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW III
	2)	Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW I	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW II	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW III
	3)	Kesesuaian Manual IKU Pimpinan Unit	3)	Kualitas Laporan Kinerja TW I	3)	Kualitas Laporan Kinerja TW II	3)	Kualitas Laporan Kinerja TW III
							4)	Edukasi Manajemen Kinerja Organisasi

Manajemen Kinerja Pegawai	1)	Kelengkapan SKP unit	1)	Kualitas penyusunan manual IKI dan SKP Komplemen TW II	1)	Kelengkapan SKP Komplemen TW III	1)	Kelengkapan SKP Komplemen TW IV
	2)	Kepatuhan penilaian perilaku TW I	2)	Kepatuhan penilaian perilaku TW II	2)	Kepatuhan penilaian perilaku TW III	2)	Kepatuhan penilaian perilaku TW IV
	3)	Kepatuhan pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW I	3)	Kepatuhan penyusunan IPR TW I	3)	Kepatuhan penyusunan IPR TW II	3)	Kepatuhan penyusunan IPR TW III dan Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW IV

		4)	Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW II	4)	Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW III	4)	Edukasi Manajemen Kinerja Pegawai
						5)	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Manajemen Risiko	1)	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	1)	Kualitas Laporan Pemantauan TW I	1)	Kualitas Laporan Pemantauan TW II	1)	Kualitas Laporan Pemantauan TW III
	2)	Dokumen penyusunan Profil Risiko dan Piagam Manajemen Risiko	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW I	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW II	2)	Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW III
							3)	Edukasi Manajemen Risiko
							4)	Kapasitas Pengelola Risiko

Formula:				
No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:		Nilai IKMR (Realisasi IKU)		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang KIH Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawaian Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
Nilai IKMR		Predikat		

$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik
Tujuan:	
Mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas di masa mendatang.	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.

Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	-	-	96,56
2024	85	-	85	-	-	96,42
2023	80	-	80	-	-	98,06
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-Two	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2025	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max
Realisasi	99,85	96,07	96,07	95,38	95,38	96,56	96,56	/ TLK
Capaian	124,81 %	120,10 %	120,10 %	119,23 %	119,23 %	120,70 %	120,70 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	119%	119%	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Strategi dan Sasaran Strategis (SS) menggunakan metodologi *Balanced Scorecard (Perspektif Stakeholder, Customer, Internal Process, Learning & Growth)* untuk merumuskan Sasaran Strategis (SS) yang mencakup pengelolaan aset, layanan, kebijakan, hingga Sumber Daya Manusia.
2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berkualitas. IKU disusun dengan kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, Continuously Improved*). Dan IKU *non-cascading* disusun dengan spesifik, relevan dengan tugas fungsi dan tidak tanggung renteng.
3. Penyusunan dan penerapan SOP untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar, penguatan tata kelola internal dan budaya kerja kolaboratif (Kemenkeu Satu) dan peningkatan kualitas Sistem Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi berkinerja tinggi dan pengembangan kapabilitas melalui program pelatihan dan pengembangan.
5. Fokus pada kepuasan pengguna layanan dan pelayanan publik yang efektif dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.
6. Menerapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur kualitas pelaksanaan anggaran dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan akuntabel.

Kendala/akar masalah yang dihadapi antara lain:

1. Integrasi proses yaitu tantangan terbesar adalah menyatukan pengelolaan kinerja (apa yang dicapai) dengan pengelolaan risiko (apa yang menghambat pencapaian) dalam satu alur yang terintegrasi padahal keduanya saling terkait erat.
2. Masih ada kesulitan dalam merumuskan dan menerapkan indikator kinerja yang benar-benar SMART-C dan relevan dengan tujuan strategis.
3. Bias penilaian dalam evaluasi kinerja adanya *halo effect*, kesalahan kecenderungan terpusat, bias terlalu lunak/keras, serta prasangka pribadi dapat mengurangi objektivitas penilaian dan mitigasi risiko dalam menilai potensi risiko dan efektivitas mitigasi.
4. Kualitas data dan sistem pencatatan yang kurang memadai atau data yang tidak akurat dapat mengacaukan penilaian kinerja dan efektivitas manajemen risiko.
5. Keterbatasan SDM dan Budaya yaitu motivasi dan disiplin kurangnya motivasi dan disiplin pegawai dapat menghambat pencapaian target, kebutuhan pengembangan keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko dan tantangan antargenerasi yang mana perbedaan pengalaman dan cara pandang antara generasi senior dan junior dalam menilai dan mengelola kinerja/risiko.
6. Kurangnya pengarahan yang jelas dari manager atau pimpinan dapat memperlemah sistem pengendalian manajemen dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki kapasitas memadai dalam manajemen kinerja dan risiko.

Upaya-upaya lainnya yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Benturan Kepentingan - Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah mengidentifikasi dan juga melakukan penanganan dan pencegahan adanya benturan kepentingan pada berbagai area. Seluruh pegawai kami telah melaksanakan deklarasi data pegawai terkait benturan kepentingan sesuai dengan imbauan Sekretaris Direktorat Jenderal terkait akselerasi pelaksanaan Deklarasi Data Pegawai.
- 2) Identifikasi Risiko - Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah melaksanakan identifikasi risiko baik dalam kategori operasional, reputasi maupun fraud terkait dengan proses bisnis, organisasi dan pegawai serta meliputi berbagai risiko yang sifatnya *downside risk* maupun *upside risk*. Setelah dilakukan mitigasi risiko sampai dengan triwulan IV tahun 2025, untuk risiko yang bersifat *downside risk* memiliki besaran risiko yang menurun dan *upside risk* memiliki besaran risiko yang menjadi lebih tinggi.

3) *Knowing your employee* - Berbagai upaya untuk *knowing your employee* telah diterapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu diantaranya:

- a. *profiling* Pegawai oleh Unit Kepatuhan Internal;
- b. kegiatan Dialog Kinerja Pegawai dan pelaksanaan *coaching*, *mentoring*, dan *counseling* yang dilakukan masing-masing atasan langsung dengan pegawai dibawahnya;
- c. penyelenggaraan *one on one meeting*, sarasehan, dan bincang organisasi untuk mendengarkan keluhan dan masukan pegawai; dan
- d. bincang ringan dan santai pada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti olahraga bersama,

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada *stakeholder* dengan mengusung beberapa inovasi unggulan diantaranya adalah:

1. Inovasi Manajer Aset

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* secara konsisten berupaya mengoptimalkan aset negara melalui implementasi ide-ide yang kreatif, inovatif, dan solutif serta berdampak ekonomi dan sosial. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu mendapatkan apresiasi sebagai Juara I pada Kompetisi Inovasi Aset Manajer 3 tahun berturut-turut. Kompetisi Inovasi Aset Manajer ini diselenggarakan oleh DJKN secara nasional:

- a. Pada tahun 2021 Project KOIN berupa pemanfaatan tanah ITERA (Institut Teknologi Sumatera) seluas 10.500 m² melalui skema Kerja sama Pemanfaatan (KSP) untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) yang menghasilkan energi terbarukan sebesar 1 Mega Watt Peak sejak Januari 2021 telah terbukti berdampak positif baik dari sisi finansial, ekonomi, dan sosial.



- b. Pada tahun 2022 Project KOIN berupa pemanfaatan tanah BMN pada Pengelola Barang yang dikerjasamakan dengan Pesantren sebagai sarana pembelajaran yang multifungsi. Inovasi ini telah berdampak meningkatkan lapangan kerja, terbentuknya 3 kelompok budidaya, menyediakan Ruang Terbuka Hijau serta meningkatkan Index Pembangunan Manusia.



- c. Pada tahun 2023, project KOIN berupa pemanfaatan asset BMN pada pengelola barang yang digunakan sebagai bank sampah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan BUMDES telah melahirkan skema pinjam pakai pertama di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah Desa serta berhasil berkolaborasi dengan *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan yaitu PT SMF (Persero) yang menyalurkan dana CSR untuk pembangunan dan operasionalisasi bank sampah. Project ini telah berdampak merubah mindset masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan, menumbuhkan ekonomi kreatif, wisata edukasi, mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* serta *cost saving*.

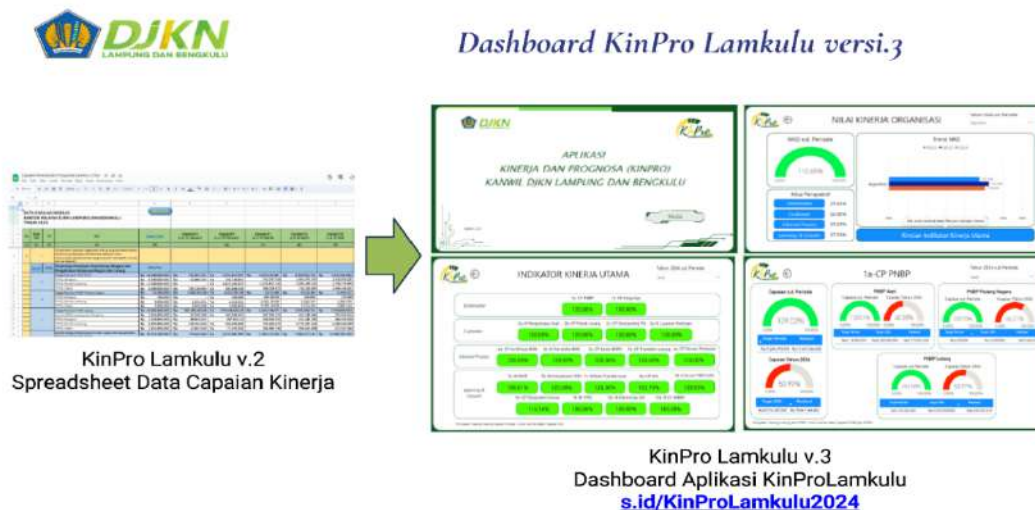


2. Inovasi Tapis Lamkulu (Transformasi Aplikasi Pelayanan Terintegrasi)
Merupakan aplikasi layanan terintegrasi Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang memberikan informasi terkait layanan utama baik terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang, dan pengurusan piutang negara dengan disertai berbagai menu yang lebih *update* dan memudahkan terkait layanan janji temu baik daring maupun luring, link media sosial serta sarana pengaduan.



- Inovasi Dashboard Kinpro (Kinerja dan Prognosa)

Merupakan wujud pengembangan inovasi KinPro V.2 yang sebelumnya disusun berupa spreadsheet Data Capaian Kinerja menjadi Dashboard Aplikasi yang disusun menggunakan PowerBI yang memberikan penyempurnaan fitur serta memudahkan dalam implementasi monitoring dan evaluasi serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. Inovasi Dashboard KinPro ini telah direplikasi oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung.



- Inovasi percepatan layanan

Merupakan perwujudan perbaikan layanan yang berkelanjutan pada lingkup Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, kami berusaha untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan. Inovasi percepatan

layanan ini telah dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, diantaranya termasuk percepatan dalam layanan Persetujuan/ Penolakan Pemindahtanganan berupa penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang, penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat/mutlak atas Piutang Daerah, pemberian bimbingan teknis lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, serta layanan penilaian.



Percepatan Layanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor KEP-41/WKN.05/2023

Jenis Layanan	Standar Jangka Waktu Pelayanan (Sebelum)	Percepatan Waktu Layanan (Sesudah)
Persetujuan/ Penolakan Pemindahtanganan berupa penjualan barang milik negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang	8 hari kerja	6 hari kerja
Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat/ mutlak atas Piutang Daerah	14 hari kerja	13 hari kerja
Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II	7 hari kerja	4 hari kerja



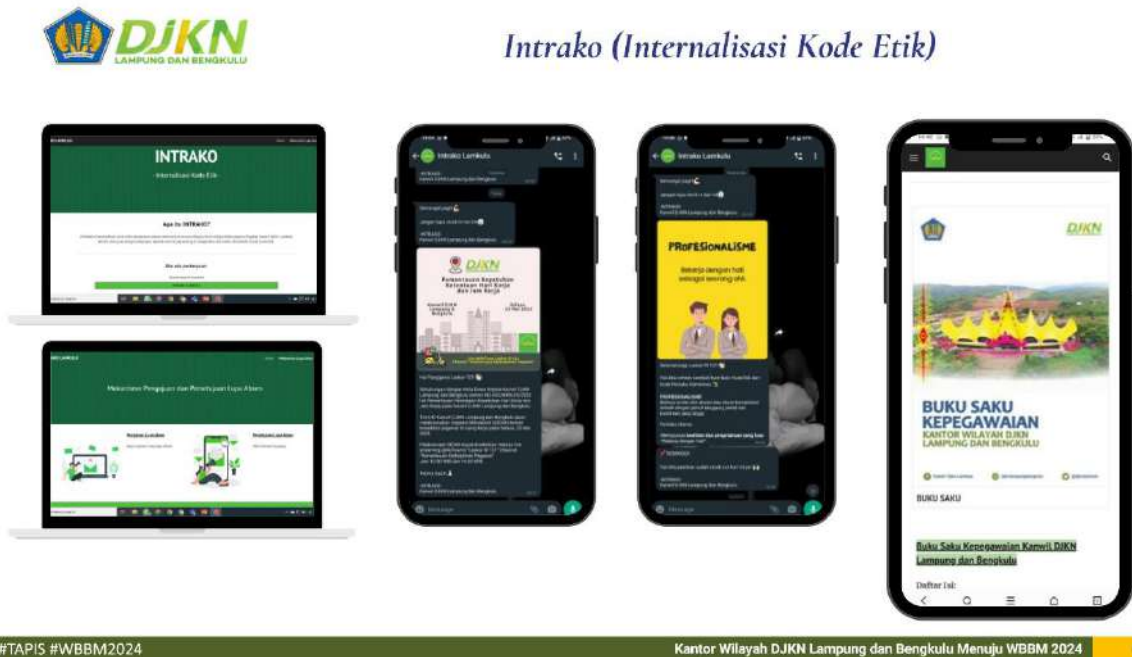
Percepatan Layanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor KEP-41/WKN.05/2023

Jenis Layanan	Standar Jangka Waktu Pelayanan (Sebelum)	Percepatan Waktu Layanan (Sesudah)
Penilaian tujuan pemanfaatan sewa	17 hari kerja (1-5 objek penilaian) 19 hari kerja (6-10 objek penilaian) *dst, Bertambah dua hari kerja setelah kelipatan 5 objek	Lebih cepat 1 hari kerja
Penilaian tujuan pemanfaatan selain sewa	44 hari kerja (1-5 objek penilaian) 46 hari kerja (6-10 objek penilaian) *dst, bertambah dua hari kerja setelah kelipatan 5 objek	Lebih cepat 3 hari kerja
Penilaian tujuan pemindahtanganan (kendaraan)	33 hari kerja (1-10 objek penilaian) 35 hari kerja (11-20 objek penilaian) *dst, Bertambah dua hari kerja setelah kelipatan 10 objek	Lebih cepat 3 hari kerja
Penilaian tujuan pemindahtanganan (selain kendaraan)	33 hari kerja (1-50 objek penilaian) 35 hari kerja (51-100 objek penilaian) *dst, Bertambah dua hari kerja setelah kelipatan 50 objek	Lebih cepat 3 hari kerja
Penilaian tujuan selain pemanfaatan dan pemindahtanganan	37hari kerja (1-5 objek penilaian) 39 hari kerja (6-10 objek penilaian) *dst, bertambah dua hari kerja setelah kelipatan lima objek	Lebih cepat 3 hari kerja

5. Inovasi Intrako (Internalisasi Kode Etik)

Merupakan sarana internalisasi aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai lingkup Kantor Wilayah DJKN Lamkulu. Intrako bertujuan sebagai pengingat kepada seluruh pegawai agar mengetahui dan selalu mematuhi aturan Kode Etik. Inovasi Intrako dikembangkan dalam bentuk web Intrako dan juga whatsapp blast serta chat bot pada aplikasi WhatsApp. Hal ini dilatarbelakangi oleh aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi media sosial yang terpopuler di Indonesia. Inovasi Intrako Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah direplikasi oleh KPKNL Bandar Lampung dengan implementasi Media Helau.



6. Inovasi NGOPIMANIS (Ngobrol Bareng Biar Makin Manis dan Andal)

Dalam rangka implementasi dan penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam implementasi berbagai tugas dan fungsi serta proses bisnis yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, dilaksanakan sebuah forum diskusi untuk brainstorming dan curah pendapat yang terbuka dan tailormade sesuai dengan situasi dan kondisi pada tiap Bagian dan Bidang secara one on one.

Ngopi Bareng Biar Makin Manis dan Andal
(Ngobrol Pintar Bareng, Bikin Lancar Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal)

- Implementasi dan penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk berbagai tugas dan fungsi serta proses bisnis
- Forum diskusi dilaksanakan dengan terbuka dan tailor-made untuk brainstorm dan curah pendapat secara one on one dengan tiap bagian dan bidang.



#TAPIS #WBBM2024

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Menuju WBBM 2024

Tugas Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu tidak hanya berhenti sampai dengan diarahnya predikat ZI WBBM, oleh karena itu Kantor Wilayah telah mengadakan rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM Tahun 2024 dan persiapan keberlanjutan predikat ZI WBBM Tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertempat di Aula Sakai Sambayan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Pada rapat tersebut Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu menyampaikan antara lain agar inovasi layanan dan intimasi dengan pengguna layanan harus tetap ditingkatkan. Selain itu, strategi-strategi dan rencana kerja untuk keberlanjutan ZI WBBM sudah harus mulai disusun Kembali.

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp3.027.808.801 atau 98,76% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp3.065.559.000 Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi per-jenis belanja Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
Tahun Anggaran 2025

JENIS BELANJA	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
Belanja Barang	2,509,896,000	2,507,499,809	99,90%
Belanja Modal*	555,663,000	520,308,992	93,63%
Belanja Pegawai*	0	0	N/A
TOTAL	3,065,559,000	3,027,808,801	98,76%

* belanja pegawai telah tersentralisasi di pusat

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2025 tersaji dalam tabel 3.14.

Tabel 3.14
Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKN
TA 2020 s.d. 2025 per Jenis Belanja

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2025	0	0	0%	2,509	2,507	99,90%	555	520	93,63%
2024	0	0	0%	3,115	3,057	98,13%	1,104	1,094	99,1%
2023	0	0	0%	2.710	2.534	93,52%	624	623	99%
2022	0	0	0%	2.300	2.109	91,72%	0	0	0%
2021	0	0	0%	2.346	2.143	91,36%	57	57	100%
2020	1.720	1.702	98,95%	2.530	2.456	97,06%	84	82,7	98,37%

*dalam juta rupiah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu pada tahun 2025 naik secara signifikan

Adapun rincian realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2025 tersaji dalam tabel 3.15.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Per Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	31,276,000	31,190,700
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	188,146,000	187,341,596
3.	Pengelolaan Aset	345,021,000	344,793,751
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	6,400,000	6,399,927
Dukungan Manajemen			
1.	Legislasi dan Litigasi	23,100,000	23,099,135
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,426,966,000	2,390,629,456
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	33,651,000	33,361,416
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10,999,000	10,992,820
TOTAL		3,065,559,000	3,027,808,801

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah menjalankan Gerakan Efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, antara lain dengan cara:

1. Membayarkan SPD Perjalanan Dinas sebesar 80% dari SBM,
2. Tidak mengadakan Rapat di dalam Kantor di luar jam Kerja (RDK), dan
3. Menggunakan daya dan jasa seperti air, listrik, internet dan telepon serta penggunaan ATK secara efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN lampung dan Bengkulu mulai tahun 2025, pembayaran atas tagihan listrik, telepon, dan internet dibayarkan dengan mekanisme *Platform* Pembayaran Pemerintah (PPP) yang dikoordinasikan oleh Kantor Pusat DJKN. Pembayaran atas biaya-biaya tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Pusat DJKN.

KINERJA LAIN-LAIN:

Selain dari 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi DJKN. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan UMKM EXPO Kemenkeu Satu Tahun 2025

Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 dan mewujudkan sinergi antarunit di lingkungan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung, telah dilaksanakan kegiatan UMKM Expo Kemenkeu Satu Lampung Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM, promosi produk unggulan lokal, serta perluasan akses pembiayaan dan literasi keuangan bagi pelaku usaha di Provinsi Lampung

Maksud dan Tujuan

- 1) Sebagai bentuk dukungan nyata Kementerian Keuangan terhadap pemberdayaan UMKM dan optimalisasi pembiayaan sektor riil.
- 2) Menjadi ajang promosi dan temu bisnis antar pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, mitra usaha, dan masyarakat umum.
- 3) Mendorong literasi keuangan dan digitalisasi UMKM serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan pemerintah.
- 4) Memperkuat sinergi antarunit Eselon I Kemenkeu Satu Lampung dan mitra strategis daerah.

Ruang Lingkup

- 1) Pameran dan Penjualan Produk UMKM yang diikuti oleh tenant perwakilan dari Unit Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung.
- 2) Sosialisasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank BSI dan Mandiri serta PT Pegadaian, berupa sosialisasi pembiayaan dan literasi keuangan.
- 3) Kegiatan Lelang oleh Kanwil DJKN Provinsi Lampung dan Bengkulu.
- 4) *Business Development Services* (BDS), berupa pendampingan dan pelatihan bagi UMKM binaan oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
- 5) Aksi Sosial Pegawai Kemenkeu Satu, berupa pengumpulan barang donasi

untuk masyarakat.

Dasar kegiatan adalah Nota Dinas Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung Nomor ND- 50/PWK.8/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Partisipasi Kegiatan UMKM Expo Kemenkeu Satu Provinsi Lampung. Adapun Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 pada pukul 07.30 s.d 15.00 WIB di Halaman Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dihadiri oleh 22 Tenant perwakilan UMKM Unit Eselon I Kemenkeu Provinsi Lampung, 2 Tenant dari Himbara, 1 Tenant dari PT. Pegadaian, 21 UMKM Binaan Kemenkeu Satu sebagai peserta *Business Development Services (BDS)*, Pegawai dan stakeholder Kemenkeu Satu Lampung serta masyarakat umum.

Berikut *rundown* kegiatan UMKM Expo Tahun 2025:

MULAI	SELESAI	DURASI (MENIT)	URAIAN KEGIATAN	PIC/KETERANGAN
UPACARA HARI OEANG				
06:30	07:00	30	REGISTRASI	
07:00	07:30	30	UPACARA	LAP KANWIL DJP
07:30	08:30	60	RAMAH TAMAH DAN SARAPAN	TIM KONSUMSI
			PEMBAGIAN HADIAH LOMBA HORI	MC
UMKM EXPO				
08:30	08:40	10	PEMBUKAAN DAN DOA	MC
08:40	09:05	25	SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN EXPO OLEH KEPALA PERWAKILAN	KEPALA PERWAKILAN KEMENKEU PROV. LAMPUNG
09:05	09:15	10	FOTO BERSAMA	TIM DOKUMENTASI MASING-MASING UE.1
09:15	10:05	50	LELANG OLEH DJKN	DJKN
10:05	10:35	30	SESI BELANJA EKSEKUTIF	TIM ACARA
10:35	10:45	10	PROMOSI HIMBARA - BSI	BSI
10:45	10:55	10	PROMOSI HIMBARA - MANDIRI	MANDIRI
10:55	11:05	10	PEMBIAYAAN UMi	PEGADAIAN
11:05	11:30	25	BDS "UMKM NAIK KELAS"	DJBC
10:30	11:55	25	BDS "AKTIVASI CORETAX"	DJP
11:55	12:00	5	PENUTUP	MC

A. Hasil yang Dicapai

Kegiatan **UMKM Expo Kemenkeu Satu Provinsi Lampung Tahun 2025** berhasil menarik antusiasme tinggi dari pegawai Kemenkeu Satu. Tenant UMKM melaporkan peningkatan penjualan produk lokal selama kegiatan berlangsung.

Berikut rekapitulasi hasil dari kegiatan UMKM Expo:

Omzet penjualan produk UMKM Expo Tahun 2025

No	Nama Tenant	Omset	
1	Ukir Lampung Antara	Rp	9,100,000
2	Batik Assafa	Rp	6,000,000
3	Black Line	Rp	560,000
4	Hepiku	Rp	1,370,000
5	Ghani Nurseri	Rp	-
6	Galeri Oemah Cinta	Rp	795,000
7	Bibik Kuweh	Rp	4,647,500
8	Somay Rinjani	Rp	7,630,000
9	Kedai Bu Gendut	Rp	3,988,000
10	Lapak Bang Ali	Rp	4,340,000
11	Bunga Rajut	Rp	2,385,000
12	Dapur Sareh	Rp	1,125,000
13	Kallista Cookies	Rp	2,000,000
14	Kopi Sandjaran	Rp	755,000
15	Raden Food	Rp	1,555,000
16	Madu Suhita	Rp	2,900,000
17	Jahe Merah Zala	Rp	2,000,000
18	Ummi Kemplang	Rp	2,400,000
19	PT Amerta Global	Rp	1,345,000
20	Jagat Boemi	Rp	4,745,000
21	O My Juice	Rp	620,000
22	Zatira Modiste	Rp	2,600,000
Total		Rp	62,860,500

Hasil penjualan barang donasi untuk kegiatan kegiatan bakti sosial
Kemenkeu Satu sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Jual	
1	Kopi dan Batik	Rp	300,000
2	Bonsai	Rp	500,000
3	Kerudung	Rp	150,000
4	Batik Lampung	Rp	350,000
5	Tas Tapis	Rp	70,000
6	Batik Sepasang	Rp	150,000
7	Jam Tangan	Rp	500,000
Total		Rp	2,020,000

Hasil Lelang Produk UMKM adalah **Rp. 29.082.000**

**Total hasil keseluruhan dari kegiatan UMKM Expo Kemenkeu Satu Tahun 2025
adalah Rp. 93.962.500,-**

Selain capaian tersebut, kegiatan ini juga menghasilkan:

1. Peningkatan eksposur produk UMKM lokal di lingkungan Kemenkeu Satu Lampung.
2. Terjalannya kerja sama baru antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan (Himbara dan Pegadaian).
3. Tersalurnya informasi pembiayaan UMi dan layanan keuangan inklusif kepada pelaku usaha kecil.

Tumbuhnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya mendukung ekonomi rakyat melalui kegiatan belanja produk lokal.

B. Evaluasi dan Harapan

Secara umum, pelaksanaan UMKM Expo Kemenkeu Satu Provinsi Lampung Tahun 2025 berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta maupun pengunjung. Koordinasi antar unit Eselon I berjalan baik,

dan kegiatan berhasil menumbuhkan semangat sinergi dalam mendukung pengembangan UMKM lokal.

Diharapkan kegiatan UMKM Expo Kemenkeu Satu dapat menjadi agenda tahunan yang konsisten, menjadi wadah promosi, sinergi, dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan, serta menghadirkan produk yang semakin variatif, kompetitif, dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Kegiatan Pembinaan Mental (Bintal) pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian telah mengamanatkan untuk dilakukannya pembinaan mental. Pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat. Ruang lingkup Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- bidang ideologi, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia agar memiliki jiwa nasionalisme, pemersatu dan perekat bangsa, loyalitas, kebersamaan, dan memiliki pengabdian yang tinggi, serta rela berkorban berdasarkan pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah, dan tujuan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bidang rohani, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki integritas yang berlandaskan pada nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- bidang kompetensi, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan; dan
- bidang kejiwaan, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikologi).

Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah melaksanakan kegiatan selama tahun 2025, dengan laporan pada tautan berikut: [Bintal_Lamkulu_Triwulan_IV_Tahun_2025.pdf.pdf](#) dan capaian IKI Kebintalan Pejabat Administrator Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu pada tautan sebagai berikut: Capaian IKI Kebintalan Pejabat Administrator DJKN (1).xlsx

3. Kemenkeu Mengajar 9

Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah oleh relawan dari Kementerian Keuangan. Relawan akan mengajarkan peran Kementerian Keuangan dalam upaya menjaga ekonomi negeri dan memperkenalkan profesi yang ada di Kementerian Keuangan. Kemenkeu Mengajar juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat yang ada di Kementerian Keuangan. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan. Panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti Kemenkeu Mengajar, juga tidak mendapatkan pembayaran baik honorarium maupun SPD. Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN. Relawan meyakini bahwa masa depan Indonesia yang lebih baik adalah imbalan yang pantas atas upaya Kemenkeu Mengajar untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan Kemenkeu Mengajar Lingkup Kemenkeu Satu Lampung Tahun 2025 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 November 2025 bertempat di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Panitia yang terlibat terdiri dari 47 orang Panitia Daerah, 95 Orang Relawan dan 14 orang Wild Card yang berasal dari berbagai unit eselon I di Kementerian Keuangan serta SMV Kementerian Keuangan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 504 siswa/siswi SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai peran APBN dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan beragam profesi di Kementerian Keuangan serta menanamkan nilai-nilai integritas, pelayanan dan semangat berkarya yang menjadi karakter insan Kemenkeu.

4. Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah menerapkan prinsip-prinsip GEDSI dalam kebijakan, pelayanan dan sarana prasarananya, sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah menetapkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor KEP-68/WKN-05/2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu;
- b. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dalam memberikan layanan didukung dengan sarana dan prasarana parkir prioritas ibu hamil dan juga parkir prioritas difabel, *kids corner* dan ruang laktasi, mushola, toilet difabel, dan kursi roda; dan
- c. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memberikan layanan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang gender.

5. Kegiatan Lain-Lain (sebagaimana daftar terlampir)



Bab IV Penutup dan Lampiran



BAB IV | Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memperoleh hasil kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu adalah sebesar **115,87%**. Selain itu, juga dapat dibuktikan dari sebagian besar nilai capaian kinerja pada setiap kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* di atas target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu berhasil mencapai prestasi tahun 2024 sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM).

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung (*Critical Factor Issues*) di antaranya:

1. Sistem pelayanan yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga pelayanan prima dapat terwujud.
2. Kerja sama tim yang solid di lingkungan internal dengan tetap mengedepankan fungsi kontrol, *check and balance* serta memberikan *reward and punishment* atas capaian dan tindakan yang telah dilakukan terhadap organisasi.
3. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan dan keterampilan dan kemampuan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Kanwil.
4. Tersedianya alokasi dana, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan dan kegiatan operasional yang memadai.
5. Program *Early Warning System* yang berjalan dengan baik dan program pembinaan kepada KPKNL yang terintegrasi secara *online*.
6. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dari seluruh *stakeholders* (satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, dll) termasuk KPKNL dan Kantor Pusat.

Namun demikian, berdasarkan evaluasi atas hasil capaian indikator kinerja utama tersebut, untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian maka perlu menerapkan beberapa strategi ke depan sebagai berikut:

1. senantiasa menginternalisasi budaya Kementerian Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu;
2. memastikan bahwa setiap pegawai selalu menerapkan prinsip integritas;
3. melakukan evaluasi kinerja dan evaluasi penerapan SOP secara berkala dan mempertahankan kinerja agar senantiasa prima;
4. meningkatkan kompetensi pegawai khususnya terhadap budaya data melalui *e-learning* maupun mengikuti sosialisasi *ngulik* data oleh Direktorat TSI.
5. membangun inovasi yang mendukung peningkatan layanan dan percepatan layanan; dan
6. meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan *stakeholders*;

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 tak lepas dari permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Efisiensi anggaran.

Untuk mencapai nilai Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) yang baik, diperlukan adanya efisiensi sehingga menyebabkan kurang optimalnya kegiatan/belanja. Langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menggunakan anggaran berdasarkan skala prioritas.

2. Prasarana yang kurang memadai khususnya di bidang kehumasan.

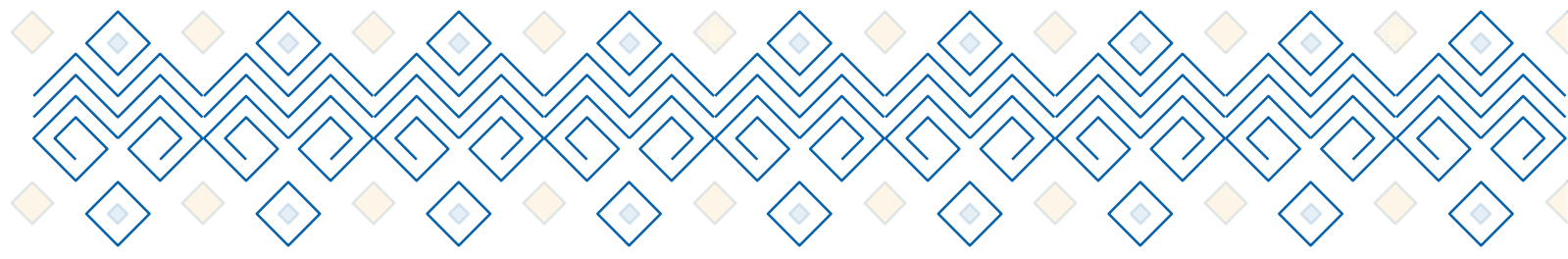
Program EKSIS/Kemenkeu SATU merupakan program untuk mendukung sasaran strategis Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif. Akan tetapi, sarana dan prasarana kehumasan di Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu masih belum memadai/memerlukan peremajaan.

3. Adaptasi kebiasaan baru dalam operasional dan layanan kantor.

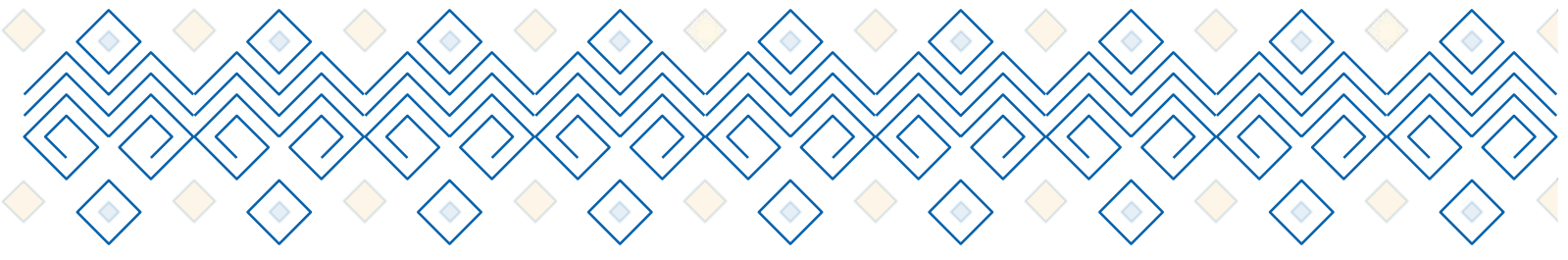
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, Kementerian Keuangan telah menggunakan *collaboration tools* untuk menunjang tugas dan fungsi. Masih banyak pegawai yang belum memahami atau belum dapat mengoptimalkan fasilitas dimaksud. Diperlukan *knowledge sharing*/pelatihan lebih lanjut agar *collaboration tools* dapat difungsikan secara maksimal.

Segala capaian pada tahun 2025 ini merupakan hasil kerja sama antara Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan KPKNL yang berada di wilayah kerjanya serta *stakeholders* terkait. Sinergi dan kerja sama seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, dalam rangka menjaga komitmen untuk melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala aspek bidang.

Dengan disusunnya LAKIN Tahun 2025 pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

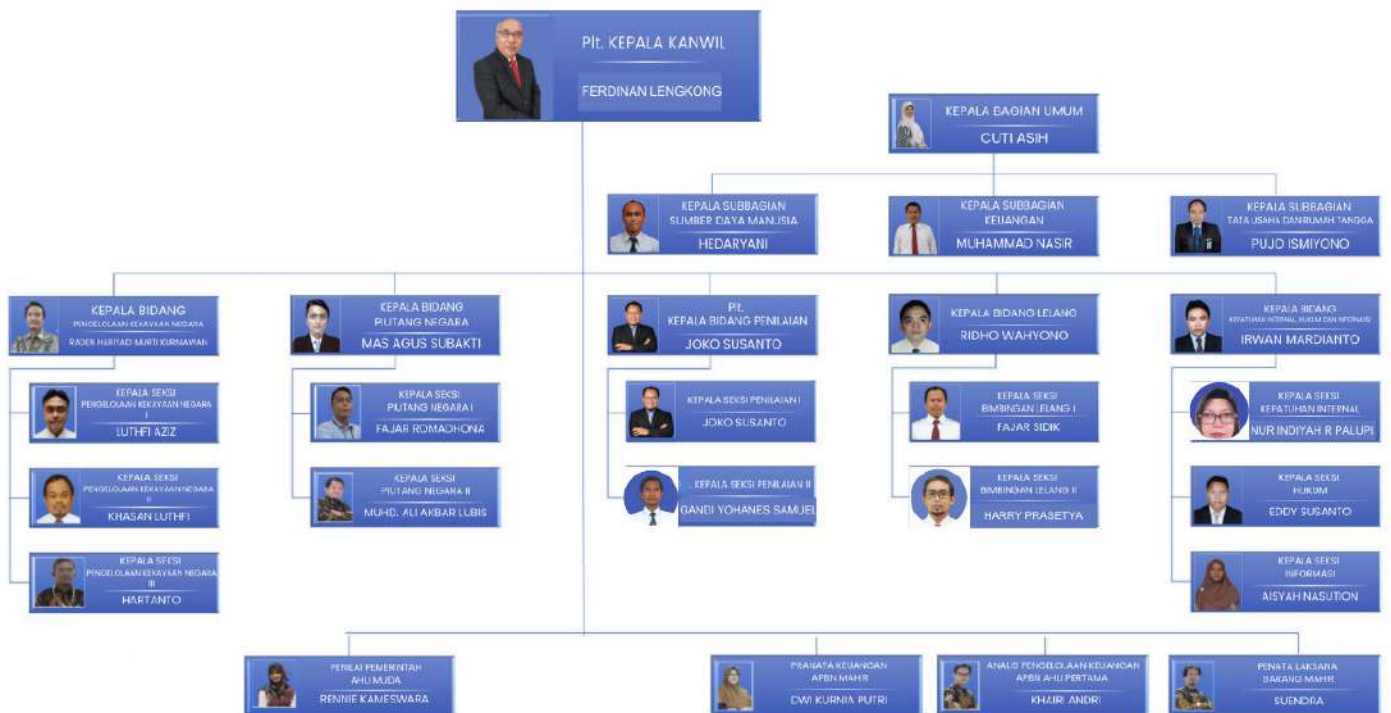


Lampiran





STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 015.09.2.506142/2025**



DS:6200-8350-5045-0160

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
 4. Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
- Sebesar : Rp. 20.227.277.000 (DUA PULUH MILIAR DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.101.238.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	126.039.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 20.227.277.000

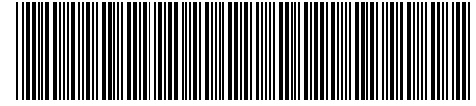
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025



DS:6200-8350-5045-0160

Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp.	742.902.000
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	68.550.000
CD.4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.	243.937.000
CD.4798	Pengelolaan Aset	Rp.	417.315.000
CD.4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp.	13.100.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	19.484.375.000
WA.4700	Legislasi dan Litigasi	Rp.	23.100.000
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	19.366.149.000
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	73.126.000
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	22.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			742.902.000
Kegiatan	:	4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			68.550.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	4,00	orang, kegiatan	68.550.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.00	orang	15.000.000
		02	AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.00	orang	43.590.000
		03	AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.00	orang	9.960.000
Kegiatan	:	4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			243.937.000
	:	1. 01	Indeks efektifitas penambahan PMN			
	:	2. 01	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15,00	Laporan, Rekomendasi	243.937.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	1.00	Rekomendasi	174.957.000
		02	FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	2.00	Rekomendasi	40.000.000
		03	FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	12.00	Rekomendasi	28.980.000
Kegiatan	:	4798	Pengelolaan Aset			417.315.000
	:	1. 01	Persentase penurunan outstanding piutang negara			
	:	2. 01	Tingkat efektivitas kinerja SMV (BUMN dan BLU)			
	:	3. 02	Persentase evaluasi kinerja BMN			
	:	4. 03	Persentase realisasi pokok lelang			
	:	5. 04	Tingkat pelayanan penilaian yang akuntabel dan profesional			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4798.AAH	Peraturan lainnya	15,00	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	20.000.000
Rincian Output		:	01	AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	15,00	Surat Keputusan	20.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	56,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	82.902.000
Rincian Output		:	01	FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	55,00	Orang	68.338.000
		:	02	FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1,00	Orang	14.564.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	6,00	Laporan, Rekomendasi	99.641.000
Rincian Output		:	01	FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,00	Rekomendasi	17.500.000
		:	02	FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	3,00	Rekomendasi	63.380.000
		:	03	FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	1,00	Rekomendasi	18.761.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN	9,00	Unit, Aset	214.772.000
Rincian Output		:	01	FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	9,00	Aset	214.772.000
Kegiatan		:	4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			13.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai kinerja regulasi			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4801.ACE	Perizinan Profesi	6,00	Orang	13.100.000
Rincian Output		:	01	ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	6,00	Orang	13.100.000
Program		:	015.09.WA	Program Dukungan Manajemen			19.484.375.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4700	Legislasi dan Litigasi			23.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	23.100.000
Rincian Output	:	01 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5.00	Layanan	23.100.000
Kegiatan	:	4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			19.366.149.000
	:	1. 01	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 - DJKN			
	:	2. 01	Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki/Direnovasi			
	:	3. 02	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan - DJKN			
	:	4. 02	Persentase Pendanaan Pengadaan Tanah yang Tepat Waktu			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.443.000
Rincian Output	:	01 EBA.002	Kerumahtanggaan	12.00	Layanan	121.503.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	12.00	Layanan	1.878.940.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	830,00	Unit, m2, Paket	17.365.706.000
Rincian Output	:	01 EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	49.00	Unit	238.226.000
	:	02 EBB.003	Kendaraan Bermotor	1.00	Unit	28.000.000
	:	03 EBB.004	Gedung/Bangunan	780.00	m2	17.099.480.000
Kegiatan	:	4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			73.126.000
	:	1. 01	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan - DJKN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4702.BMB	Komunikasi Publik	108,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	73.126.000	
Rincian Output		:	01	BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	100.00	Orang	23.200.000
		:	02	BMB.002	Kehumasan	6.00	kegiatan	26.726.000
		:	03	BMB.003	Pameran/Eksibisi	2.00	kegiatan	23.200.000
Kegiatan		:	4704		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			22.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01		Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal - DJKN			
		:	2. 02		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti - DJKN			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.000.000	
Rincian Output		:	01	EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	3.00	Dokumen	22.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



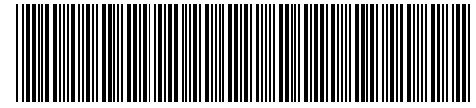
DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	-	2.861.571	17.365.706	-	-	20.227.277		
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	742.902	-	-	-	742.902		
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	68.550	-	-	-	68.550		
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	68.550	-	-	-	68.550	12 . 51	
01	RM	-	58.590	-	-	-	58.590	017@	
04	PNBP	-	9.960	-	-	-	9.960	017@	
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-	243.937	-	-	-	243.937		
4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	243.937	-	-	-	243.937	12 . 51	
01	RM	-	214.957	-	-	-	214.957	017@	
04	PNBP	-	28.980	-	-	-	28.980	017@	
4798	Pengelolaan Aset	-	417.315	-	-	-	417.315		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4798.AAH	Peraturan lainnya (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	20.000	-	-	-	20.000	12 . 51	
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	017@	
4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	82.902	-	-	-	82.902	12 . 51	
01	RM	-	14.564	-	-	-	14.564	017@	
04	PNBP	-	68.338	-	-	-	68.338	017@	
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	99.641	-	-	-	99.641	12 . 51	
01	RM	-	80.880	-	-	-	80.880	017@	
04	PNBP	-	18.761	-	-	-	18.761	017@	
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	214.772	-	-	-	214.772	12 . 51	
01	RM	-	214.772	-	-	-	214.772	017@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-	13.100	-	-	-	13.100		
4801.ACE	Perizinan Profesi (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	13.100	-	-	-	13.100	12.51	
01	RM	-	13.100	-	-	-	13.100	017@	
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	-	2.118.669	17.365.706	-	-	19.484.375		
4700	Legislasi dan Litigasi	-	23.100	-	-	-	23.100		
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	23.100	-	-	-	23.100	12.51	
01	RM	-	23.100	-	-	-	23.100	017@	
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	-	2.000.443	17.365.706	-	-	19.366.149		
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	2.000.443	-	-	-	2.000.443	12.51	
01	RM	-	2.000.443	-	-	-	2.000.443	017@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

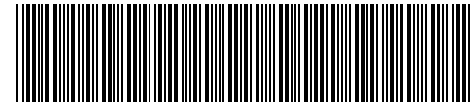
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	-	17.365.706	-	-	17.365.706	12 . 51	
01	RM	-	-	17.365.706	-	-	17.365.706	017	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	-	73.126	-	-	-	73.126		
4702.BMB	Komunikasi Publik (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	73.126	-	-	-	73.126	12 . 51	
01	RM	-	73.126	-	-	-	73.126	017@	
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	22.000	-	-	-	22.000		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	22.000	-	-	-	22.000	12 . 51	
01	RM	-	22.000	-	-	-	22.000	017@	
JUMLAH		-	2.861.571	17.365.706	-	-	20.227.277		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara

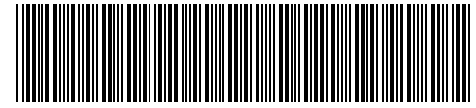
Provinsi : (12) LAMPUNG

Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	42.268	121.575	1.951.827	95.795	168.156	7.315.590	118.797	222.850	4.290.383	242.291	340.022	5.317.723	20.227.277
		BELANJA BARANG	42.268	121.575	215.256	95.795	168.156	369.308	118.797	222.850	817.241	242.291	340.022	108.011	2.861.571
		BELANJA MODAL	0	0	1.736.571	0	0	6.946.282	0	0	3.473.141	0	0	5.209.712	17.365.706
015.09.CD.4796		Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.110	40.440	68.550
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.110	40.440	68.550
015.09.CD.4797		Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.985	205.152	800	243.937
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.985	205.152	800	243.937
015.09.CD.4798		Pengelolaan Aset	0	0	0	0	0	0	0	0	52.578	204.306	106.760	53.671	417.315
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	52.578	204.306	106.760	53.671	417.315
015.09.CD.4801		Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100
015.09.WA.4700		Legislasi dan Litigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0	0	23.100
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0	0	23.100
015.09.WA.4701		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	42.268	121.575	1.951.827	95.795	168.156	7.315.590	118.797	127.724	4.214.705	0	0	5.209.712	19.366.149
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	42.268	121.575	215.256	95.795	168.156	369.308	118.797	127.724	741.563	0	0	0	2.000.443

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara

Provinsi : (12) LAMPUNG

Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

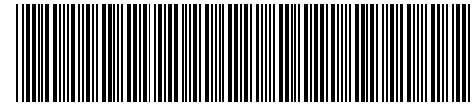
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
015.09.WA.4702		53 BELANJA MODAL	0	0	1.736.571	0	0	6.946.282	0	0	3.473.141	0	0	5.209.712	17.365.706
		Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	0	0	0	0	0	0	0	73.126	0	0	0	0	73.126
015.09.WA.4704		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	73.126	0	0	0	0	73.126
		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	1.183.321
		- PNPB (425783)	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	1.183.321

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp. 268.863		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 12.090
	52 Belanja Barang	Rp. 268.863		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 4.310
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 16.800		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.400
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.976		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		4798	Pengelolaan Aset	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4798.AAH	Peraturan lainnya	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 4.800		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 9.250
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 800		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.722
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 15.381		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.604

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



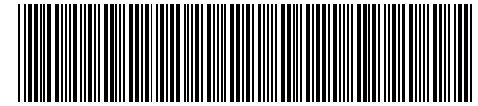
DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4798.FAE	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 720	4801.ACE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.986 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.950
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240		Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.900		Perizinan Profesi
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.500		Program Dukungan Manajemen
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.714		Legislasi dan Litigasi
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.696		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.350
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	015.09.WA 4700 4700.EBA	Program Dukungan Manajemen Legislasi dan Litigasi Layanan Dukungan Manajemen Internal

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		
4702.BMB	Komunikasi Publik		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.375 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.401 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6200-8350-5045-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU		
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rp. 17.099.480		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Pembelian 4 unit Rumah Negara Gol. II Tipe C dan 10 unit Rumah Negara Gol. II Tipe D di Kota Bandar Lampung		
	Rp. 17.099.480		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 015.09.2.506142/2025**



DS:8333-2947-9331-0958

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09

Tanggal : 27 Oktober 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
 4. Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
- Sebesar : Rp. 20.835.322.000 (DUA PULUH MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.709.283.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	126.039.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 20.835.322.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025

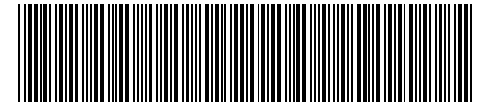


DS:8333-2947-9331-0958

Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp.	742.902.000
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	68.550.000
CD.4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.	243.937.000
CD.4798	Pengelolaan Aset	Rp.	417.315.000
CD.4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp.	13.100.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	20.092.420.000
WA.4700	Legislasi dan Litigasi	Rp.	23.100.000
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	19.974.194.000
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	73.126.000
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	22.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			742.902.000
Kegiatan	:	4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			68.550.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	172,00	orang, kegiatan	68.550.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	38,00	orang	15.000.000
		02	AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	109,00	orang	43.590.000
		03	AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	25,00	orang	9.960.000
Kegiatan	:	4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			243.937.000
	:	1. 01	Indeks efektifitas penambahan PMN			
	:	2. 01	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15,00	Laporan, Rekomendasi	243.937.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	1,00	Rekomendasi	174.957.000
		02	FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	2,00	Rekomendasi	40.000.000
		03	FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	12,00	Rekomendasi	28.980.000
Kegiatan	:	4798	Pengelolaan Aset			417.315.000
	:	1. 01	Persentase penurunan outstanding piutang negara			
	:	2. 01	Tingkat efektivitas kinerja SMV (BUMN dan BLU)			
	:	3. 02	Persentase evaluasi kinerja BMN			
	:	4. 03	Persentase realisasi pokok lelang			
	:	5. 04	Tingkat pelayanan penilaian yang akuntabel dan profesional			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4798.AAH	Peraturan lainnya	15,00	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	20.000.000
Rincian Output		:	01	AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	15,00	Surat Keputusan	20.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	56,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	82.902.000
Rincian Output		:	01	FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	55,00	Orang	68.338.000
		:	02	FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1,00	Orang	14.564.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	6,00	Laporan, Rekomendasi	99.641.000
Rincian Output		:	01	FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,00	Rekomendasi	17.500.000
		:	02	FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	3,00	Rekomendasi	63.380.000
		:	03	FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	1,00	Rekomendasi	18.761.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN	9,00	Unit, Aset	214.772.000
Rincian Output		:	01	FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	9,00	Aset	214.772.000
Kegiatan		:	4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			13.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai kinerja regulasi			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4801.ACE	Perizinan Profesi	6,00	Orang	13.100.000
Rincian Output		:	01	ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	6,00	Orang	13.100.000
Program		:	015.09.WA	Program Dukungan Manajemen			20.092.420.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4700	Legislasi dan Litigasi			23.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	23.100.000
Rincian Output	:	01 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5.00	Layanan	23.100.000
Kegiatan	:	4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			19.974.194.000
	:	1. 01	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 - DJKN			
	:	2. 01	Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki/Direnovasi			
	:	3. 02	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan - DJKN			
	:	4. 02	Persentase Pendanaan Pengadaan Tanah yang Tepat Waktu			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.091.203.000
Rincian Output	:	01 EBA.002	Kerumahtanggaan	12.00	Layanan	121.503.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	12.00	Layanan	1.969.700.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	861,00	Unit, m2, Paket	17.882.991.000
Rincian Output	:	01 EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	80.00	Unit	763.511.000
	:	02 EBB.003	Kendaraan Bermotor	1.00	Unit	20.000.000
	:	03 EBB.004	Gedung/Bangunan	780.00	m2	17.099.480.000
Kegiatan	:	4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			73.126.000
	:	1. 01	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan - DJKN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4702.BMB	Komunikasi Publik	108,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	73.126.000
Rincian Output		:	01	BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	100,00	Orang	23.200.000
		:	02	BMB.002 Kehumasan	6,00	kegiatan	26.726.000
		:	03	BMB.003 Pameran/Eksibisi	2,00	kegiatan	23.200.000
Kegiatan		:	4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			22.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal - DJKN			
		:	2. 02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti - DJKN			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	3,00	Dokumen	22.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

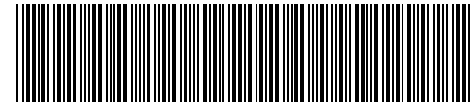
ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	20.835.322.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	20.709.283.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	-	2.952.331	17.882.991	-	-	20.835.322		
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	742.902	-	-	-	742.902		
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	68.550	-	-	-	68.550		
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	68.550	-	-	-	68.550	12 . 51	
01	RM	-	58.590	-	-	-	58.590	017@	
04	PNBP	-	9.960	-	-	-	9.960	017@	
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-	243.937	-	-	-	243.937		
4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	243.937	-	-	-	243.937	12 . 51	
01	RM	-	214.957	-	-	-	214.957	017@	
04	PNBP	-	28.980	-	-	-	28.980	017@	
4798	Pengelolaan Aset	-	417.315	-	-	-	417.315		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



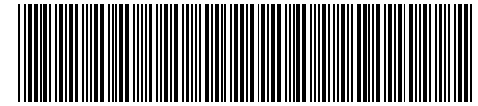
DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4798.AAH	Peraturan lainnya (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	20.000	-	-	-	20.000	12 . 51	
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	017@	
4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	82.902	-	-	-	82.902	12 . 51	
01	RM	-	14.564	-	-	-	14.564	017@	
04	PNBP	-	68.338	-	-	-	68.338	017@	
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	99.641	-	-	-	99.641	12 . 51	
01	RM	-	80.880	-	-	-	80.880	017@	
04	PNBP	-	18.761	-	-	-	18.761	017@	
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	214.772	-	-	-	214.772	12 . 51	
01	RM	-	214.772	-	-	-	214.772	017	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-	13.100	-	-	-	13.100		
4801.ACE	Perizinan Profesi (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	13.100	-	-	-	13.100	12.51	
01	RM	-	13.100	-	-	-	13.100	017@	
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	-	2.209.429	17.882.991	-	-	20.092.420		
4700	Legislasi dan Litigasi	-	23.100	-	-	-	23.100		
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	23.100	-	-	-	23.100	12.51	
01	RM	-	23.100	-	-	-	23.100	017	
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	-	2.091.203	17.882.991	-	-	19.974.194		
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	2.091.203	-	-	-	2.091.203	12.51	
01	RM	-	2.091.203	-	-	-	2.091.203	017@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
Kewenangan : (KD)

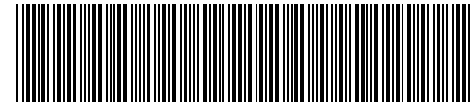
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	-	17.882.991	-	-	17.882.991	12 . 51	
01	RM	-	-	17.882.991	-	-	17.882.991	017@	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	-	73.126	-	-	-	73.126		
4702.BMB	Komunikasi Publik (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	73.126	-	-	-	73.126	12 . 51	
01	RM	-	73.126	-	-	-	73.126	017@	
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	22.000	-	-	-	22.000		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	22.000	-	-	-	22.000	12 . 51	
01	RM	-	22.000	-	-	-	22.000	017@	
JUMLAH		-	2.952.331	17.882.991	-	-	20.835.322		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (506142) KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
015.09.WA.4704	52 BELANJA BARANG DAN JASA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.200	49.926	73.126
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
	52 BELANJA BARANG DAN JASA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
	PERKIRAAN PENERIMAAN		98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	1.183.321
	- PNBPN (425783)		98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	98.610	1.183.321

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



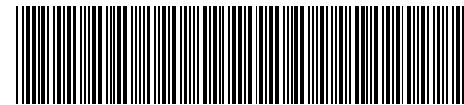
DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 17.769.763		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 442.435	4797	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 17.327.328	4797.FAE	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000
	521211 Belanja Bahan(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.890		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.381
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.408		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.310
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.800		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.976	4798	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4798.AAH	Pengelolaan Aset
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Peraturan lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.700		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	4798.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
			521211 Belanja Bahan(PNBP)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
	Tidak Dapat Dicairkan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	Rp. 4.650		Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025	Rp. 1.733
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	Rp. 6.000		Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 6.714
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Rp. 2.722		Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 100
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025	Rp. 44.077		Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 2.700
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	
	Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Rp. 720	4801.ACE	Perizinan Profesi	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025	Rp. 300
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 480	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 2.900
521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.798	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 3.500
521211	Belanja Bahan(PNBP)				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
015.09.WA 4701 4701.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4702 4702.BMB 4704 4704.EBD	533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan(RM)
	Program Dukungan Manajemen		Catatan Pembelian 4 unit Rumah Negara Gol. II Tipe C dan 10 unit Rumah Negara Gol. II Tipe D di Kota Bandar Lampung
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.099.480
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.590		Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025		Komunikasi Publik
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.700
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.960		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.453	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.375		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.141	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.756	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.401		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 227.848	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai Inpres 1/2025	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.09.2.506142/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8333-2947-9331-0958

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506142] KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506142	KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU		
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rp. 17.099.480		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Pembelian 4 unit Rumah Negara Gol. II Tipe C dan 10 unit Rumah Negara Gol. II Tipe D di Kota Bandar Lampung		
	Rp. 17.099.480		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP. 196604231990101001

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 506142 **KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU**

Hal 1 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,065,559,000	0	2,458,933,333	568,875,468	3,027,808,801	98.77 %	37,750,199
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	570,843,000	0	417,883,830	151,842,144	569,725,974	99.80 %	1,117,026
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	31,276,000	0	24,922,700	6,268,000	31,190,700	99.73 %	85,300
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	31,276,000	0	24,922,700	6,268,000	31,190,700	99.73 %	85,300
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7,460,000	0	6,991,700	440,000	7,431,700	99.62 %	28,300
100 Tidak Ada Komponen	7,460,000	0	6,991,700	440,000	7,431,700	99.62 %	28,300
100.0A Bimbingan Teknis / Sosialisasi / FGD di Bidang Barang Milik Negara	7,460,000	0	6,991,700	440,000	7,431,700	99.62 %	28,300
521211 Belanja Bahan	5,100,000	0	4,631,700	440,000	5,071,700	99.45 %	28,300
000001. Makan Rapat Biasa Lampung	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000002. Snack Rapat Biasa	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000003. Belanja Bahan Kebutuhan Rapat, Spanduk, dll	1,900,000	0	1,431,700	440,000	1,871,700	98.51 %	28,300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	100.00	0
000004. Uang harian dalam kota lebih dari 8 jam	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	100.00	0
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	21,740,000	0	17,931,000	3,752,000	21,683,000	99.74 %	57,000
100 Tidak Ada Komponen	21,740,000	0	17,931,000	3,752,000	21,683,000	99.74 %	57,000
100.0A Bimbingan Teknis / Sosialisasi/FGD di Bidang Piutang Negara	21,740,000	0	17,931,000	3,752,000	21,683,000	99.74 %	57,000
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000012. Makan Rapat Biasa	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000013. Snack Rapat Biasa	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	13,811,000	2,932,000	16,743,000	99.66 %	57,000
000017. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu)	3,600,000	0	3,591,000	0	3,591,000	99.75 %	9,000
000018. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV Bengkulu	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000019. Biaya Transportasi Udara	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000021. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	3,000,000	0	1,500,000	1,466,000	2,966,000	98.87 %	34,000
000022. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV	2,400,000	0	1,520,000	880,000	2,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 2 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000023. Biaya Transportasi Darat	600,000	0	0	586,000	586,000	97.67 %	14,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,540,000	0	1,720,000	820,000	2,540,000	100.00	0
000025. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam	1,240,000	0	1,120,000	120,000	1,240,000	100.00	0
000027. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	1,300,000	0	600,000	700,000	1,300,000	100.00	0
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2,076,000	0	0	2,076,000	2,076,000	100.00	0
100 Tidak Ada Komponen	2,076,000	0	0	2,076,000	2,076,000	100.00	0
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,076,000	0	0	2,076,000	2,076,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,076,000	0	0	2,076,000	2,076,000	100.00	0
000008. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	1,776,000	0	0	1,776,000	1,776,000	100.00	0
000009. Transportasi	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
CD.4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	188,146,000	0	147,812,606	39,528,990	187,341,596	99.57 %	804,404
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	188,146,000	0	147,812,606	39,528,990	187,341,596	99.57 %	804,404
FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	129,066,000	0	95,033,096	33,230,500	128,263,596	99.38 %	802,404
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	129,066,000	0	95,033,096	33,230,500	128,263,596	99.38 %	802,404
005.0A Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	5,942,000	0	5,940,096	0	5,940,096	99.97 %	1,904
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,742,000	0	5,740,096	0	5,740,096	99.97 %	1,904
000028. Penginapan	2,271,000	0	2,269,096	0	2,269,096	99.92 %	1,904
000029. Uang Harian	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	100.00	0
000030. Transportasi	735,000	0	735,000	0	735,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000031. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
005.0B Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L	117,600,000	0	85,500,000	31,300,000	116,800,000	99.32 %	800,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	114,000,000	0	85,500,000	28,500,000	114,000,000	100.00	0
000033. Wakil Ketua Pokja	6,000,000	0	4,500,000	1,500,000	6,000,000	100.00	0
000034. Anggota Pokja	108,000,000	0	81,000,000	27,000,000	108,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	2,800,000	2,800,000	77.78 %	800,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 3 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000035. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3,600,000	0	0	2,800,000	2,800,000	77.78 %	800,000
005.0C Penyusunan Daftar Nominatif dan Indikatif	5,524,000	0	3,593,000	1,930,500	5,523,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	1,575,000	0	0	1,574,500	1,574,500	99.97 %	500
000037. Makan Rapat	1,075,000	0	0	1,075,000	1,075,000	100.00	0
000038. Snack Rapat Biasa	500,000	0	0	499,500	499,500	99.90 %	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,949,000	0	3,593,000	356,000	3,949,000	100.00	0
000039. Uang Harian	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	100.00	0
000040. Transportasi	735,000	0	735,000	0	735,000	100.00	0
000041. Penginapan	1,390,000	0	1,034,000	356,000	1,390,000	100.00	0
FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	30,200,000	0	28,410,000	1,788,000	30,198,000	99.99 %	2,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	30,200,000	0	28,410,000	1,788,000	30,198,000	99.99 %	2,000
005.0A Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara	30,200,000	0	28,410,000	1,788,000	30,198,000	99.99 %	2,000
521211 Belanja Bahan	3,900,000	0	3,898,000	0	3,898,000	99.95 %	2,000
000047. Makan Rapat Biasa Lampung	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000048. Snack Rapat Biasa Lampung	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000049. Belanja Bahan Kebutuhan Rapat, Spanduk, dll	2,300,000	0	2,298,000	0	2,298,000	99.91 %	2,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	16,500,000	0	15,000,000	1,500,000	16,500,000	100.00	0
000050. Honorarium Anggota PUPN C (unsur eksternal DJKN)	16,500,000	0	15,000,000	1,500,000	16,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	0	6,792,000	0	6,792,000	100.00	0
000052. Biaya Transportasi Darat	1,792,000	0	1,792,000	0	1,792,000	100.00	0
000053. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,008,000	0	2,720,000	288,000	3,008,000	100.00	0
000055. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	508,000	0	360,000	148,000	508,000	100.00	0
000057. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	2,500,000	0	2,360,000	140,000	2,500,000	100.00	0
FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindakan lanjut atas Pelaksanaan Lelang	28,880,000	0	24,369,510	4,510,490	28,880,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 4 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	28,880,000	0	24,369,510	4,510,490	28,880,000	100.00	0
100.0A Pemeriksaan Minuta Risalah Lelang	28,880,000	0	24,369,510	4,510,490	28,880,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,180,000	0	22,669,510	4,510,490	27,180,000	100.00	0
000042. Uang Harian	8,880,000	0	7,603,500	1,276,500	8,880,000	100.00	0
000043. Akomodasi	14,400,000	0	11,526,010	2,873,990	14,400,000	100.00	0
000044. Transportasi	3,900,000	0	3,540,000	360,000	3,900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
000046. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
CD.4798 Pengelolaan Aset	345,021,000	0	238,748,597	106,045,154	344,793,751	99.93 %	227,249
AAH Peraturan lainnya	19,400,000	0	15,557,000	3,819,652	19,376,652	99.88 %	23,348
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	19,400,000	0	15,557,000	3,819,652	19,376,652	99.88 %	23,348
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19,400,000	0	15,557,000	3,819,652	19,376,652	99.88 %	23,348
005.0A Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup Kanwil	10,400,000	0	6,960,000	3,416,652	10,376,652	99.78 %	23,348
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,950,000	0	6,660,000	3,266,652	9,926,652	99.77 %	23,348
000059. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	3,000,000	0	2,897,000	79,652	2,976,652	99.22 %	23,348
000060. Biaya Penginapan Luar Kota	1,800,000	0	1,212,000	588,000	1,800,000	100.00	0
000061. Biaya Transportasi Luar Kota	831,000	0	831,000	0	831,000	100.00	0
000063. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	3,000,000	0	1,720,000	1,280,000	3,000,000	100.00	0
000064. Biaya Transportasi Luar Kota	369,000	0	0	369,000	369,000	100.00	0
000065. Biaya Penginapan Luar Kota	950,000	0	0	950,000	950,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	300,000	150,000	450,000	100.00	0
000066. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 jam	450,000	0	300,000	150,000	450,000	100.00	0
005.0B Survey Lapangan dan Penilaian	9,000,000	0	8,597,000	403,000	9,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,700,000	0	8,297,000	403,000	8,700,000	100.00	0
000068. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas luar kota (Lampung)	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
000069. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	4,650,000	0	4,247,000	403,000	4,650,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 5 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
(Lampung)	4,650,000	0	4,247,000	403,000			0
000070. Biaya Transportasi Luar Kota (Lampung)	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000072. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	24,253,000	0	21,101,945	3,103,700	24,205,645	99.80 %	47,355
FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	13,131,000	0	12,557,945	571,200	13,129,145	99.99 %	1,855
100 Tidak Ada Komponen	13,131,000	0	12,557,945	571,200	13,129,145	99.99 %	1,855
100.OA Peningkatan Pejabat Fungsional Pelelang	2,188,000	0	1,616,800	571,200	2,188,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,188,000	0	1,616,800	571,200	2,188,000	100.00	0
000086. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	888,000	0	800,000	88,000	888,000	100.00	0
000087. Akomodasi	1,000,000	0	816,800	183,200	1,000,000	100.00	0
000088. Transportasi	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
100.OB Pemeriksaan Balai Lelang	8,022,000	0	8,021,145	0	8,021,145	99.99 %	855
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,022,000	0	8,021,145	0	8,021,145	99.99 %	855
000090. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	822,000	0	821,145	0	821,145	99.90 %	855
000091. Akomodasi	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
000092. Transportasi	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
100.OC Peningkatan Kapasitas Profesi Pelelang dan Balai Lelang	2,921,000	0	2,920,000	0	2,920,000	99.97 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,921,000	0	2,920,000	0	2,920,000	99.97 %	1,000
000093. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	2,663,000	0	2,663,000	0	2,663,000	100.00	0
000095. Transportasi	258,000	0	257,000	0	257,000	99.61 %	1,000
FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	11,122,000	0	8,544,000	2,532,500	11,076,500	99.59 %	45,500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	11,122,000	0	8,544,000	2,532,500	11,076,500	99.59 %	45,500
005.OA Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	11,122,000	0	8,544,000	2,532,500	11,076,500	99.59 %	45,500
521211 Belanja Bahan	7,680,000	0	5,822,000	1,812,500	7,634,500	99.41 %	45,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 6 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000074. Makan Rapat Biasa	5,160,000	0	4,367,000	793,000	5,160,000	100.00	0
000075. Snack Rapat Biasa	2,520,000	0	1,455,000	1,019,500	2,474,500	98.19 %	45,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,722,000	0	2,722,000	0	2,722,000	100.00	0
000077. Uang Harian	912,000	0	912,000	0	912,000	100.00	0
000078. Akomodasi	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	100.00	0
000079. Transportasi	650,000	0	650,000	0	650,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720,000	0	0	720,000	720,000	100.00	0
000081. Uang Harian	720,000	0	0	720,000	720,000	100.00	0
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	86,596,000	0	63,820,000	22,695,591	86,515,591	99.91 %	80,409
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	17,400,000	0	14,803,500	2,546,000	17,349,500	99.71 %	50,500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17,400,000	0	14,803,500	2,546,000	17,349,500	99.71 %	50,500
005.0A Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	17,400,000	0	14,803,500	2,546,000	17,349,500	99.71 %	50,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,300,000	0	12,643,500	606,000	13,249,500	99.62 %	50,500
000097. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000098. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Bengkulu	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000099. Biaya Transportasi Darat	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000101. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000102. Biaya Transportasi	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000103. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Lampung)	1,200,000	0	543,500	606,000	1,149,500	95.79 %	50,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,100,000	0	2,160,000	1,940,000	4,100,000	100.00	0
000104. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota lebih dari 8 jam	4,100,000	0	2,160,000	1,940,000	4,100,000	100.00	0
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	61,582,000	0	41,402,500	20,149,591	61,552,091	99.95 %	29,909
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	61,582,000	0	41,402,500	20,149,591	61,552,091	99.95 %	29,909
005.0A Survei Basis Data	12,648,000	0	12,648,000	0	12,648,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,448,000	0	10,448,000	0	10,448,000	100.00	0
000110. Akomodasi	4,640,000	0	4,640,000	0	4,640,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 7 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000111. Uang Harian	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000	100.00	0
000112. Transportasi	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
000114. Uang Harian	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
005.0B Survei DKPB	21,240,000	0	1,062,500	20,149,591	21,212,091	99.87 %	27,909
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,840,000	0	662,500	20,149,591	20,812,091	99.87 %	27,909
000115. Akomodasi	11,072,000	0	500,000	10,572,000	11,072,000	100.00	0
000116. Uang Harian	7,600,000	0	0	7,600,000	7,600,000	100.00	0
000117. Transportasi	2,168,000	0	162,500	1,977,591	2,140,091	98.71 %	27,909
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000119. Uang Harian	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
005.0C Penilaian Sumber Daya Alam	27,694,000	0	27,692,000	0	27,692,000	99.99 %	2,000
521211 Belanja Bahan	8,194,000	0	8,192,000	0	8,192,000	99.98 %	2,000
000120. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1,802,000	0	1,800,000	0	1,800,000	99.89 %	2,000
000123. Belanja Bahan Keperluan Rapat (Spanduk, dll)	3,192,000	0	3,192,000	0	3,192,000	100.00	0
000305. Snack Rapat Biasa LAMPUNG	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000306. Makan Rapat Biasa LAMPUNG	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	100.00	0
000124. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000125. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (LAMPUNG)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000126. Biaya Transportasi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	7,614,000	0	7,614,000	0	7,614,000	100.00	0
100 Tidak Ada Komponen	7,614,000	0	7,614,000	0	7,614,000	100.00	0
100.0A Penggalan Potensi Lelang kepada Stakeholder	7,614,000	0	7,614,000	0	7,614,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,714,000	0	6,714,000	0	6,714,000	100.00	0
000106. Uang Harian	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 8 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000107. Akomodasi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000108. Transportasi	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000109. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
FAK Pengelolaan Aset BUN	214,772,000	0	138,269,652	76,426,211	214,695,863	99.96 %	76,137
FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	214,772,000	0	138,269,652	76,426,211	214,695,863	99.96 %	76,137
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	214,772,000	0	138,269,652	76,426,211	214,695,863	99.96 %	76,137
005.0A Pengelolaan Kekayaan Negara lain-lain	214,772,000	0	138,269,652	76,426,211	214,695,863	99.96 %	76,137
521211 Belanja Bahan	19,400,000	0	7,125,500	12,271,263	19,396,763	99.98 %	3,237
000128. Makan Rapat Biasa	8,000,000	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	100.00	0
000129. Snack rapat biasa	8,000,000	0	1,500,000	6,496,763	7,996,763	99.96 %	3,237
000130. Fotokopi dan Penjilidan	1,300,000	0	525,500	774,500	1,300,000	100.00	0
000132. Makan Rapat Biasa	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
000133. Snack Rapat Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000134. Fotokopi dan Penjilidan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	113,100,000	0	68,400,000	44,700,000	113,100,000	100.00	0
000136. Honorarium Wakil Ketua TAD (ditetapkan dengan Kepmen)	19,200,000	0	9,900,000	9,300,000	19,200,000	100.00	0
000137. Honorarium Sekretaris TAD (ditetapkan dengan Kepmen)	8,100,000	0	2,400,000	5,700,000	8,100,000	100.00	0
000138. Honorarium Anggota TAD (Non Kemenkeu)	85,800,000	0	56,100,000	29,700,000	85,800,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,400,000	0	10,800,000	3,600,000	14,400,000	100.00	0
000140. Uang Balas Jasa Waker	14,400,000	0	10,800,000	3,600,000	14,400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,072,000	0	47,564,152	15,434,948	62,999,100	99.88 %	72,900
000144. Uang Harian	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000	100.00	0
000145. Penginapan	11,600,000	0	11,118,152	481,848	11,600,000	100.00	0
000146. Transportasi	4,500,000	0	4,243,000	257,000	4,500,000	100.00	0
000148. Uang Harian	6,080,000	0	4,512,000	1,568,000	6,080,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 9 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000149. Penginapan	4,000,000	0	1,416,000	2,584,000	4,000,000	100.00	0
000150. Transportasi	5,000,000	0	1,008,000	3,919,100	4,927,100	98.54 %	72,900
000152. Uang Harian	9,120,000	0	7,232,000	1,888,000	9,120,000	100.00	0
000153. Penginapan	8,652,000	0	4,913,000	3,739,000	8,652,000	100.00	0
000154. Transportasi	5,000,000	0	4,002,000	998,000	5,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	0	4,380,000	420,000	4,800,000	100.00	0
000157. Uang Transport dalam Kota	3,000,000	0	2,580,000	420,000	3,000,000	100.00	0
000159. Uang Transport dalam kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000162. Uang Transport dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
CD.4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	6,400,000	0	6,399,927	0	6,399,927	100.00	73
ACE Perizinan Profesi	6,400,000	0	6,399,927	0	6,399,927	100.00	73
ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	6,400,000	0	6,399,927	0	6,399,927	100.00	73
100 Tidak Ada Komponen	6,400,000	0	6,399,927	0	6,399,927	100.00	73
100.0A Pemberian Rekomendasi/Perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	6,400,000	0	6,399,927	0	6,399,927	100.00	73
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	0	5,999,927	0	5,999,927	100.00	73
000165. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
000166. Uang Transport Darat	3,500,000	0	3,499,927	0	3,499,927	100.00	73
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000167. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Lampung)	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	2,494,716,000	0	2,041,049,503	417,033,324	2,458,082,827	98.53 %	36,633,173
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	23,100,000	0	21,267,135	1,832,000	23,099,135	100.00	865
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,100,000	0	21,267,135	1,832,000	23,099,135	100.00	865
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	23,100,000	0	21,267,135	1,832,000	23,099,135	100.00	865
100 Tidak Ada Komponen	23,100,000	0	21,267,135	1,832,000	23,099,135	100.00	865
100.0A Pelaksanaan Advokasi Hukum	23,100,000	0	21,267,135	1,832,000	23,099,135	100.00	865
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,700,000	0	20,867,135	1,832,000	22,699,135	100.00	865

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 10 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000169. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	9,000,000	0	7,804,800	1,195,000	8,999,800	100.00	200
000170. Biaya Transportasi Darat	3,000,000	0	2,383,335	616,000	2,999,335	99.98 %	665
000171. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Gol. III	3,000,000	0	2,979,000	21,000	3,000,000	100.00	0
000173. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000174. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Gol. III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000175. Biaya Transportasi	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000176. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,426,966,000	0	1,988,932,732	401,696,724	2,390,629,456	98.50 %	36,336,544
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,871,303,000	0	1,715,284,735	155,035,729	1,870,320,464	99.95 %	982,536
EBA.002 Kerumahtangaan	107,747,000	0	85,150,447	22,238,410	107,388,857	99.67 %	358,143
100 Tidak Ada Komponen	107,747,000	0	85,150,447	22,238,410	107,388,857	99.67 %	358,143
100.0A Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	107,747,000	0	85,150,447	22,238,410	107,388,857	99.67 %	358,143
521211 Belanja Bahan	41,553,000	0	36,331,469	5,140,014	41,471,483	99.80 %	81,517
000236. Biaya Cetakan Penggandaan dan Penjilidan	19,793,000	0	14,571,469	5,140,014	19,711,483	99.59 %	81,517
000237. Makan siang/kudapat rapat	5,120,000	0	5,120,000	0	5,120,000	100.00	0
000238. Snack/Kudapan Rapat	16,640,000	0	16,640,000	0	16,640,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	100.00	0
000239. Honorarium Narasumber Pembahas (Eselon III)	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000240. Honorarium Rohaniawan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,644,000	0	41,958,978	16,616,396	58,575,374	99.88 %	68,626
000242. Biaya Transportasi Udara dinas luar kota (jakarta)	15,600,000	0	13,585,360	2,014,640	15,600,000	100.00	0
000243. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	16,000,000	0	13,813,000	2,187,000	16,000,000	100.00	0
000244. Biaya Transportasi darat luar kota (lampung)	3,200,000	0	1,479,500	1,720,500	3,200,000	100.00	0
000246. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu)	5,044,000	0	2,507,118	2,468,256	4,975,374	98.64 %	68,626

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 11 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000247. Biaya Penginapan perjalanan dinas luar kota (Bengkulu)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000248. Biaya Transportasi Udara perjalanan dinas luar kota (Bengkulu)	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	100.00	0
000250. Uang harian perjalanan dinas luar kota (jakarta)	9,600,000	0	1,374,000	8,226,000	9,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,400,000	0	5,710,000	482,000	6,192,000	96.75 %	208,000
000251. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	6,400,000	0	5,710,000	482,000	6,192,000	96.75 %	208,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,763,556,000	0	1,630,134,288	132,797,319	1,762,931,607	99.96 %	624,393
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,763,556,000	0	1,630,134,288	132,797,319	1,762,931,607	99.96 %	624,393
002.0A Operasional Kantor	1,081,201,000	0	991,820,839	88,825,715	1,080,646,554	99.95 %	554,446
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	888,961,000	0	820,945,494	67,989,051	888,934,545	100.00	26,455
000177. Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	100.00	0
000178. Pakaian Kerja Satpam	26,334,000	0	26,308,772	25,000	26,333,772	100.00	228
000179. Pakaian Dinas Pegawai/ Seragam PNS	91,596,000	0	91,595,628	0	91,595,628	100.00	372
000180. Uang Lembur	5,440,000	0	5,280,000	160,000	5,440,000	100.00	0
000181. Uang Makan Lembur	1,054,000	0	682,000	372,000	1,054,000	100.00	0
000182. Honorarium Satpam dan Pengemudi	357,786,000	0	328,387,129	29,398,871	357,786,000	100.00	0
000183. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	289,120,000	0	255,557,840	33,561,380	289,119,220	100.00	780
000184. Jamuan Tamu	28,691,000	0	24,194,125	4,471,800	28,665,925	99.91 %	25,075
000185. keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Lampung)	75,540,000	0	75,540,000	0	75,540,000	100.00	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33,048,000	0	28,797,228	4,247,464	33,044,692	99.99 %	3,308
000186. Vitamin dan Daya Tahan Tubuh	33,048,000	0	28,797,228	4,247,464	33,044,692	99.99 %	3,308
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,107,000	0	5,208,500	3,489,500	8,698,000	95.51 %	409,000
000187. Biaya Pengiriman Surat	9,107,000	0	5,208,500	3,489,500	8,698,000	95.51 %	409,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,008,000	0	66,660,000	6,240,000	72,900,000	99.85 %	108,000
000189. Honorarium Ketua/Wakil Ketua(UAPPA/Barang-W)	1,800,000	0	1,650,000	150,000	1,800,000	100.00	0
000190. Honorarium Anggota/Petugas(UAPPA/Barang-W)	5,400,000	0	4,950,000	450,000	5,400,000	100.00	0
000192. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat	4,320,000	0	3,960,000	360,000	4,320,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 12 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	3,960,000	360,000			0
000194. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	7,480,000	680,000	8,160,000	100.00	0
000195. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	15,350,000	0	13,980,000	1,370,000	15,350,000	100.00	0
000196. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	14,940,000	0	13,610,000	1,330,000	14,940,000	100.00	0
000197. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	6,100,000	0	5,570,000	530,000	6,100,000	100.00	0
000198. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	5,350,000	0	4,880,000	470,000	5,350,000	100.00	0
000199. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	7,988,000	0	7,180,000	700,000	7,880,000	98.65 %	108,000
000201. Honorarium Penanggung Jawab(UAPPA/Barang-W)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000202. Honorarium Koordinator(UAPPA/Barang-W)	2,400,000	0	2,200,000	200,000	2,400,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	49,560,000	0	49,560,000	0	49,560,000	100.00	0
000330. Pelaksanaan Medical Checkup	49,560,000	0	49,560,000	0	49,560,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,517,000	0	20,649,617	6,859,700	27,509,317	99.97 %	7,683
000203. ATK	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000204. Computer Supplies	22,517,000	0	15,649,617	6,859,700	22,509,317	99.97 %	7,683
002.0B Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310,601,000	0	279,046,401	31,497,410	310,543,811	99.98 %	57,189
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310,601,000	0	279,046,401	31,497,410	310,543,811	99.98 %	57,189
000205. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	42,430,000	0	42,430,000	0	42,430,000	100.00	0
000206. Pemeliharaan CCTV	3,324,000	0	3,324,000	0	3,324,000	100.00	0
000207. Pemeliharaan APAR/ Alat Pemadam Api Ringan	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000	100.00	0
000208. Pemeliharaan AC Split	18,300,000	0	16,733,341	1,566,659	18,300,000	100.00	0
000209. Pemeliharaan Genset 100 KVA	20,300,000	0	13,997,665	6,302,335	20,300,000	100.00	0
000216. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	144,000,000	0	139,234,016	4,763,200	143,997,216	100.00	2,784
000217. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	25,100,000	0	14,207,349	10,839,046	25,046,395	99.79 %	53,605
000218. Pemeliharaan Inventaris Kantor	4,080,000	0	1,512,400	2,566,800	4,079,200	99.98 %	800
000221. Pemeliharaan Lift	50,142,000	0	44,682,630	5,459,370	50,142,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 13 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315,244,000	0	309,327,489	5,915,500	315,242,989	100.00	1,011
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315,244,000	0	309,327,489	5,915,500	315,242,989	100.00	1,011
000224. Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Bertingkat	294,678,000	0	291,919,489	2,758,511	294,678,000	100.00	0
000225. Pemeliharaan Halaman Gedung Bangunan Kantor	2,070,000	0	0	2,068,989	2,068,989	99.95 %	1,011
000226. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	17,408,000	0	17,408,000	0	17,408,000	100.00	0
000307. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pos Satpam (Lampung)	1,088,000	0	0	1,088,000	1,088,000	100.00	0
002.0F Sewa Lainnya	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000227. Sewa Gudang BMN	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
002.TJ Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)	26,510,000	0	19,939,559	6,558,694	26,498,253	99.96 %	11,747
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26,510,000	0	19,939,559	6,558,694	26,498,253	99.96 %	11,747
000232. Pemeliharaan PC/Laptop/Tablet	22,640,000	0	17,039,559	5,588,694	22,628,253	99.95 %	11,747
000233. Pemeliharaan Printer	3,870,000	0	2,900,000	970,000	3,870,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	555,663,000	0	273,647,997	246,660,995	520,308,992	93.64 %	35,354,008
EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	535,663,000	0	253,647,997	246,660,995	500,308,992	93.40 %	35,354,008
100 Tidak Ada Komponen	535,663,000	0	253,647,997	246,660,995	500,308,992	93.40 %	35,354,008
100.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran	535,663,000	0	253,647,997	246,660,995	500,308,992	93.40 %	35,354,008
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535,663,000	0	253,647,997	246,660,995	500,308,992	93.40 %	35,354,008
000255. AC Split 0,5 PK	6,798,000	0	6,797,640	0	6,797,640	99.99 %	360
000308. Locker	42,000,000	0	0	34,999,995	34,999,995	83.33 %	7,000,005
000309. Bracket standing peralatan	1,749,000	0	1,698,300	0	1,698,300	97.10 %	50,700
000310. Camera conference	13,165,000	0	0	8,658,000	8,658,000	65.77 %	4,507,000
000311. Camera Digital	38,000,000	0	0	34,965,000	34,965,000	92.01 %	3,035,000
000312. Meja Rapat	46,800,000	0	46,282,012	0	46,282,012	98.89 %	517,988
000313. Kursi Rapat Pimpinan	6,908,000	0	6,846,470	0	6,846,470	99.11 %	61,530
000314. Kursi Rapat	58,850,000	0	57,091,741	0	57,091,741	97.01 %	1,758,259

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 14 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000315. LCD Projector	28,065,000	0	0	23,421,000	23,421,000	83.45 %	4,644,000
000316. mic wireless meja	50,400,000	0	0	49,617,000	49,617,000	98.45 %	783,000
000317. meja tamu	32,960,000	0	0	31,600,000	31,600,000	95.87 %	1,360,000
000318. AC Standing	66,000,000	0	65,999,990	0	65,999,990	100.00	10
000319. set meja tamu/sice	37,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	75.68 %	9,000,000
000320. sofa 1 dudukan	8,000,000	0	0	7,900,000	7,900,000	98.75 %	100,000
000321. kulkas	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	100.00	0
000322. dispenser	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000323. set meja makan	13,300,000	0	0	11,500,000	11,500,000	86.47 %	1,800,000
000324. mesin cuci	3,370,000	0	3,370,000	0	3,370,000	100.00	0
000325. AC split 1 PK	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000	100.00	0
000326. AC Split 1/2 PK	23,600,000	0	23,599,997	0	23,599,997	100.00	3
000327. tempat tidur	16,598,000	0	0	16,000,000	16,000,000	96.40 %	598,000
000328. meja rapat	6,900,000	0	6,854,629	0	6,854,629	99.34 %	45,371
000333. Meja Rapat	8,600,000	0	8,507,218	0	8,507,218	98.92 %	92,782
EBB.003 Kendaraan Bermotor	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
100 Tidak Ada Komponen	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
100.KA Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000267. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	33,651,000	0	20,194,816	13,166,600	33,361,416	99.14 %	289,584
BMB Komunikasi Publik	33,651,000	0	20,194,816	13,166,600	33,361,416	99.14 %	289,584
BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	5,900,000	0	2,340,000	3,400,000	5,740,000	97.29 %	160,000
100 Tidak Ada Komponen	5,900,000	0	2,340,000	3,400,000	5,740,000	97.29 %	160,000
100.0A Pelaksanaan Edukasi dan Komunikasi	5,450,000	0	2,340,000	2,990,000	5,330,000	97.80 %	120,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,000,000	0	1,980,000	2,990,000	4,970,000	99.40 %	30,000
000269. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	2,500,000	0	730,000	1,770,000	2,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 15 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
(Lampung)	2,500,000	0	730,000	1,770,000			0
000270. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Gol III (Lampung)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	100.00	0
000271. Biaya Transportasi Luar Kota (Lampung)	1,250,000	0	0	1,220,000	1,220,000	97.60 %	30,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	360,000	0	360,000	80.00 %	90,000
000272. Uang Harian Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam	450,000	0	360,000	0	360,000	80.00 %	90,000
100.0B DJKN Goes to Campus (Daring)	450,000	0	0	410,000	410,000	91.11 %	40,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	0	410,000	410,000	91.11 %	40,000
000276. Uang Harian Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam	450,000	0	0	410,000	410,000	91.11 %	40,000
BMB.002 Kehumasan	14,951,000	0	8,920,000	5,971,600	14,891,600	99.60 %	59,400
100 Tidak Ada Komponen	14,951,000	0	8,920,000	5,971,600	14,891,600	99.60 %	59,400
100.0A Peliputan Berita Mengenai Kegiatan DJKN	8,375,000	0	7,120,000	1,200,000	8,320,000	99.34 %	55,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	100.00	0
000284. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000	100.00	0
000285. Biaya Penginapan Luar Kota (Lampung)	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
000286. Biaya Transportasi Luar Kota (Lampung)	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,475,000	0	1,220,000	1,200,000	2,420,000	97.78 %	55,000
000287. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	2,475,000	0	1,220,000	1,200,000	2,420,000	97.78 %	55,000
100.0B Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Hubungan Media	6,576,000	0	1,800,000	4,771,600	6,571,600	99.93 %	4,400
521211 Belanja Bahan	2,376,000	0	0	2,371,600	2,371,600	99.81 %	4,400
000288. Belanja Bahan Kebutuhan Konferensi Pers dan Hubungan Media (Spanduk, dll)	2,376,000	0	0	2,371,600	2,371,600	99.81 %	4,400
522151 Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
000290. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000292. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
BMB.003 Pameran/Eksibisi	12,800,000	0	8,934,816	3,795,000	12,729,816	99.45 %	70,184

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 16 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	12,800,000	0	8,934,816	3,795,000	12,729,816	99.45 %	70,184
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,800,000	0	8,934,816	3,795,000	12,729,816	99.45 %	70,184
521211 Belanja Bahan	7,100,000	0	3,259,816	3,795,000	7,054,816	99.36 %	45,184
000277. Belanja keperluan pameran (Spanduk ,corporate identity dll)	3,900,000	0	169,816	3,730,184	3,900,000	100.00	0
000278. Snack Rapat Biasa LAMPUNG	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000279. Makan Rapat Biasa LAMPUNG	1,600,000	0	1,490,000	64,816	1,554,816	97.18 %	45,184
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,700,000	0	5,675,000	0	5,675,000	99.56 %	25,000
000280. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000281. Biaya Transportasi Luar Kota (Lampung)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000282. Biaya Penginapan Luar Kota (Lampung)	1,200,000	0	1,175,000	0	1,175,000	97.92 %	25,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10,999,000	0	10,654,820	338,000	10,992,820	99.94 %	6,180
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,999,000	0	10,654,820	338,000	10,992,820	99.94 %	6,180
EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,999,000	0	10,654,820	338,000	10,992,820	99.94 %	6,180
100 Tidak Ada Komponen	10,999,000	0	10,654,820	338,000	10,992,820	99.94 %	6,180
100.0A Implementasi Manajemen Risiko	2,677,000	0	2,677,000	0	2,677,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,277,000	0	2,277,000	0	2,277,000	100.00	0
000294. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000295. Biaya Transportasi	277,000	0	277,000	0	277,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000296. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Lampung)	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
100.0B Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal	8,322,000	0	7,977,820	338,000	8,315,820	99.93 %	6,180
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,122,000	0	7,777,820	338,000	8,115,820	99.92 %	6,180
000298. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000299. Biaya Transportasi	412,000	0	67,820	338,000	405,820	98.50 %	6,180
000301. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000302. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Gol. III	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Hal 17 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000303. Biaya Transportasi	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000304. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Lampung)	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	506142 KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,952,331,000 2,507,249,809 (84.92%)	17,882,991,000 520,308,992 (2.91%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,835,322,000 3,027,558,801 (14.53%)
		SISA	0	445,081,191	17,362,682,008	0	0	0	0	0	0	17,807,763,199
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	2,952,331,000 2,507,249,809 (84.92%)	17,882,991,000 520,308,992 (2.91%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	20,835,322,000 3,027,558,801 (14.53%)
		SISA	0	445,081,191	17,362,682,008	0	0	0	0	0	0	17,807,763,199



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-14/KN/2025

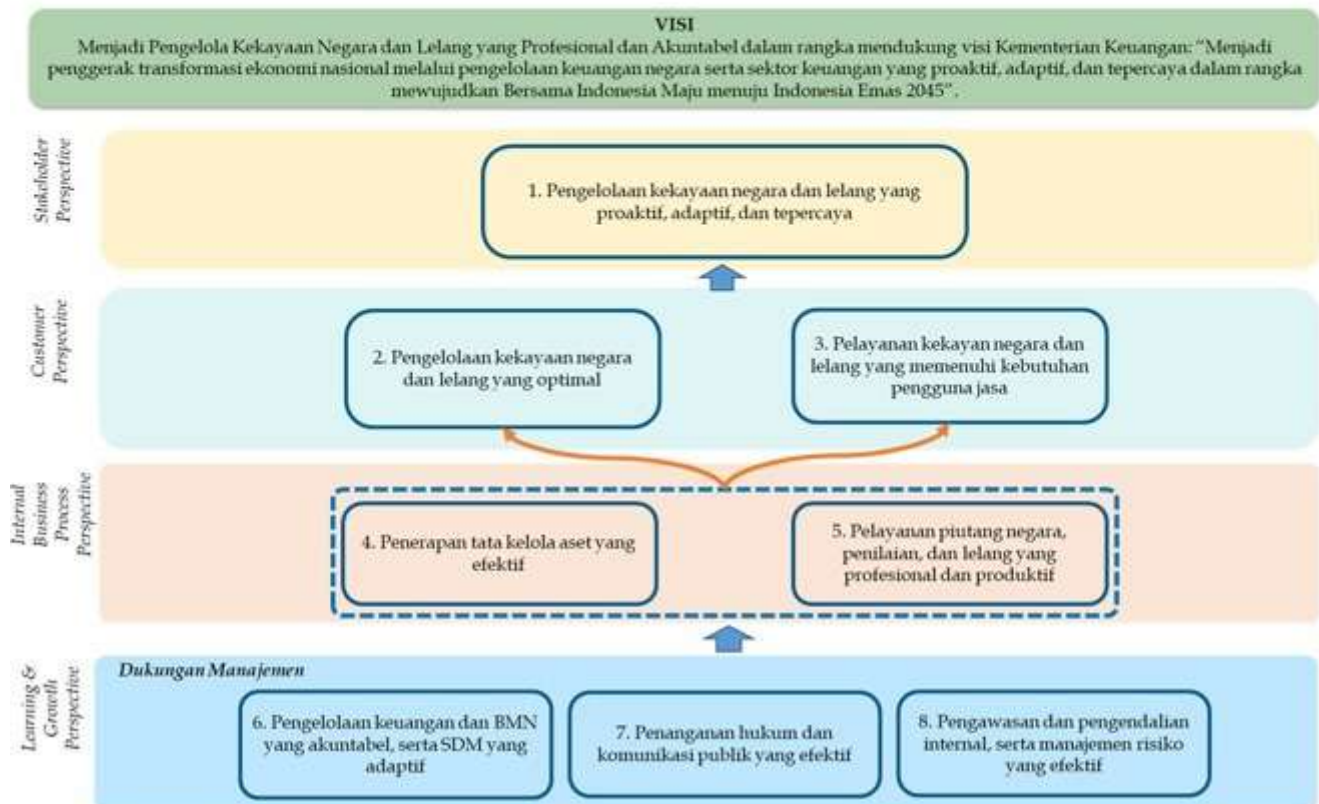
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp742,902,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp68,550,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp243,937,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp417,315,000 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp31,100,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp19,484,375,000
----------------------------	------------------

Kegiatan

- | | |
|--|------------------|
| 1. Legislasi dan Litigas | Rp23,100,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp19,366,149,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp73,126,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp22,000,000 |

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19720902 199301 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,2 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

19720902 199301 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	134 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,2 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

19720902 199301 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14a/KN/2025**

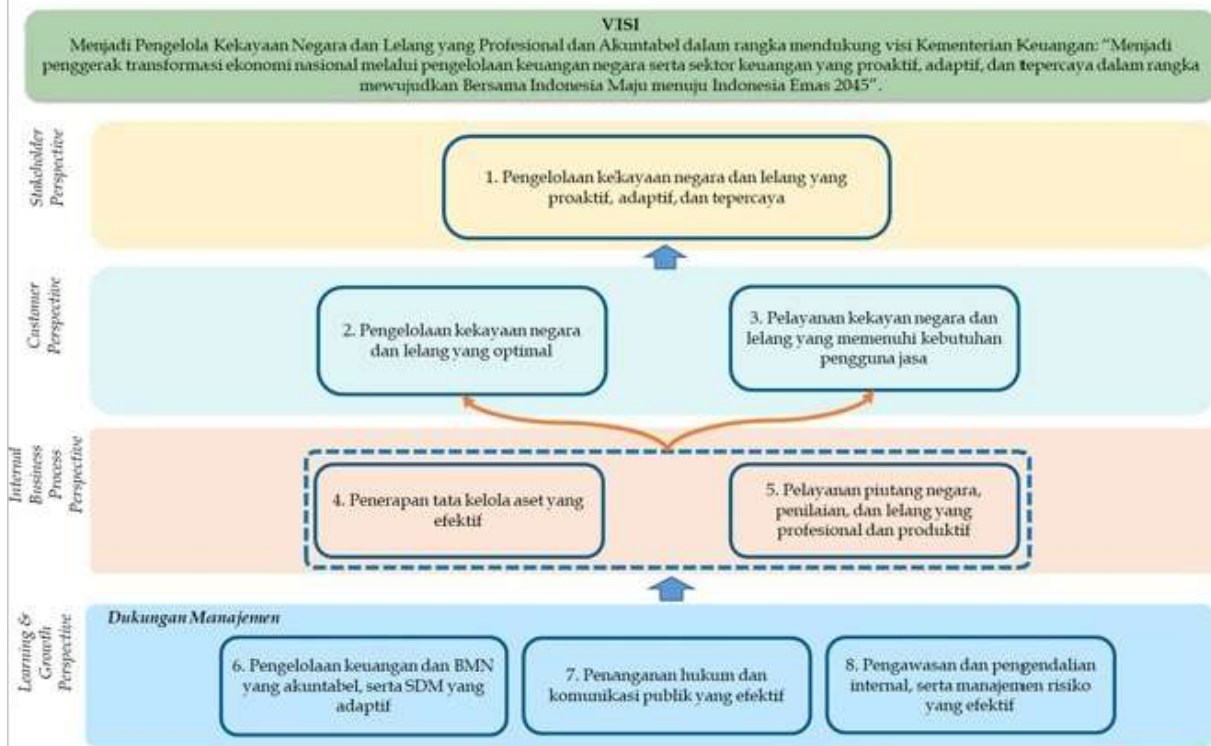
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)
		2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,26 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3c-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6c-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp742,902,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp68,550,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp243,937,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp417,315,000 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp31,100,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp19,484,375,000

Kegiatan

- | | |
|--|------------------|
| 1. Legislasi dan Litigas | Rp23,100,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp19,366,149,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp73,126,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp22,000,000 |

Bandar Lampung, 18 November 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,26 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Bandar Lampung, 18 November 2025

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Bandar Lampung, 18 November 2025

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Cuti Asih		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19740317 199403 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp570,2 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,26 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



	kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Bandar Lampung, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Cuti Asih

19740317 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	128 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp36,4 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp570,2 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,26 M)
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Bandar Lampung, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Cuti Asih

19740317 199403 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG DAN BENGKULU

JALAN RADEN INTAN NOMOR 121, KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35111;
TELEPON (0721) 242107; FAKSIMILE (0721) 242669; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-69/WKN.05/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Revisi Laporan Capaian dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
Tanggal : 20 Januari 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas kami Nomor ND-36/WKN.05/2026 tanggal 10 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi Periode Triwulan IV 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam Nota Dinas dimaksud kami menyampaikan bahwa nilai sementara NKO Triwulan IV Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu adalah sebesar **114,80**, hal tersebut dikarenakan beberapa nilai realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih dalam proses di tingkat Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJKN;
2. berkenaan dengan telah disampaikannya perhitungan IKU secara resmi dari Kantor Pusat DJKN, berikut terlampir kami sampaikan revisi Laporan Capaian Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, dengan NKO sebesar **115,86**. Adapun rincian perubahan adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian IKU **Indeks Integritas** Triwulan IV Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu telah tercapai sebesar **105,29%**, hal ini sesuai dengan nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND-54/IJ.1/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyampaian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2025;
 - b. Capaian IKU **Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko** tercapai sebesar **120,70%** dengan berdasarkan nota dinas Ibu Nomor ND-86/KN.1/2025 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Hasil Reviu Implementasi Manajemen Kinerja dan Risiko Unit Eselon II dan Non-Eselon di Lingkungan DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2025, dimana realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Triwulan IV Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sebesar 96,56 dari target 80;
 - c. Capaian IKU **Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan** tercapai sebesar **169,23%** sesuai dengan nota dinas Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-33/KN.7/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Capaian IKU Mandatori Kehumasan Efektifitas Ekosistem Kehumasan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Kantor Vertikal DJKN Triwulan IV Tahun 2025 dimana Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mendapatkan realisasi sebesar 102,50 atau nilai konversi sebesar 5,5 dari target sebesar 3,55;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu berkomitmen menjaga integritas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan serta menolak segala bentuk gratifikasi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Lampung
dan Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik
Cuti Asih

Tembusan:
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT), JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710;

CALL CENTER (KEMENKEU PRIME): 134; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-561/KN.1/2026

Yth. : 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN
3. Direktur Utama LMAN
4. Para Kepala KPKNL
5. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan
Tata Usaha

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Perubahan Realisasi IKU Indeks Integritas dan Nilai Kinerja Organisasi
Tahun 2025

Tanggal : 12 Februari 2026

Sehubungan dengan nota dinas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-22/IJ/2026 hal Penyampaian Update Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- Melalui nota dinas tersebut, Inspektur Jenderal menyampaikan penyesuaian data nilai indeks integritas dan capaian IKU untuk Kementerian Keuangan dan UE I/LNSW, dengan perubahan pada DJKN sebagai berikut.

Target IKU Indeks Integritas 2025	Semula		Menjadi	
	Realisasi	Capaian IKU	Realisasi	Capaian IKU
89,37	94,09	105,29	94,12	105,32

- Berkenaan dengan perubahan tersebut, kami mohon bantuan Saudara/i untuk menugaskan pengelola kinerja organisasi guna melakukan:
 - penyesuaian data realisasi IKU Indeks Integritas pada kertas kerja perhitungan NKO dan Laporan Capaian Kinerja (LCK) Tahun 2025;
 - dalam hal perubahan realisasi IKU Indeks Integritas menyebabkan perubahan NKO Tahun 2025, dimohon agar melakukan penyesuaian data realisasi IKU tersebut pada aplikasi Satu Kemenkeu pada menu NKO & LCK untuk periode bulan Desember Tahun 2025;
 - perubahan tersebut di atas agar dilakukan paling lambat tanggal **13 Februari 2026**.
- Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kami mohon bantuan Saudara/i untuk melakukan revisi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 dan menyampaikan kembali kepada kami melalui tautan t.kemenkeu.go.id/LAKINDJKN paling lambat tanggal **20 Februari 2026**.

Sekretariat DJKN berkomitmen menjaga integritas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan harmonis kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas perhatian, komitmen, dan sinergi terbaik yang Saudara/i berikan, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DJKN



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
PERIODE S.D. DESEMBER
TAHUN 2025

Kode IKU	Tingkat Kendali	IKU / SS	Realisasi						
			Target Raw Data Q4	Target Q4 (%)	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Stakeholder Perspective (30%)									33,46%
1		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							111,55%
1a-CP	P/L	Indeks integritas		100	105,32	19%	58%	105%	105,32%
1b-CP	P/M	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	36.448.780.000	100%	126,73%	14%	42%	126,73%	120,00%
Customer Perspective (20%)									23,29%
2		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							114,62%
2a-CP	P/L	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100%	105,71%	19%	37%	105,71%	106%
2b-CP	P/L	Persentase Realisasi Pokok Lelang	570.249.000.000	100%	119,56%	19%	37%	119,56%	120%
2c-CP	P/M	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	2.266.292.000	100%	128,07%	14%	27%	128,07%	120%
3		Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							118,29%
3a-N	P/M	Indeks kepuasan pengguna layanan		77	97,76	14%	33%	126,96%	120%
3b-N	P/M	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		74	105,01	14%	33%	141,90%	120%
3c-N	P/M	Tingkat kompetensi penilai pemerintah		70%	80,40%	14%	33%	114,86%	115%
Internal Process Perspective (25%)									29,37%
4		Penerapan tata kelola aset yang efektif							114,96%
4a-CP	P/M	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	655	100%	109,92%	14%	50%	109,92%	110%
4b-N	P/M	Persentase Evaluasi Kinerja BMN		100%	120,09%	14%	50%	120,09%	120%
5		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%
5a-CP	P/M	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	75	100%	130,53%	14%	33%	130,53%	120%
5b-CP	P/M	Tingkat kualitas layanan penilaian		70%	103,95%	14%	33%	148,50%	120%
5c-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang		80%	98,51%	14%	33%	123,14%	120%
Learning & Growth Perspective (25%)									29,74%
6		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							120%
6a-CP	P/M	Indeks kualitas kinerja anggaran		100	120	14%	33%	120,00%	120%
6b-N	P/M	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		100	120	14%	33%	120,00%	120%
6c-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		80%	100,00%	14%	33%	125,00%	120%
7		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							116,93%
7a-CP	P/M	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		3,55	6,01	14%	50%	169,23%	120%
7b-N	P/M	Indeks penanganan permasalahan hukum		100	113,85	14%	50%	113,85%	113,85%
8		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							120%
8a-N	P/M	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		80	96,562	14%	100%	120,70%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									115,87%

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
TAHUN 2025**

Kode IKU	Tingkat Kendali	IKU / SS	Target 2025	Capaian Q1 (s.d. 31 Maret)	Capaian Semester 1 (s.d. 30 Juni)	Q3 (s.d. 30 September)	Q4 (s.d. 31 Desember)
1		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
1a-CP	P/L	Indeks integritas		100	100	100	100
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	100	100	117	120	105,32
		KPKNL Bengkulu	100	100	117	111	105,32
		KPKNL Bandar Lampung	100	100	117	111	105,32
		KPKNL Metro	100	100	120	100	105,32
		Capaian IKU		100%	117%	120%	105,32%
1b-CP	P/M	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang					
		Target PNB BMN	22.732.000.000	2.273.200.000	7.819.600.000	14.139.200.000	22.732.000.000,00
		Realisasi PNB BMN	22.732.000.000	4.544.421.696	11.318.226.761	17.979.513.589	29.111.192.130,00
	a.	KPKNL Bengkulu	5.125.000.000	646.741.204,00	2.078.319.497,00	3.736.333.405,00	7.104.287.910,00
		KPKNL Bandar Lampung	12.607.000.000	1.997.909.756,00	4.947.104.609,00	9.295.896.547,00	15.944.107.741,00
		KPKNL Metro	5.000.000.000	1.899.770.736,00	4.292.802.655,00	4.947.283.637,00	6.062.796.479,00
		Target PNB Piutang Negara	7.780.000	1.500.000	3.470.000	5.420.000	7.780.000,00
	b.	Realisasi PNB Piutang Negara		5.766.673	12.139.401	25.955.753	40.753.201,80
		KPKNL Bengkulu	780.000	109.901,00	2.155.356,00	10.566.264,00	12.648.082,00
		KPKNL Bandar Lampung	4.000.000	2.207.096,00	3.807.096,00	5.885.265,00	15.419.077,80
		KPKNL Metro	3.000.000	3.449.676,00	6.176.949,00	9.504.224,00	12.686.042,00
	c.	Target PNB Lelang	13.709.000.000	1.370.900.000	4.112.700.000	8.225.400.000	13.709.000.000,00
		Realisasi PNB Lelang		4.745.942.010	8.081.963.804,00	13.098.956.823	17.039.760.524,00
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	1.379.000.000	448.131.748,00	876.558.908,00	1.259.319.938,00	1.640.422.958,00
		KPKNL Bengkulu	1.845.000.000	349.235.535,00	654.527.460,00	1.186.721.921,00	1.714.795.810,00
		KPKNL Bandar Lampung	8.100.000.000	3.445.558.294,00	5.225.842.118,00	8.435.441.303,00	10.876.891.087,00
		KPKNL Metro	2.385.000.000	503.016.433,00	1.325.035.318,00	2.217.473.661,00	2.807.650.669,00
	Total	Jumlah target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	36.448.780.000	3.645.600.000	11.935.770.000	22.370.020.000	36.448.780.000,00
		Jumlah realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		9.296.130.379	19.412.329.966	31.104.426.165	46.191.705.855,80
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	1.379.000.000	448.131.748	876.558.908,00	1.259.319.938,00	1.640.422.958,00
		KPKNL Bengkulu	6.970.780.000	996.086.640	2.735.002.313,00	4.933.621.590,00	8.831.731.802,00
		KPKNL Bandar Lampung	20.711.000.000	5.445.675.146	10.176.753.823,00	17.737.223.115,00	26.836.417.905,80
		KPKNL Metro	7.388.000.000	2.406.236.845	5.624.014.922,00	7.174.261.522,00	8.883.133.190,00
		Capaian IKU		255%	162,64%	139,05%	126,73%
2		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
2a-CP	P/L	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					
		Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan					
	a.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu		0			
		KPKNL Bengkulu		17	2,38	2,44	2,46
		KPKNL Bandar Lampung		0	88	91	174
		KPKNL Metro		0	3	2,83	3,29
	b.	Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan					
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu		48			
		KPKNL Bengkulu		22	0,73	0,62	0,76
		KPKNL Bandar Lampung		14	24	27	36
		KPKNL Metro		9	0	0	0
	Total	Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan	100%	50%	60%	80%	100%
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu		118,40%	104,17%	103,82%	105,71%
		KPKNL Bengkulu		134,85%	103,89%	101,88%	105,64%
		KPKNL Bandar Lampung		111,76%	107,69%	106,76%	104,81%
		KPKNL Metro		90,74%	97,22%	98,06%	107,86%
		Capaian IKU		118,40%	104,17%	103,82%	105,71%
2b-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang					
		Jumlah target Realisasi Pokok Lelang	570.249.000.000	57.024.900.000	171.074.700.000	342.149.400.000	570.249.000.000,00
		Jumlah realisasi Realisasi Pokok Lelang		191.451.469.486	340.251.991.931	524.170.045.651	681.769.471.698,00
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	232.949.000.000	74.688.624.667	146.093.151.333	209.886.656.333,00	273.402.331.333,00
		KPKNL Bengkulu	54.600.000.000	10.141.981.654	19.551.721.584	34.282.492.378	49.512.206.005,00
		PL 1	35.600.000.000	7.520.385.754	13.925.868.884	24.135.560.578	36.270.595.105,00
		Pegadaian	19.000.000.000	2.621.595.900	5.625.852.700	10.146.931.800	13.241.610.900,00
		KPKNL Bandar Lampung	222.100.000.000	92.761.547.527	140.269.651.851	222.905.023.382	284.493.029.357,00
		PL 1	173.900.000.000	84.466.785.427	125.488.190.351	198.462.797.382	251.460.944.757,00
		Pegadaian	48.200.000.000	8.294.762.100	14.781.461.500	24.442.226.000	33.032.084.600,00
		KPKNL Metro	60.600.000.000	13.859.315.638	34.337.467.163	57.095.873.558	74.361.905.003,00
		PL 1	49.100.000.000	10.241.459.438	29.604.824.363	49.803.595.158	64.149.580.003,00
		Pegadaian	11.500.000.000	3.617.856.200	4.732.642.800	7.292.278.400	10.212.325.000,00
		Capaian IKU		335,73%	198,89%	153,20%	119,56%
2c-CP	P/M	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara					
		Target penurunan nilai saldo piutang negara		1.410.000.000	1.720.000.000	1.990.000.000	2.266.292.000,00
		Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara		1.815.784.690	1.915.493.889	2.262.291.799	2.902.375.828,26
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	2.210.000.000	1.815.784.690	1.915.493.889	2.262.291.799	2.902.375.828,26
		KPKNL Bengkulu	210.000.000	87.352.617	142.269.087	279.991.658	371.677.649,00
		KPKNL Bandar Lampung	600.000.000	381.127.030	397.127.030	520.383.087,19	748.132.079,19
		KPKNL Metro	1.400.000.000	1.347.305.044	1.376.097.772	1.461.917.054	1.782.566.100,00
		Capaian IKU		128,78%	111,37%	113,68%	128,07%
3		Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-N	P/M	Indeks kepuasan pengguna layanan		77	77	77	77
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	77	97,29	98,8	97,4	97,54
		KPKNL Bengkulu	77	95	96,8	95,8	96,2
		KPKNL Bandar Lampung	77	94,75	95,8	95,8	94,8
		KPKNL Metro	77	92,43	94,32	94,88	95,11
		Capaian IKU					
3b-N	P/M	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		74	74	74	74
		Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	74	600	283,33	180	133,33
		Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang	74	120	90	120	97,1
		Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	74	94,01	91,59	93,33	92,57
		Pengelolaan Piutang Negara	74	100	97,85	97,81	97,02
		Hanya Untuk Pemantauan					
		KPKNL Bengkulu	74	90	96,1	94,23	94,24
		KPKNL Bandar Lampung	74	100	93,6	101,63	93,78
		KPKNL Metro	74	100	95,9	90,25	90,68
		Capaian IKU		228,5025	140,69125	122,785	105,005
3c-N	P/M	Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%
		Tingkat Kelulusan Verkom Penilai Pemerintah Instansi Pengguna di Lingkup Kanwil DJKN (40%)					69,00%
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN (60%)		88,00%	85,00%	87,00%	88,00%
		Capaian IKU		88,00%	85,00%	87,00%	80,40%
4		Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	P/M	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan					
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	655	34	263	394	655
		KPKNL Bengkulu	73	6	34	57	88
		K1		0	1	13	37
		K2		1	2	6	6
		K3		5	19	24	24
		K4		0	12	14	21
		KPKNL Bandar Lampung	322	23	99	245	362
		K1		0	4	147	254
		K2		2	5	6	7
		K3		20	79	79	80
		K4		1	11	13	21
		KPKNL Metro	260	14	65	166	270
		K1		1	1	84	188
		K2		1	1	1	1
		K3		10	61	63	63
		K4		2	2	18	18
		Capaian IKU		6,56%	30,23%	71,45%	109,92%
4b-N	P/M	Persentase Evaluasi Kinerja BMN					
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	1075	182	580	802	1219
		KPKNL Bengkulu	424	70	195	248	510
		KPKNL Bandar Lampung	363	54	225	278	363
		KPKNL Metro	288	58	160	276	346
		Target evaluasi dan rekomendasi kinerja BMN		162			
		Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	56	9	33	52	71
		KPKNL Bengkulu	22	0	13	21	27
		KPKNL Bandar Lampung	19	4	10	14	23
		KPKNL Metro	15	5	10	17	21
		Target rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker		9			
		Capaian IKU KPKNL					

	KPKNL Bengkulu		8,25%	52,54%	76,97%	120%
	KPKNL Bandar Lampung		17,96%	57,31%	75,13%	110,00%
	KPKNL Metro		26,74%	61,11%	104,58%	120,00%
	Capaian IKU		16,50%	56,44%	83,73%	120,09%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	P/M	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara				
	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	75,5	41	53	66	75
	KPKNL Bengkulu	5	1,1	3,3	4,4	6,7
	Komponen 1		0	0	0	1
	Komponen 2		1	3	4	5
	Komponen 3		0	0	0	0
	KPKNL Bandar Lampung	35,5	28,7	29,9	35,5	45,9
	Komponen 1		1	2	3	8
	Komponen 2		25	25	29	33
	Komponen 3		0	0	0	0
	KPKNL Metro	35	18,9	18,9	25,5	45,3
	Komponen 1		2	2	2	2
	Komponen 2		15	15	21	39
	Komponen 3		0	0	0	0
	Capaian IKU		118,78%	98,30%	99,09%	130,53%
5b-CP	P/M	Tingkat kualitas layanan penilaian				
	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	70%		115,50%	107,57%	92,68%
	KPKNL Bengkulu	70%	100%	110%	108%	99%
	Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)		110%	106%	116%	90%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian		110	105,91	115,83	90
	Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)		71%	100%	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP		5	13	6	17
	Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN		7	13	6	17
	Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)		114%	125%	104%	50%
	% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		114%	125%	104%	50%
	Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		10	8	5	2
	Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang		11	8	6	5
	KPKNL Bandar Lampung	70%	98,12%	100,36%	101,96%	99,53%
	Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)		91,54%	82,14%	86,16%	89,58%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian		91,54	82,14	86,16	89,58
	Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)		80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP		28	50	14	37
	Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN		35	36	14	36
	Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)		125,00%	125,00%	125,00%	109,38%
	% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		125,00%	125,00%	125,00%	109,38%
	Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		33	26	1	7
	Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang		33	26	1	8
	KPKNL Metro	70%	115,50%	111,00%	111,90%	112,84%
	Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)		120%	108,75%	111,00%	113,35%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian		120	108,75	111	113,35
	Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)		100%	100%	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP		22	40	26	29
	Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN		22	40	26	29
	Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)		125%	125%	125%	125%
	% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		125%	125%	125%	125%
	Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85		12	17	6	29
	Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang		12	17	6	29
	Capaian IKU		104,4%	109,2%	107,3%	103,95%
5c-CP		Persentase produktivitas lelang				
	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	80%	76,43%	99,77%	124%	124%
	KPKNL Bengkulu	80%	47,43%	56,78%	98,30%	86,06%
	Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)			90,00%	90,00%	115,00%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela (Max 120%)			0,00%	0,00%	100,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela					75%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		0	0	0	6
	Jumlah lot lelang		0	0	0	8
	Target		75%	75%	75%	75%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi wajib (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib			80,34%	83,26%	83,70%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		108	143	189	308
	Jumlah lot lelang		134	178	227	368
	Target		55%	55%	55%	55%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan			14,01%	15,04%	14,65%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		13	29	51	81
	Jumlah lot lelang		92	207	339	553
	Target		5%	5%	5%	5%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan			75,00%	63,33%	70,59%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		0	15	19	36
	Jumlah lot lelang		0	20	30	51
	Target		25%	25%	25%	25%
	Persentase Frekuensi Lelang (60%)			56,96%	83,83%	137,83%
	Jumlah realisasi frekuensi lelang		226	405	596	980
	Target frekuensi lelang		711	711	711	711
	KPKNL Bandar Lampung	80%	58,75%	70,86%	87,04%	103,51%
	Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)		73,19%	71,02%	114,29%	118,40%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela (Max 120%)		24,24%	39,21%	71,43%	74,80%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela		18,18%	29,41%	53,57%	56,10%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		2	5	15	23,00
	Jumlah lot lelang		11	17	28	41,00
	Target		75%	75%	75%	75%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi wajib (Max 120%)		120,00%	111,29%	150,02%	154,41%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib		97,37%	61,21%	82,51%	84,92%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		37	71	217	276,00
	Jumlah lot lelang		38	116	263	325,00
	Target		55%	55%	55%	55%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)		120,00%	120,00%	217,55%	227,71%
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan		13,69%	9,82%	10,88%	11,39%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		56	94	176	272,00
	Jumlah lot lelang		409	957	1618	2389,00
	Target		5%	5%	5%	5%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)		28,51%	13,60%	18,17%	16,67%
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan		7,13%	3,40%	4,54%	4,17%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		32	34	78	106,00
	Jumlah lot lelang		449	1000	1717	2543,00
	Target		25%	25%	25%	25%
	Persentase Frekuensi Lelang (60%)		17,91%	38,25%	65,12%	92,52%
	Jumlah realisasi frekuensi lelang		340	726	1236	1756,00
	Target frekuensi lelang		1898	1898	1898	1898,00
	KPKNL Metro	80%	58,75%	53,38%	89,55%	106,43%
	Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)			106,67%	110,00%	110,00%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela (Max 120%)			66,67%	80,00%	80,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela			50,00%	60,00%	60,00%
	Jumlah realisasi lot lelang laku			2	3	3
	Jumlah lot lelang			4	5	5
	Target			75%	75%	75%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi wajib (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib			96,91%	97,51%	96,33%
	Jumlah realisasi lot lelang laku			94	196	236
	Jumlah lot lelang			97	201	245
	Target			55%	55%	55%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan			22,39%	22,56%	18,96%
	Jumlah realisasi lot lelang laku			118	213	252
	Jumlah lot lelang			527	944	1329
	Target			5%	5%	5%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan (Max 120%)			120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan			93,33%	92,68%	86,36%
	Jumlah realisasi lot lelang laku			14	38	57
	Jumlah lot lelang			15	41	66
	Target			25%	25%	25%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**Unit Organisasi Eselon II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100	105,32	105,32%
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,73%	120,00%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	105,71%	106%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	119,56%	120%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	128,07%	120%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	97,76	120%
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	105,01	120%
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	80,40%	115%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%	109,92%	110%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	120,09%	120%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	130,53%	120%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	103,95%	120%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	98,51%	120%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,01	120%
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,85	113,85%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,56	120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp3.065.559.000 (Anggaran Setelah Revisi)
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp3.027.808.801 (98,76% dari Anggaran)

**KEGIATAN ACARA RAPAT EVALUASI KINERJA TAHUN 2024 DAN
PEMBAHASAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DILINGKUNGAN KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja Tahun 2024 dan membahas rencana kerja tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta KPKNL, yaitu Kepala KPKNL Bengkulu, Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala KPKNL Metro dan para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu (Kakanwil) Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo mengatakan rapat tersebut menjadi forum bagi seluruh jajaran pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk merefleksikan apa yang telah dijalankan dan diraih pada tahun 2024, serta merumuskan banyak hal yang diperlukan untuk perbaikan pada periode tahun 2025.

Kesempatan ini menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk terus berkinerja dan memenuhi apa yang menjadi amanah bagi kita semua, kita perlu mengevaluasi apa saja yang telah kita capai termasuk kendala yang ada,” kata Kepala Kanwil.

Kita akan memitigasi secara bersama-sama, pada saat dialog akan diketahui apa saja yang dapat dilaksanakan dan apa saja yang perlu dieskalasi,” imbuh Kepala Kanwil.

Apresiasi juga Kepala Kanwil sampaikan kepada jajaran Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atas dedikasi pada tahun 2024 dalam melampaui semua target kinerja.

Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kinerja yang telah diberikan pada tahun 2024, tentunya ini menjadi kebanggaan kita bersama atas pencapaian NKO melebihi 115%. Berkat dukungan dan kerja sama serta sinergi seluruh KPKNL pada tahun 2024 kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujar Kepala Kanwil.

Lebih lanjut Kepala Kanwil memberikan motivasi terkait pentingnya komitmen bersama dalam suatu organisasi, dijelaskan Kepala Kanwil bahwa setiap unit kerja harus saling mendukung satu dan yang lainnya, saling menguatkan dan bersinergi dalam iklim yang kolaboratif.

Kita semua saling berkolaborasi untuk dapat menghasilkan komponen-komponen yang maksimal, kondisi riil saat ini memerlukan penyesuaian dalam banyak hal, ini memerlukan strategi serta inovasi untuk mempercepat penyelesaian tugas dan mengoptimalkan semua potensi yang ada,” jelas Kepala Kanwil.

Mengakhiri sambutan pembukaan rapat ini Kakanwil menyampaikan pesan agar seluruh pegawai Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mempunyai sikap semangat sinergitas dan berjuang sampai akhir tahun 2025 melebihi tahun sebelumnya.

Kita akan terus berjuang dengan upaya terbaik, terlepas dari zona nyaman dengan capaian tahun 2024 dan bersama berkomitmen melampaui target kerja tahun 2025 dengan tujuan utama memberikan karya terbaik bagi masyarakat penerima layanan,” kata Kakanwil.

DOKUMENTASI KEGIATAN











**KEGIATAN PELANTIKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI
PEMERIKSA PIUTANG NEGARA DI LINGKUNGAN KANWIL DJKN LAMPUNG DAN
BENGKULU DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, secara resmi melantik dua Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pemeriksa Piutang Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Atas nama Sdri. Nisa Anggit Hutami dan Sdr. Moch. Prabowo Sudibyo. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala Bagian Umum dan para Kepala Bidang pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Rohaniawan, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menyampaikan sambutan dengan menekankan pentingnya peran pemeriksa piutang negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Saudara diangkat dalam jabatan Pemeriksa Piutang Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 349/KM.6/2024, Saya percaya bahwa Saudara/i akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan." kata Kepala Kanwil Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan amanah dari ketentuan tentang pengurusan piutang negara, dalam hal Pemeriksa Piutang Negara diangkat oleh atau atas nama kuasa menteri keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, "Pemeriksa Piutang Negara bersama-sama dengan Jurusita merupakan ujung tombak Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam menyelesaikan Piutang Negara." tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu berpesan agar pegawai yang dilantik pada hari ini melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berintegritas tinggi, "Pemeriksa Piutang Negara memiliki peran penting dalam percepatan proses pengurusan piutang negara yang menjadi tanggung jawab KPKNL di Lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Saya yakin dengan dedikasi dan kompetensi yang dimiliki, kita dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan." pungkasnya.

Upacara pelantikan dimulai dengan pembacaan doa oleh rohaniawan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Kedua pegawai yang dilantik tampak khidmat mengikuti setiap rangkaian acara, menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan meningkatkan kinerja Piutang Negara khususnya pada Lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu yang berkomitmen memberikan upaya terbaik, berdedikasi dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU MENERIMA KUNJUNGAN ANGGOTA KOMISI XI DPR RI

Bandar Lampung, tanggal 17 Januari 2025, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, menerima kunjungan kerja (reses) Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025.

Kunjungan reses ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran, dan evaluasi perkembangan tugas dan fungsi DJKN oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu hingga tanggal 31 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menyampaikan apresiasi kepada Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, selaku Anggota Komisi XI DPR RI yang telah secara khusus mengalokasikan waktu untuk mengunjungi Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

“Kami ucapkan terima kasih karena ini merupakan kali pertama adanya kunjungan langsung dari Anggota DPR RI. Tentunya akan banyak saran serta masukan bagi perbaikan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam kaitan dengan tugas dan fungsi DJKN,” kata Kepala Kanwil.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil menambahkan pentingnya kegiatan ini bagi sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. “Kunjungan reses ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat sinergi antara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu selaku unit vertikal Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sebagai mitra strategis untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan optimal,” imbuhnya.

Kepala Kanwil menjelaskan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJKN memiliki mandat dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, pelaksanaan lelang, dan penilaian aset. “Wilayah kerja kami meliputi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung dengan tugas untuk memastikan pengelolaan negara dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Menutup sambutannya, Kepala Kanwil mengatakan bahwa pihaknya menyadari pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR RI serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. “Karena itu, kegiatan ini adalah forum berharga bagi kami untuk mendapatkan saran, masukan, serta evaluasi demi perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN di Wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi paparan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Anggota Komisi XI DPR RI Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, menjelaskan adanya peraturan daerah tentang simbol dan lambang daerah Provinsi Lampung.

“Perda simbol dan lambang Daerah Provinsi Lampung memiliki beberapa substansi. Setidaknya yang pertama adalah sebutan Provinsi Lampung sebagai Sai Bumi Rua Jurai. Yang kedua adalah istilah Rua Jurai yang mempunyai arti Dua Marga, yakni Sai Batin dan Pepadun yang dipersaudarakan. Maknanya bahwa setiap masyarakat yang berada di Provinsi Lampung dipersaudarakan ke dalam dua marga ini. Esensi yang ketiga adalah penggunaan salam pembuka Tabik pun dalam setiap acara formal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, mengungkapkan bahwa kunjungan ini dalam rangka reses pada periode 2024 – 2029.

“Kunjungan kami ke sini adalah dalam rangka reses, dan ini merupakan reses yang pertama untuk Periode 2024-2029 yang telah dimulai sejak Desember 2024 lalu hingga saat ini,” ungkapnya.

“Saya memfokuskan pada reses yang pertama ini untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra kerja sesuai Bidang Komisi XI DPR RI yang membidangi perencanaan, keuangan, dan perbankan di Provinsi Lampung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, menyampaikan bahwa tujuan lain dari kunjungan reses ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan program-program Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%.

Pada akhir penjelasan tentang kunjungannya, Dr. Ir. H. A. Djunaidi Auly, MM, mengatakan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat ingin kebersamaan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah pemilihannya. “Saya memaknai bahwa aspirasi yang ada pada para mitra kerja penting untuk diketahui. Hal ini merupakan kewajiban kami selain tugas budgeting dan controlling yang melekat pada fungsi Komisi XI DPR RI,” tandasnya.

Kunjungan reses kali pertama oleh Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 hari ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung Sdri. Titik Wijayanti, Kepala Bagian Umum, para Kepala Bidang, serta pegawai Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Setelah kunjungan ini diharapkan adanya tindak lanjut berupa pelaksanaan program bersama antara Komisi XI DPR RI dan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

DOKUMENTASI KEGIATAN









KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU TERKAIT KOORDINASI PENERIMAAN NEGARA DAN PENYELAMATAN ASET KREDIT BERSAMA PT. BRI (PERSERO) TBK BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu bersama Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Bandar Lampung, menggelar koordinasi untuk meningkatkan hasil penerimaan negara dan penyelamatan aset kredit di Bandar Lampung, Selasa (11 Februari 2025).

Acara ini diinisiasi oleh *Credit Restructuring & Recovery Department Regional Office* PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, *Regional Chief Executive Officer* Sdr. Bernadi Kurniawan dan *Team Leader Divisi CRR* Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk, Sdri. Isti Widhaningsih.

Rapat koordinasi ini merupakan wujud sinergi untuk meningkatkan realisasi kinerja lelang pada tahun 2025, yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara dan penyelamatan nilai aset kredit, khususnya kredit yang mempengaruhi *Non-Performing Loan* (NPL) atas kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat.

“Kinerja lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari PT. BRI (Persero) Tbk adalah yang tertinggi secara nasional untuk tahun 2024 dengan pokok lelang sebesar Rp2.655.992.000.000,- sedangkan untuk lingkup Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dengan pokok lelang sebesar Rp97.293.000.000,- ujar Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo.

Infrastruktur Portal Lelang mendukung proses bisnis dengan digitalisasi yang mengakomodasi praktik terbaik proses lelang. Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi terus digalakkan hingga aplikasi lelang menjadi mapan dan menyentuh langsung masyarakat pengguna layanan.

Portal Lelang Indonesia menawarkan berbagai manfaat baik bagi individu maupun negara. Proses lelang yang dilakukan melalui portal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan aman, dengan dokumen dan legalitas barang yang dilelang diperiksa dengan teliti. Penggunaan *platform* lelang *online* menghemat waktu dan biaya, baik bagi penyelenggara maupun peserta lelang. Proses registrasi, verifikasi, dan komunikasi dapat dilakukan secara digital. Bagi investor, lelang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif, yang berpotensi memberikan keuntungan tinggi.

Lebih lanjut, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menerangkan besaran target kinerja lelang yang telah ditetapkan. “Untuk tahun 2025, target kinerja lelang secara nasional ditetapkan dengan pokok lelang sebesar Rp48.270.342.000.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp900.499.000.000,- Breakdown target untuk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sebesar Rp570.249.000.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.709.000.000,-” ungkapnya.

Dengan mempertimbangkan besaran target tahun 2025 yang fokus pada pokok lelang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu meningkatkan sinergitas dan upaya kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut. Penajaman strategi dilakukan dengan pemetaan potensi lelang laku sebanyak 10% hingga 17 % dari total frekuensi lelang.

Komitmen menjawab tantangan target tersebut menjadi kesepakatan antara DJKN dan PT. BRI (Persero) Tbk dengan tetap menjaga proses lelang agar tetap akuntabel, seiring dengan komitmen DJKN sebagai unit Kementerian Keuangan yang bebas dari korupsi, melaksanakan proses birokrasi yang bersih dan melayani.

“Melalui upaya yang kolaboratif, sinergi, dan inovatif namun tetap dalam bingkai integritas, kita wujudkan semangat lelang dan kinerja lelang tahun 2025 yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” tutup Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo.

Hadir dalam rapat koordinasi ini, Plt. Kepala Bidang Lelang Sdr. Mas Agus Subakti, Kepala KPKNL Bandar Lampung Sdr. Titik Wijayanti, dan Kepala KPKNL Metro Sdr. Ramson Damanik.

DOKUMENTASI KEGIATAN











**KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KOORDINASI
BERSAMA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LAMPUNG
DENGAN KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU DALAM
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA MACET BPJS**

Bandar Lampung, Rapat koordinasi antara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung, digelar pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Rapat ini dalam rangka rapat koordinasi awal terkait rencana penyerahan pengurusan piutang macet BPJS Ketenagakerjaan. Rapat koordinasi dilaksanakan di ruang rapat kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemous Sigit Rahardjo dan Kepala Bidang Piutang Negara, Sdr. Mas Agus Subakti. Rapat juga dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung, Sdr. M Nuh dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS menyampaikan paparan terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara sehingga BPJS memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat menyerahkan Pengurusan Piutang Macet pada BPJS Ketenagakerjaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu menyampaikan bahwa PUPN siap untuk menerima penyerahan baru berkas pengurusan piutang macet dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung mengharapkan untuk dapat dilakukan tindak lanjut hasil koordinasi ini dengan melakukan penjadwalan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD)/Sosialisasi bersama seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung dan Bengkulu yang dihadiri Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel.

Rapat koordinasi berakhir pukul 11.00 WIB.

DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI PENILAI PEMERINTAH
PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

Bandar Lampung, tanggal 19 Mei 2025 — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, bersama seluruh Kepala Kanwil jajaran Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas instansi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung di Provinsi Lampung.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus pembahasan mencakup optimalisasi peran Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada instansi pengguna, peningkatan frekuensi lelang barang rampasan kejaksaan, serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung operasional unit vertikal.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Sdr. Danang Suryo Wibowo, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan kunci dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Komunikasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam optimalisasi peran Penilai Pemerintah, lelang barang rampasan, dan pemanfaatan BMN, perlu dijalin, diperkuat, dan dijaga secara berkesinambungan,” ujarnya.

Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menyampaikan bahwa sinergi antar instansi sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa pelaksanaan amanat pengelolaan keuangan oleh Kementerian Keuangan berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menjelaskan bahwa DJKN memiliki peran strategis dalam mendorong optimalisasi fungsi Penilai Pemerintah, pelaksanaan lelang barang rampasan kejaksaan, serta pemanfaatan BMN oleh unit vertikal. Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pertemuan ditutup dengan harapan agar koordinasi semacam ini dapat menjadi agenda rutin. Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menyampaikan bahwa penguatan sinergi antar instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam mendukung pembangunan nasional.

DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU DALAM RANGKA
HARKITNAS KE-117 ASN KEMENKEU LAMPUNG TEGUHKAN SEMANGAT
BANGKIT BERSAMA UNTUK INDONESIA KUAT**

Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Perwakilan Bengkulu dan Lampung pada Selasa tanggal 20 Mei 2025.

Upacara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah lingkup Kementerian Keuangan perwakilan Provinsi Lampung, termasuk Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan nasionalisme, sebagaimana yang telah digaungkan sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908.

“Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa semangat bangkit bersama harus terus dikobarkan, terutama dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital,” ujar Nikodemus.

Ia menambahkan bahwa semangat kebangkitan harus menjadi energi positif untuk terus beradaptasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bangkit dari tantangan dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat, mencerminkan komitmen seluruh insan Kementerian Keuangan di wilayah Lampung untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pengelolaan keuangan negara yang profesional dan berintegritas.

Dengan semangat Harkitnas Tahun 2025, seluruh pegawai Kementerian Keuangan diharapkan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global, serta berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU DALAM RANGKA ARAHAN TERKAIT SIKAP ANTI KORUPSI DAN TOLAK GRATIFIKASI

Bandar Lampung, tanggal 26 Mei 2025 — Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, kembali menegaskan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dalam forum *Peppung Dijow* yang berlangsung di Aula Sakay Sambayan, Senin tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi sarana penting penguatan budaya integritas dan bagian dari pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peppung Dijow merupakan forum internal yang sejalan dengan amanat KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai antikorupsi yang didorong oleh Duta Transformasi DJKN. Dalam forum tersebut, seluruh pegawai mulai dari pejabat struktural hingga PPNPN turut hadir dan menerima penekanan kembali terhadap pentingnya sikap antikorupsi.

“Anti korupsi, menolak gratifikasi dan benturan kepentingan dalam bentuk apa pun adalah sikap wajib bagi pegawai Kementerian Keuangan. *Zero tolerance* untuk perilaku korup, karenanya penekanan akan hal ini secara konsisten dilakukan melalui forum-forum formal maupun informal,” tegas Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo dalam arahannya.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu menekankan pentingnya memahami hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), memperkuat Kerangka Kerja Integritas, dan mengoptimalkan pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman dan terpercaya. Selain itu, pegawai diimbau untuk menjauhi potensi benturan kepentingan serta memahami posisi mereka sebagai representasi institusi publik.

Forum ini juga menghadirkan Hartanto, Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dari Kementerian Keuangan yang tersertifikasi oleh KPK. Dalam sesi *Sharing Session*-nya, Hartanto mengangkat tema “ASN Berintegritas di Era Digital”, membahas pentingnya bijak bermedia sosial, kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku ASN, serta kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN secara akurat dan tepat waktu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasi kembali semangat integritas di seluruh lapisan pegawai, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan digital sehari-hari. Budaya menolak gratifikasi dan korupsi harus menjadi kebiasaan kolektif yang melekat pada setiap insan Kementerian Keuangan.

Dengan penyelenggaraan *Peppung Dijow*, DJKN Lampung dan Bengkulu berharap dapat menjadi contoh pelaksana integritas yang konsisten, berkomitmen, dan siap menjadi garda depan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KE KANWIL BPN PROVINSI LAMPUNG MEMBAHAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Bandar Lampung, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, bersama Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Sdri. Estty Purwadiani Hidayatie, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025. Keduanya diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Sdr. Hasan Basri Natamenggala, di ruang kerjanya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu didampingi oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, Sdri. Titik Wijayanti, serta Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Sdr. Raden Hariyadi Murti Kurniawan. Pertemuan ini membahas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya aset berupa tanah, dalam perspektif tata aturan pertanahan. Fokus utama pertemuan adalah penguatan koordinasi antarlembaga demi mendukung pengelolaan aset negara secara tertib, legal, dan optimal.

Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, menekankan pentingnya program sertifikasi tanah sebagai bagian dari tata kelola aset negara. “Salah satu fokus kami adalah mempercepat sertifikasi tanah milik negara. Di Provinsi Lampung, proses ini dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro yang secara aktif memberikan pelayanan kepada seluruh satuan kerja,” ujar Nikodemus.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Sdri. Estty Purwadiani Hidayatie, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjaga ketertiban penggunaan tanah milik negara. “Kami terus bersinergi dengan DJKN dan Kanwil BPN dalam proses penertiban penggunaan tanah, baik untuk kantor maupun rumah dinas. Koordinasi yang intens selama ini telah kami jalin, dan kami berharap hubungan ini semakin kuat ke depan,” ungkap Estty.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Sdr. Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengelolaan BMN yang tertib dan sesuai ketentuan. “BPN mendukung penuh proses tata kelola aset negara. Kami juga terus berinovasi, antara lain melalui aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ dan ‘Intip BMN’ yang memudahkan akses informasi dan pelayanan pertanahan,” jelas Hasan.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan bersama tentang pentingnya kepastian penguasaan fisik, kekuatan legalitas, dan tertib administrasi aset berupa tanah. Ketiga pimpinan instansi sepakat bahwa pengelolaan BMN yang baik akan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

DOKUMENTASI KEGIATAN









**KEGIATAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DAN PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN KE GUBERNUR LAMPUNG
DALAM RANGKA MEMPERKUAT SINERGI ANTAR LEMBAGA DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN
MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Bandar Lampung, tanggal 10 Juni 2025. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung mengadakan audiensi dengan Gubernur Lampung, Sdr. Rahmat Mirzani Djausal, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 bertempat di Ruang Kerja Gubernur Lampung. Audiensi ini bertujuan mempererat sinergi antarlembaga dalam pengelolaan keuangan negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Delegasi yang hadir meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sdri. Rosmauli, sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan langsung dari Gubernur. “Potensi penerimaan perpajakan di Lampung sangat besar, tetapi perlu penguatan pertukaran data untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara,” tegas Rosmauli.

Kepala Kanwil DJPb Lampung, Sdr. Mohammad Dody Fachrudin, melaporkan bahwa hingga tanggal 31 Maret 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 2,50 triliun kepada 47.466 debitur—naik 8,26 % secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan komitmen perbankan terhadap UMKM.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Nikodemus Sigit Rahardjo, menjelaskan upaya inventarisasi dan sertifikasi 95 aset perkebunan di milik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Aset tersebut direncanakan akan diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Sdri. Estty Purwadiani Hidayatie, menyatakan komitmen Bea Cukai dalam mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan penegakan hukum Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang telah berjalan harmonis bersama Satpol PP.

Audiensi juga dihadiri pejabat eselon III di antaranya Sdr. Sugiri Tejanagara (Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Lampung), Sdr. Ilman Najib (Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Sumbagbar), Sdr. Prima Kusuma Sumanti (Kepala Bidang PPAK DJPb Lampung), dan Sdr. Raden Hariyadi Murti Kurniawan (Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu).

Semua pihak menegaskan komitmen memperkuat sinergi antarunit vertikal Kemenkeu Daerah dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

DOKUMENTASI KEGIATAN









**KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
PADA SATUAN KERJA TERDAMPAK
PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH TAHUN 2024 - 2029**

Bandar Lampung, tanggal 17 Juni 2025. Dalam rangka menindaklanjuti restrukturisasi organisasi kementerian/lembaga pasca pembentukan Kabinet Merah Putih 2024–2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terdampak, yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, pada hari Selasa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis kepada satuan kerja di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang terdampak perubahan organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024 - 2029 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala KPKNL Metro, Sdr. Ramson Damanik, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Dalam sambutannya, Sdr. Ramson Damanik menegaskan bahwa pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dan pelaporan keuangan negara dalam masa transisi kelembagaan.

“Likuidasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Materi inti disampaikan oleh tim dari Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN, yang terdiri dari Sdri. Laksmi Dewa Rinanti, Sdr. Harum Murti dan Sdr. Satrio Wibowo.

Tim narasumber menyampaikan secara komprehensif prosedur pelaksanaan likuidasi, meliputi identifikasi dan serah terima aset, penutupan rekening, hingga penyusunan laporan keuangan penutup Semester II Tahun Anggaran 2025.

Sebagai bagian dari penguatan nilai integritas, kegiatan ini juga menghadirkan sesi bertajuk “Integritas, Anti Korupsi, dan Gratifikasi”, yang disampaikan oleh Sdr. Hartanto, S.E., Ak., M.M., Penyuluh Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam paparannya, Sdr. Hartanto mengajak peserta untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi serta menolak segala bentuk gratifikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif, dengan partisipasi aktif dari para peserta yang mengikuti melalui *platform Zoom*. Peserta terdiri dari perwakilan satuan kerja Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional DJKN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan kerja terdampak dapat melaksanakan proses likuidasi secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terus mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terdampak
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah Kanwil DJKN
Lampung dan Bengkulu

DJKN



Lampung dan Bengkulu
Selasa, 17 Juni 2025



Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah
Lampung dan Bengkulu

DJKN



Arepa Ariyanto, KPNP, Metro

Bengkulu
2025

Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terdampak
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah Kanwil DJKN
Lampung dan Bengkulu

DJKN



Luhaina Dewi Rendi

Lampung dan Bengkulu
Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terdampak
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah Kanwil DJKN
Lampung dan Bengkulu

DJKN

DJKN Lampung dan Bengkulu

Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terdampak
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah Kanwil DJKN
Lampung dan Bengkulu

DJKN

DJKN Lampung dan Bengkulu

Sosialisasi

Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Terpadu
Pembentukan Kabinet Merah Putih di Wilayah
Lampung dan Bengkulu

DJKN



Lampung dan Bengkulu

Selasa, 17 Juni 2025

KEGIATAN PELEPASAN KEPALA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU MENJADI KEPALA KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bandar Lampung, 19 Juni 2025 — Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti aula Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu pada Kamis pagi ini. Seluruh pegawai bersama para undangan dari Kementerian Keuangan perwakilan Provinsi Lampung, termasuk dari Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, hadir dalam momen istimewa: melepas Bapak Nikodemus Sigit Rahardjo untuk menjalankan amanah barunya sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama masa kepemimpinannya di DJKN Lampung dan Bengkulu, sosok yang akrab disapa Pak Niko ini dikenal sebagai figur pembaharu yang konsisten mendorong transformasi birokrasi dengan semangat tinggi. Di bawah arahnya, berbagai capaian strategis berhasil diraih: mulai dari kinerja yang senantiasa melampaui target, hingga predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi unit kerja di wilayah tersebut.

Tidak hanya sebagai pemimpin birokrasi, Pak Niko juga dikenal sebagai sosok inspiratif yang rendah hati, mudah bergaul, dan mengedepankan prinsip kepemimpinan yang setara. Kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara yang dimulai sejak tahun 1993 telah mengajarkannya bahwa membangun birokrasi bukan semata soal prosedur, tapi soal hubungan kerja yang adaptif, kolaboratif, dan akuntabel.

Ciri khas lain yang melekat pada dirinya adalah ketertarikan terhadap dunia teknologi dan semangat dalam mendorong transformasi digital. Berbagai inovasi telah dilahirkan selama masa jabatannya—bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi serta kemudahan akses bagi publik.

"Perubahan bisa dimulai dari keberanian untuk mencoba. Inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal niat baik untuk memperbaiki. Menjadi pemimpin sejati adalah tentang memberi makna dan dampak—di mana pun berada," ungkapnya dalam pidato perpisahan yang disambut tepuk tangan panjang.

Dalam akhir sambutannya, ia pun menyampaikan filosofi hidup yang menyentuh hati: *"Dari yang semula bukan siapa-siapa, kita juga akan kembali menjadi bukan siapa-siapa. Jabatan dan sebagainya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa."*

Bagi banyak pegawai yang hadir, momen ini bukan sekadar perpisahan, melainkan penguatan semangat dan teladan kepemimpinan yang menginspirasi. Kisah pengabdian dan nilai-nilai yang ditinggalkan Pak Niko akan menjadi bekal berharga untuk terus melanjutkan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Provinsi Lampung dan Bengkulu.

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEGIATAN PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Jakarta, tanggal 20 Juni 2026 — Menteri Keuangan Republik Indonesia Sdri. Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini disampaikannya dalam acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada Jumat di Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kepemimpinan yang kuat di level menengah, khususnya pada Pejabat Eselon III, IV, dan Pejabat Fungsional, memegang peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

“Profesionalisme dan integritas bukan hanya nilai, tetapi prinsip utama yang harus tertanam dalam setiap tindakan dan kebijakan. Saudara-saudara adalah penggerak utama di lapangan, keputusan yang diambil harus mencerminkan kualitas kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab,” ujar Sdri. Sri Mulyani.

Dalam rangkaian pelantikan tersebut, sebanyak delapan pejabat di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu turut mengalami rotasi dan promosi jabatan. Rinciannya, lima pejabat dimutasi dalam jabatan pengawas, dua pejabat dimutasi dalam jabatan administrator, satu pejabat pengawas dipromosikan sebagai pejabat administrator, serta satu pegawai pelaksana dipromosikan menjadi pejabat pengawas.

Pelantikan pejabat dari lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sdr. Rionald Silaban. Dalam sambutannya, Sdr. Rionald Silaban kembali menggarisbawahi pesan Menkeu agar setiap pejabat senantiasa menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak bisa membiarkan keputusan strategis diambil tanpa landasan integritas. Kepemimpinan sejati diukur dari keberanian untuk berlaku adil, jujur, dan profesional dalam situasi apa pun,” tegas Rionald.

Rotasi dan promosi ini diharapkan menjadi penguat bagi organisasi dalam menjalankan tugas pengelolaan kekayaan negara secara efektif, serta mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

DOKUMENTASI KEGIATAN









KEGIATAN PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG KUNJUNGAN KE WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, tanggal 07 Juli 2025 Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung mengadakan audiensi dengan Walikota Bandar Lampung, Sdri. Eva Dwiana, pada Senin bertempat di Ruang Rapat Walikota. Audiensi ini bertujuan mempererat sinergi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya Kota Bandar Lampung.

Delegasi yang hadir meliputi Sdri. Retno Sri Sulistyani, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan juga selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Lampung, didampingi oleh Sdri. Purwadhi Adhiputranto, Kepala Kanwil DJPB Lampung, Sdri. Cuti Asih, Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, beserta jajaran.

Walikota Bandar Lampung, Sdri. Eva Dwiana mengucapkan selamat datang di Kota Bandar Lampung, serta mengharapkan sinergi dan kolaborasi terkait keuangan, aset dan perpajakan dari tingkat Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat terus terjalin dengan baik.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sdri. Retno Sri Sulistyani sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Lampung, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu dan berdiskusi. Sebagai pengantar, ia menjelaskan tugas dan fungsi pokok Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yaitu mengumpulkan penerimaan negara sesuai target yang ditetapkan, serta bertanggung jawab dalam penjabaran kebijakan strategis di bidang perpajakan, pelaksanaan penyuluhan, pelayanan perpajakan, serta penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak di wilayah kerja mereka yang meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Kepala Kanwil DJPb Lampung, Sdr. Purwadhi Adhiputranto mengapresiasi kinerja pajak daerah dan koordinasi terkait DAK Kota Bandar Lampung yang baik. Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdri. Cuti Asih, menjelaskan tugas dan fungsi pokok Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, serta siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Semua pihak menegaskan komitmen memperkuat sinergi antarunit vertikal Kemenkeu daerah dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN PLT. KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
DALAM RANGKA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN TVRI STASIUN LAMPUNG**

Bandar Lampung, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Cuti Asih menghadiri rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-34 TVRI Stasiun Lampung yang digelar di Kelurahan Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kehadirannya turut didampingi oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Sdr. Irwan Mardianto.

Kegiatan Hari Ulang Tahun TVRI Stasiun Lampung ini tidak hanya sekedar ulang tahun namun memberdayakan ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Memberdayakan ekonomi salah satunya melalui bazar produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sementara sosial melalui kegiatan donor darah.

Disela-sela kegiatan, Sdr. Cuti Asih menyampaikan apresiasinya kepada TVRI Stasiun Lampung yang selama ini telah menjadi media publik dengan integritas tinggi dalam menyuarakan berbagai nilai, budaya, dan keberagaman. “TVRI Lampung mampu menghadirkan konten dan program berkualitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke berbagai penjuru daerah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Sdr. Irwan Mardianto, menambahkan bahwa kehadiran Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu pada kegiatan ini merupakan wujud dukungan dan sinergi antar instansi pemerintah dengan lembaga penyiaran publik. “Kerja sama ini penting dalam konteks komunikasi dan pengelolaan informasi publik yang faktual, akurat, cepat, transparan, dan akuntabel,” jelas Irwan.

Kegiatan peringatan HUT ke-34 ini diharapkan menjadi momentum bagi TVRI Stasiun Lampung untuk terus memantapkan visi dan misinya di masa mendatang. Selain itu, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu juga berharap sinergitas yang telah terjalin dapat semakin diperkuat di masa yang akan datang.

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK “MENDENGAR, MEREAPON, DAN MELAYANI” TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF DAN BERINTEGRITAS

Bandar Lampung – Rabu tanggal 27 Agustus 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung serta KPKNL Metro, menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan tema "Mendengar, Merespon, dan Melayani Transformasi Layanan Publik yang Partisipatif dan Berintegritas." Acara ini berlangsung di Aula KPKNL Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Kelurahan Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Forum ini merupakan *platform* untuk interaksi dan pertukaran opini antara berbagai unsur penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, pemerhati, serta pemangku kebijakan di bidang pelayanan publik dan media massa. Narasumber Pembahas dalam forum ini adalah Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, dan Sdr. Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Selain itu, Kepala KPKNL Bandar Lampung, Sdri. Titik Wijayanti, dan Kepala KPKNL Metro, Sdr. Wahyu Setiadi, juga turut serta sebagai narasumber dari penyelenggara layanan.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdri. Cuti Asih. Dalam sambutannya, Sdri. Cuti Asih menekankan komitmen DJKN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memperhatikan opini dan aspirasi yang berkembang. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan sejalan dengan budaya kerja yang berintegritas di Kementerian Keuangan, termasuk DJKN.

“Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya kami untuk mendengarkan langsung masukan dan saran dari masyarakat serta berbagai pihak terkait, sehingga kami dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kami,” ujar Sdri. Cuti Asih.

Diskusi forum dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdri. Raden Hariyadi Murti Kurniawan, yang bertindak sebagai moderator. Sdr. Hariyadi menyampaikan bahwa pelayanan kepada penerima layanan merupakan prioritas utama. Forum ini bertujuan sebagai implementasi dan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Sdr. Raden Hariyadi kemudian memberikan penjelasan mengenai standar pelayanan di Kanwil DJKN. Ia menjelaskan empat jenis pelayanan utama yang diberikan, yaitu Persetujuan/Penolakan Pemindahtanganan berupa Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang, Pelaksanaan Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di

Lingkungan Kanwil DJKN, Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah, dan Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II.

Diskusi berlanjut dengan pemaparan oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, Sdri. Titik Wijayanti, dan Kepala KPKNL Metro, Sdr. Wahyu Setiadi, yang menguraikan berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh masing-masing KPKNL, termasuk Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan, Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan, Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), Pelaksanaan Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL, Penetapan Jadwal Lelang, Pelaksanaan Lelang, Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL), Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan, dan Penerbitan Salinan Risalah Lelang.

Sesi pemaparan ditutup oleh Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si, yang memberikan materi tentang Standar Pelayanan Publik dari perspektif kebijakan publik. Dr. Arif Sugiono, menekankan pentingnya penyusunan standar pelayanan yang mencakup berbagai aspek seperti persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan dan saran, serta masukan masyarakat.

Forum ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan oleh akademisi/ahli/praktisi diwakili Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Sdr. Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, organisasi masyarakat sipil diwakili oleh perwakilan dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung, dan beberapa perwakilan lain dari pengguna layanan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung, dan KPKNL Metro.

Diharapkan, Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEGIATAN EDUKASI LELANG MELALUI KANAL STASIUN TVRI LAMPUNG DAN RRI BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan kegiatan edukasi lelang melalui Kanal Stasiun TVRI Lampung dan RRI Bandar Lampung. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah menyemarakkan HORI ke-79 Tahun 2025, mengedukasi masyarakat tentang salah satu tugas dan fungsi DJKN yaitu lelang, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses lelang yang transparan, efisien, dan tepercaya dan mengenalkan aplikasi portal lelang versi 2 (*lelang.go.id*).

Kegiatan edukasi lelang ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dalam mengedukasi masyarakat tentang salah satu tugas DJKN khususnya bidang lelang dan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 Tahun 2025 dengan melaksanakan kegiatan Dialog Interaktif yang melibatkan publik secara langsung bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yaitu TVRI Stasiun Lampung dan RRI Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi dan edukasi lelang dilaksanakan pada TVRI Stasiun Lampung, Jalan Terusan Jenderal Ryacudu, Kelurahan Way Hui, Kecamatan Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto Nomor 26, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Tema Dialog adalah Ngulik Lelang, Jelas Prosesnya, Jujur Harganya. Adapun yang menjadi Narasumber acara tersebut adalah Kepala Bidang Lelang, Kepala Seksi Bimbingan Lelang I dan Kepala Seksi Bimbingan lelang II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Sosialisasi dan edukasi lelang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Stasiun TVRI Lampung dan pada tanggal 31 Oktober 2025 di RRI Bandar Lampung merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan informasi dan edukasi lelang kepada masyarakat, dengan hasil yang diharapkan agar masyarakat/public mengenal apa itu lelang dan sejarahnya, mengetahui perubahan sistem lelang dari dulu hingga sekarang, mengenal lelang online melalui Portal Lelang versi 2 (*lelang.go.id*) dan kelebihanannya, sebuah platform resmi milik pemerintah yang menjamin proses lelang transparan, aman, dan anti tipu-tipu, mengetahui syarat untuk menjadi peserta lelang, memahami cara ikut lelang secara online, mengetahui jenis lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II, mengenal apa itu uang jaminan dan fungsinya, memahami langkah selanjutnya setelah jadi pemenang lelang, bayar kemana, batas waktu untuk pembayaran, dan biaya lain selain harga lelang, waspada penipuan lelang palsu, meyakini bahwa sistem lelang yang diterapkan saat ini transparan, akuntabel dan adil.

Selain itu turut disampaikan terkait upaya mempertahankan predikat WBK-WBBM, narasumber menyampaikan bahwa seluruh proses layanan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dilaksanakan secara profesional dan berbiaya Rp0 (Nol) rupiah

DOKUMENTASI KEGIATAN

The banner features three officials from DJKN Lampung. The central figure is **KEPALA BIDANG LELANG RIDHO WAHYONO**. He is flanked by **KEPALA SEKSI BIMBINGAN LELANG II KURNIAWAN** on the left and **KEPALA SEKSI BIMBINGAN LELANG I FAJAR SIDIK** on the right. The banner includes logos for TVRI, DJKN, and RRI. The event is titled **Jamma Lampung NGULIK LELANG** with the tagline **JELAS PROSES NYA, JUJUR HARGANYA**. It is a **LIVE** broadcast on **TVRI LAMPUNG**. The broadcast schedule is as follows:

Channel	Frequency	Time	Date
RRI	87.7 Mhz	10.00 - 11.00 WIB	Jumat, 31 Oktober 2025
TVRI	LAMPUNG	14.00 - 15.00 WIB	Rabu, 29 Oktober 2025









**KEGIATAN UMKM EXPO HORI KE-79 TAHUN 2025 DAN
LELANG SUKARELA UMKM PEJABAT LELANG KELAS II
PADA KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG**

Bandar Lampung – Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan UMKM Expo dan Lelang Sukarela. Kegiatan UMKM Expo dan Lelang Sukarela ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Jalan P. Emir Moh Noer Nomor 5A, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung - 35211. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program kerja UMKM pada Kemekeu Satu, yang bertujuan untuk membantu UMKM agar lebih maju dan naik kelas.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyemarakkan hari HORI ke-79 Tahun 2025, mengedukasi pegawai Kemenkeu Satu serta pelaku UMKM tentang salah satu tugas dan fungsi DJKN yaitu lelang, mengenalkan lelang sebagai salah satu alternatif penjualan produk UMKM, membantu UMKM menjual produknya dengan harga yang optimal, memfasilitasi Pejabat Lelang Kelas II untuk dapat melaksanakan lelang dan memperoleh capaian kinerja yang optimal pada Tahun 2025.

Peserta Expo adalah UMKM Binaan Kemenkeu Satu Lampung, Pejabat Lelang Kelas II Sdr. Ig Yoga Adi Nugroho, S.H., M.Kn, Pemohon Lelang UMKM Binaan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Peserta lelang Pegawai Kemenkeu Satu Lampung. Hasil kegiatan UMKM Expo diikuti oleh 21 (dua puluh satu) pelaku UMKM binaan Kemenkeu Satu Wilayah Lampung dan telah terlaksana dengan sukses dan semarak Terhadap lelang sukarela Produk UMKM oleh Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Lampung atas nama Sdr. Ig. Yoga Adi Nugroho, S.H. M.Kn. diperoleh hasil sebagai berikut:

**HASIL LELANG PRODUK UMKM
TANGGAL 30 OKTOBER 2025**

No.	Barang yang Dilelang	Nilai Limit (Rp)	Pokok Lelang (Rp)	Bea Lelang (Rp)
1	Batik Tulis Motif Rajo Medal	1.200.000	1.600.000	9.600
2	Batik Tulis Motif Khas Lampung (warna ungu)	500.000	520.000	3.120
3	Batik Tulis Motif Khas Lampung (warna putih coklat)	1.000.000	1.100.000	6.600
4	Jam Dinding Kayu	750.000	1.000.000	6.000
5	Miniatur Kapal	300.000	400.000	2.400
6	Kain Tenun Khas Pesisir Lampung	2.000.000	2.200.000	13.200
7	Lukisan Mengejar 5 Waktu	5.000.000	5.600.000	33.600
8	Lukisan Lampung Sekarang	7.500.000	7.500.000	45.000
9	Lukisan King of The Blue From Lampung	2.500.000	2.500.000	15.000
10	Ukiran Kayu Jati Motif Siger	2.500.000	2.600.000	15.600
11	Ukiran Kayu Jati Motif Kapal dan Pucuk Rebung	1.800.000	1.900.000	11.400
12	Ukiran Kayu Jati Motif Kapal	2.000.000	2.100.000	12.600
	TOTAL	27.050.000	29.020.000	174.120

DOKUMENTASI KEGIATAN







**KEGIATAN EDUKASI OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH
DJKN PERKUAT SINERGI DENGAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Bandar Lampung, tanggal 24 November 2025 – Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu bersama KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPKNL Bandar Lampung ini dibuka oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, Sdri. Titik Wijayanti.

Dalam sambutannya, Sdri. Titik Wijayanti menekankan pentingnya pengelolaan piutang daerah yang tertib dan akuntabel untuk menjaga kualitas laporan keuangan serta meminimalkan risiko piutang bermasalah. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Daerah Lampung dalam sinergi pengurusan piutang daerah, serta mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memperkuat kerja sama sesuai ketentuan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sdr. Sahat Paulus Naipospos (Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Lampung dari unsur Pemerintah Daerah), Sdr. Engga Saputra (perwakilan BPKAD Provinsi Lampung beserta jajarannya), Pimpinan Rumah Sakit Daerah di Provinsi Lampung beserta jajarannya, Pimpinan Organisasi Perangkat Provinsi Lampung beserta jajarannya, serta para hadirin undangan lainnya.

Paparan materi disampaikan oleh narasumber dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta perwakilan KPKNL, yaitu Sdr. Mas Agus Subakti, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Muhd. Ali Akbar Lubis, Kepala Seksi Piutang Negara II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Sdr. Moch. Prabowo Sudiby, Pelaksana pada Seksi Piutang Negara KPKNL Bandar Lampung dan Sdr. Yogi Wisaksono, Pelaksana pada Seksi Piutang Negara KPKNL Metro.

Para narasumber memberikan penjelasan inti mengenai pengelolaan piutang negara/daerah, alur penyerahan piutang kepada PUPN, mekanisme penagihan melalui produk hukum PUPN, serta poin-poin penting Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

Acara dipandu oleh Sdr. Nisa Anggit Hutami, Pelaksana pada Seksi Piutang Negara II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, yang bertindak sebagai pembawa acara. Forum berlangsung

interaktif melalui berbagai pertanyaan teknis dari peserta terkait penentuan kualitas piutang, pemenuhan dokumen pendukung Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO), dan langkah optimalisasi penagihan sebelum pengajuan penghapusan piutang.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro, dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan piutang daerah yang transparan, efektif, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN









KEGIATAN HARI KEKAYAAN NEGARA (HKN) KE-19 TAHUN 2025 (ASET TALK) PADA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU


Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara (HKN) Ke-19 Tahun 2025, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu akan menyelenggarakan kegiatan Asset Talk 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas, fungsi, serta kebijakan DJKN, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, BMN, penilaian, lelang, piutang negara, dan ketentuan terkait lainnya.


Asset Talk diharapkan dapat menjadi ruang belajar bersama agar pengelolaan kekayaan negara semakin dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak.

Kegiatan ini dapat diikuti oleh satuan kerja K/L, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan yang ingin menambah wawasan secara ringan dan informatif.


Asset Talk akan dimulai pada hari Rabu s.d. Jumat - 19 s.d. 21 November 2025 - Tayang dalam 2 sesi (pukul 09:00 dan pukul 14:00 WIB).

 Tanggal: Rabu, 19 November 2025

 Zoom & YouTube: s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025

 SESI 1 – 09.00 WIB

Tema: “Aset Berdaya, Asta Cita Berjaya”

 SESI 2 – 14.00 WIB

Tema: “Mengurus Piutang, Siapa Takut?”

DOKUMENTASI KEGIATAN

 | **DJKN**





“Aset Berdaya, Asta Cita Berjaya”


Rionald Silaban
Keynote Speech


Cuti Asih
Opening Speech


Hartanto
Narasumber


Miftachul Huda
Narasumber


Novriandini Ermaningrum
Moderator

19 Rabu | 09.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>

Hari Kekayaan Negara ke-19



DJKN

19 HARI KEKAYAAN NEGARA



“Mengurus Piutang, Siapa Takut?”



Rionald Silaban
Keynote Speech



Cuti Asih
Opening Speech



Yogi Wisaksono
Narasumber



M. Prabowo Sudibyo
Narasumber

19 Rabu | 14.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>



An Nisa Anggit Hutami
Moderator

Hari Kekayaan Negara ke-19

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 19 Nov 2025 07:54

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,36 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

- SUGIMIN_Kemenag Ka... 01:08:17
SK Kemenag Kabupaten Mesuji HADIR
- Achmad arya duta09 01:13:04
AA operator man 1 lampung timur HADIR
- BPMP Bengkulu Yuli In... 01:13:15
BB
- Kep_Balai PDAS Ketahun 01:17:13
KP Opr Balai PDAS Ketahun Hadir



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 19 Nov 2025 07:54

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,36 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

- SUGIMIN_Kemenag Ka... 01:08:17
SK Kemenag Kabupaten Mesuji HADIR
- Achmad arya duta09 01:13:04
AA operator man 1 lampung timur HADIR
- BPMP Bengkulu Yuli In... 01:13:15
BB
- Kep_Balai PDAS Ketahun 01:17:13
KP Opr Balai PDAS Ketahun Hadir



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 19 Nov 2025 07:54

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,36 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

- SUGIMIN_Kemeng Ka... 01:08:17
- SK Kemeng Kabupaten Mesuji HADIR
- Achmad arya duta09 01:13:04
- AA operator man 1 lampung timur HADIR
- BPMP Bengkulu Yuli In... 01:13:15
- BB
- Kep_Balai PDAS Ketahun 01:17:13
- KP Opr Balai PDAS Ketahun Hadir



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 19 Nov 2025 13:21

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,023 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

- Oryza Alifia_Kanwil Lam... 50:51
- OA https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu
- Oryza Alifia_Kanwil Lam... 51:15
- OA Izin Bapak/bu dapat mengisi daftar hadir pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu
- 0 Balasan
- ASET_KN.BENGGULU,... 56:32
- A min unine hanakma kecil hot nak



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings · 19 Nov 2025 13:21

Tambahkan ke Zoom Clips · Unduh (1,023 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 50:51
OA https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 51:15
OA Izin Bapak/Ibu dapat mengisi daftar hadir pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu 🙏

9 Balasan ▾

ASET_KN.BENGGULU,... 56:32
A min unine hanakms kecil hot rak



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings · 19 Nov 2025 13:21

Tambahkan ke Zoom Clips · Unduh (1,023 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 50:51
OA https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 51:15
OA Izin Bapak/Ibu dapat mengisi daftar hadir pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu 🙏

9 Balasan ▾

ASET_KN.BENGGULU,... 56:32
A min unine hanakms kecil hot rak



KEGIATAN HARI KEKAYAAN NEGARA (HKN) KE-19 TAHUN 2025 (ASET TALK) PADA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU


Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara (HKN) Ke-19 Tahun 2025, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu akan menyelenggarakan kegiatan Asset Talk 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas, fungsi, serta kebijakan DJKN, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, BMN, penilaian, lelang, piutang negara, dan ketentuan terkait lainnya.


Asset Talk diharapkan dapat menjadi ruang belajar bersama agar pengelolaan kekayaan negara semakin dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak.

Kegiatan ini dapat diikuti oleh satuan kerja K/L, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan yang ingin menambah wawasan secara ringan dan informatif.


Asset Talk akan dimulai pada hari Rabu s.d. Jumat - 19 s.d. 21 November 2025 - Tayang dalam 2 sesi (pukul 09:00 dan pukul 14:00 WIB).

 Tanggal: Kamis, 20 November 2025

 Zoom & YouTube: s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025

 SESI 1 – 09.00 WIB

Tema: “Yuk Belajar Penilaian Properti”

 SESI 2 – 14.00 WIB

Tema: “Keunggulan dan Tantangan Lelang Terkini”

DOKUMENTASI KEGIATAN



DJKN

19 HARI KEKAYAAN NEGARA



“Yuk Belajar Penilaian Properti”



Rionald Silaban
Keynote Speech



Cuti Asih
Opening Speech



Rennie Kameswara
Narasumber



Ade Hendra Vaskah T
Narasumber

20 Kamis | 09.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>



Joko Susanto
Moderator

Hari Kekayaan Negara ke-19



DJKN

19 HARI KEKAYAAN NEGARA



“Keunggulan dan Tantangan Lelang Terkini”



Rionald Silaban
Keynote Speech



Cuti Asih
Opening Speech



Meyzar Ahmad
Narasumber



Barno
Narasumber

20 Kamis | 14.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>



Fajar Sidik
Moderator

Hari Kekayaan Negara ke-19

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 20 Nov 2025 08:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.26 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 48:05

OA

Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu ;)

ACER 53:39

A

maaf bu, gk dengar suaranya

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 20 Nov 2025 08:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.26 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 48:05

OA

Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu ;)

ACER 53:39

A

maaf bu, gk dengar suaranya

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 20 Nov 2025 08:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.26 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

Oryza Alifia_Kanwil Lam... 48:05

Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu ;)

ACER 53:39

maaf bu, gk dengar suaranya



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 20 Nov 2025 13:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.04 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

LAPAS LAMPUNG SEL... 53:26

izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

KPU PROVINSI LAMPU... 57:28

izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

Aula Kanwil Lamkulu 01:00:12

Selamat Slang Bapak/Ibu, Ijin menyampaikan Link Untuk Virtual Background, Materi dan Presensi pada link berikut :





Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 20 Nov 2025 13:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,04 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

LAPAS LAMPUNG SEL... 53:26

LL izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

KPU PROVINSI LAMPU... 57:28

KP izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

Aula Kanwil Lamkulu 01:00:12

AK Selamat Siang Bapak/Ibu, Ijin menyampaikan Link Untuk Virtual Background, Materi dan Presensi pada link berikut :



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Meeting recordings 20 Nov 2025 13:14

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,04 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

LAPAS LAMPUNG SEL... 53:26

LL izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

KPU PROVINSI LAMPU... 57:28

KP izin bertanya kata kunci sertifikatnya apa?

Aula Kanwil Lamkulu 01:00:12

AK Selamat Siang Bapak/Ibu, Ijin menyampaikan Link Untuk Virtual Background, Materi dan Presensi pada link berikut :

KEGIATAN HARI KEKAYAAN NEGARA (HKN) KE-19 TAHUN 2025 (ASET TALK) PADA KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU


Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara (HKN) Ke-19 Tahun 2025, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu akan menyelenggarakan kegiatan Asset Talk 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas, fungsi, serta kebijakan DJKN, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, BMN, penilaian, lelang, piutang negara, dan ketentuan terkait lainnya.


Asset Talk diharapkan dapat menjadi ruang belajar bersama agar pengelolaan kekayaan negara semakin dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak.

Kegiatan ini dapat diikuti oleh satuan kerja K/L, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan yang ingin menambah wawasan secara ringan dan informatif.


Asset Talk akan dimulai pada hari Rabu s.d. Jumat - 19 s.d. 21 November 2025 - Tayang dalam 2 sesi (pukul 09:00 dan pukul 14:00 WIB).

 Tanggal: Jumat, 21 November 2025

 Zoom & YouTube: s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025

 SESI 1 – 09.00 WIB

Tema: “Beli Lelang? Ya di lelang.go.id”

 SESI 2 – 14.00 WIB

Tema: “Litigasi Perdata”

DOKUMENTASI KEGIATAN



DJKN

19 HARI
KEKAYAAN
NEGARA



“Beli Lelang? Ya di lelang.go.id”



Rionald Silaban
Keynote Speech



Cuti Asih
Opening Speech



Yoga Sulistiono
Narasumber



Arifin
Narasumber

21 Jumat | 09.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>



Ahmad Ibnu Hambal
Moderator

Hari Kekayaan Negara ke-19



DJKN

19 HARI KEKAYAAN NEGARA



“Litigasi Perdata”



Rionald Silaban
Keynote Speech



Cuti Asih
Opening Speech



Muchtar Nurwahidzain
Narasumber



Ellen Maharani
Narasumber

21 Jumat | 14.00 WIB
November 2025

Live on Youtube dan Zoom
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
<http://s.kemenkeu.go.id/AssetTalkLamkulu2025>



Eddy Susanto
Moderator

Hari Kekayaan Negara ke-19

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 07:43

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.03 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

Levita.Waristina DJKN 01:28:58



Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu :)

👍 2

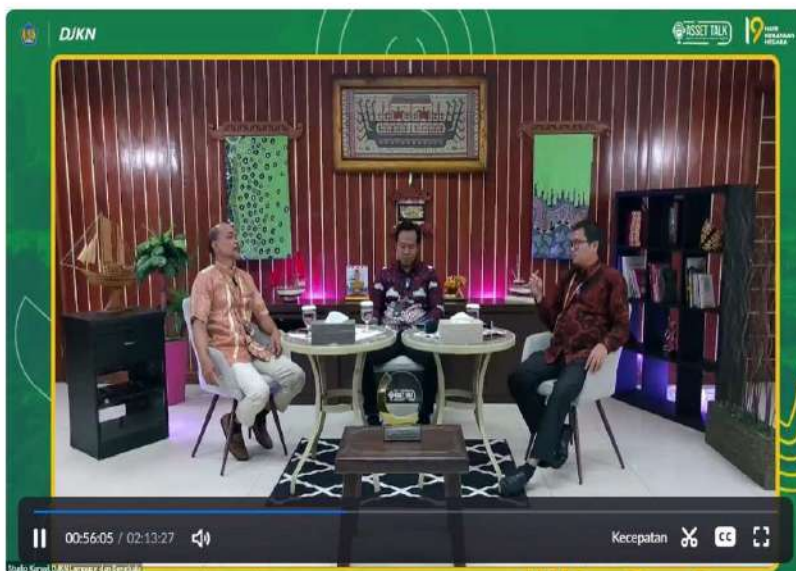
Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 07:43

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1.03 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

Levita.Waristina DJKN 01:28:58



Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu :)

👍 2

Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 07:43

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,03 GB)



Pesan Obrolan

Search chat

LD Levita.Waristina DJKN 01:28:58
Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi.

Kata kunci/keyword untuk mendapatkan sertifikat berbeda untuk setiap sesi. Kata kunci disampaikan panitia di pertengahan acara/ saat acara berlangsung.

Terimakasih banyak Bapak/Ibu :)

2

Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN Lamoung dan Bengkulu



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 13:29

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,021 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

LD Levita.Waristina DJKN 42:01
Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi. Presensi dapat dilakukan pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu

BH Bung Henry 49:05
#Host Keren dan Narsum yang super sekali....

LD Levita.Waristina DJKN 49:16
Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 13:29

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,021 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

Levita.Waristina DJKN 42:01

LD Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi. Presensi dapat dilakukan pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu

Bung Henry 49:05

BH #Host Keren dan Narsum yang super sekali...

Levita.Waristina DJKN 49:16

LD Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN



Asset Talk Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



Meeting recordings 21 Nov 2025 13:29

Tambahkan ke Zoom Clips Unduh (1,021 MB)



Pesan Obrolan

Search chat

Levita.Waristina DJKN 42:01

LD Yth. Bapak/Ibu Presensi dilaksanakan di setiap sesi. Presensi dapat dilakukan pada link berikut https://linktr.ee/Assettalk2025_KanwilLamkulu

Bung Henry 49:05

BH #Host Keren dan Narsum yang super sekali...

Levita.Waristina DJKN 49:16

LD Yth. Peserta Asset Talk Kanwil DJKN



KEGIATAN BIMTEK PENILAIAN PROPERTI TAHUN 2025 (PENGUATAN KOMPETENSI PENILAI PEMERINTAH)

Bandar Lampung — Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Properti Tahun 2025 pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025, bertempat di Aula KPKNL Bandar Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) serta peserta dari berbagai instansi yang menjalankan fungsi penilaian barang milik negara.

Pembukaan kegiatan dibuka dan dipandu oleh MC Sdri. Levita Waristina Pelaksana pada Seksi Penilaian I Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh para pejabat sebagai berikut Plt. Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Sdr. Joko Susanto dan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung Sdri. Virginia Hariztavianne

Sambutan tersebut menandai dimulainya kegiatan Bimtek sekaligus membuka rangkaian agenda pelatihan pada hari tersebut penyampaian materi dan pembagian kelompok dengan agenda utama Bimtek diisi dengan penyampaian materi oleh Narasumber Sdr. Suharsono selaku Penilai Pemerintah Ahli Madya Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Materi yang disampaikan memberikan gambaran umum mengenai pendekatan penilaian properti yang digunakan dalam pelaksanaan tugas penilaian aset. Setelah penyampaian materi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi dan latihan pemahaman sebelum melakukan kegiatan lapangan.

Survei Lapangan dan presentasi kelompok sebagai bagian dari pembelajaran, peserta melaksanakan survei objek penilaian untuk mengamati kondisi objek dan memperoleh data awal yang dibutuhkan. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami proses penilaian dalam situasi nyata. Setelah kegiatan survei, peserta kembali ke aula untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sesi presentasi menjadi sarana bagi peserta untuk bertukar pandangan mengenai langkah-langkah penilaian serta memperkuat pemahaman melalui diskusi yang dipandu oleh PFPP Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Tujuan pelaksanaan bimtek penilaian properti Tahun 2025 memberikan pemahaman umum mengenai konsep dan pendekatan penilaian yang meliputi pendekatan biaya, pendekatan pasar, dan penilaian mesin dan peralatan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan penilaian aset negara dan memahami alur proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan bimtek ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penilaian. Kegiatan ini

diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan efektivitas pelaksanaan tugas penilaian pemerintah.

DOKUMENTASI KEGIATAN









**KEGIATAN PERINGATAN HARI OEANG REPUBLIK INDONESIA (HORI) KE-79
PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN SATU
LAMPUNG TAHUN 2025**

1. Peringatan HORI ke-79 Tahun 2025 mengusung tema nasional **“Kemenkeu Satu Kawal Asta Cita”**, sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND- 1206/SJ/2025 tanggal 12 Oktober 2025. Tema tersebut menjadi semangat pemersatu seluruh unit kerja untuk terus menjaga integritas fiskal, memperkuat sinergi internal, serta mendukung delapan cita pembangunan nasional melalui tata kelola yang sederhana, kolaboratif, dan efisien.
2. Kementerian Keuangan Provinsi Lampung telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 Tahun 2025 pada tanggal 13 Oktober s.d. 12 November 2025 di Provinsi Lampung, yang terdiri dari beberapa kegiatan meliputi;
 - Rangkaian Kegiatan Pra-Hari H

a. Perlombaan Olahraga

- 1) Kegiatan perlombaan olahraga dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 Tahun 2025 di berbagai tempat fasilitas olahraga pada kantor-kantor Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung.
- 2) Tahun ini, cabang olahraga yang dipertandingkan lebih variatif yaitu antara lain Tenis Meja, Bulutangkis/Badminton, Tenis Lapangan, Voli, Catur, Gable/Domino, Biliar, dan E- Sport (*Mobile Legends*).
- 3) Rangkaian kegiatan dimulai dengan Kick-Off Perlombaan HORI di GOR Gemilang Bandar Lampung. Kegiatan Kick-Off ini menjadi simbol pembukaan seluruh rangkaian HORI di lingkungan Kemenkeu Satu Lampung dan dilaksanakan bersamaan dengan pertandingan bulutangkis.
- 4) Pelaksanaan kegiatan perlombaan olahraga ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mental pegawai, membangun suasana kerja yang harmonis melalui kompetisi yang sehat dan sportif, serta menjadi sarana pemererat komunikasi dan interaksi lintas unit eselon I. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kekompakan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi bersama, selaras dengan tema HORI ke-79 yaitu “Kemenkeu Satu Kawal Asta Cita.”

- Kegiatan Hari H (30 Oktober 2025)

b. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 Tahun 2025

- 1) Upacara ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 bertempat di Halaman Depan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.
- 2) Upacara ini dilaksanakan sekaligus Peringatan Sumpah Pemuda Ke-97.
- 3) Peserta upacara terdiri dari perwakilan dari setiap unit Eselon II yang unit kerjanya berlokasi di Bandar Lampung (Termasuk Unit Vertikal Eselon III).

c. UMKM Expo

- 1) Kegiatan UMKM Expo dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, bertempat di Halaman Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, dimulai pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia.
- 2) Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pelaku UMKM yang menjadi Binaan masing- masing Unit Eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Perwakilan dari Himbara (Bank BSI dan Mandiri), PT Pegadaian, Pegawai Kemenkeu Satu Lampung, serta Masyarakat umum yang turut meramaikan kegiatan pameran.
- 3) Kegiatan UMKM Expo tersebut merupakan wujud kepedulian Kemenkeu Satu Lampung terhadap pemberdayaan sektor riil dan peningkatan kapasitas UMKM daerah dengan tujuan untuk meningkatkan omzet, mempromosikan produknya agar lebih dikenal luas oleh masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi pelaku UMKM dengan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.
- 4) Pelaksanaan UMKM Expo Tahun 2025 diikuti oleh sebanyak 22 (dua puluh dua) tenant UMKM binaan Kemenkeu Satu Lampung, 2 tenant dari Himbara, dan 1 tenant dari PT Pegadaian, dengan klaster produk meliputi makanan & minuman, fashion, kerajinan, tanaman, dan produk olahan lokal lainnya, serta 21 UMKM peserta Business Development Services (BDS).
- 5) Total omzet yang diperoleh UMKM dalam kegiatan UMKM Expo 2025 ini adalah sebesar Rp62.860.500 (Enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- 6) Selain pameran UMKM, terdapat rangkaian kegiatan pendukung, antara lain:
 - Sesi belanja eksekutif oleh pimpinan unit eselon I,
 - Lelang produk UMKM oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, dengan total hasil lelang Rp29.082.000,
 - Business Development Services (BDS):
 - BDS “UMKM Naik Kelas” oleh Kanwil DJBC,
 - BDS “Aktivasi Coretax” oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung,
 - Sosialisasi pembiayaan dan literasi keuangan dari BSI, Mandiri, dan Pegadaian,
 - Penjualan barang donasi pegawai untuk kegiatan bakti sosial, dengan total penjualan Rp2.020.000.

- 7) Total hasil keseluruhan kegiatan UMKM Expo 2025, terdiri dari omzet UMKM, hasil lelang, dan penjualan barang donasi, adalah Rp93.962.500 (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 8) Selain memberikan nilai ekonomi, kegiatan UMKM Expo 2025 juga menghasilkan manfaat lain, yaitu peningkatan eksposur produk UMKM lokal, dan terjalinnya kerja sama baru antara UMKM dan lembaga keuangan, serta meningkatnya kesadaran

pegawai untuk mendukung belanja produk lokal.

d. Press Conference APBN KiTa

- 1) Kegiatan *Press Conference* APBN KiTa Regional Lampung dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 pukul 09.30 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Raflesiger, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 Tahun 2025.
- 2) *Press Conference* ini merupakan agenda strategis Kemenkeu Satu Lampung dalam kerangka tugas Pokja Teknis *Regional Chief Economist (RCE)* untuk menyampaikan perkembangan APBN KiTa realisasi s.d. 30 September 2025 kepada publik, media, dan para pemangku kepentingan.
- 3) Peserta yang hadir meliputi: Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung selaku pemapar utama, Perwakilan Kanwil DJP, DJBC, dan DJKN, Media massa lokal Lampung, Stakeholder terkait, serta Pegawai Kemenkeu Satu Lampung (luring & daring).
- 4) Daftar Media Massa Undangan *Press Conference* APBN KiTa: Media yang hadir/diundang berdasarkan surat UND-20/PWK.8/2025, yaitu TVRI Lampung, RRI Bandar Lampung, Lampung Post, Beritanatural.net, Wartasyah99.net, Radar Lampung, Antara News Lampung, Kinni.id, Viva.co.id, Kupas Tuntas, Tribun Lampung, DataLampung.com
- 5) Penyelenggaraan *Press Conference* APBN KiTa bertujuan untuk menyampaikan perkembangan realisasi APBN Lampung secara transparan kepada masyarakat serta memberikan edukasi publik mengenai kondisi fiskal, outlook ekonomi, dan program strategis pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi antara Kemenkeu Satu Lampung dengan media massa dan pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan literasi publik dan partisipasi masyarakat dalam memahami kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.

- Kegiatan Pasca-Hari H (30 Oktober 2025)

e. Donor Darah

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 4 November 2025 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- 2) Peserta Donor Darah adalah seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Lampung, dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung.
- 3) Kegiatan donor darah ini bekerja sama dengan Unit Donor Darah Pembina PMI Provinsi Lampung.

- 4) Jumlah kantong darah yang terkumpul sebanyak 97 kantong darah dari 113 peserta donor yang registrasi.

f. Kemenkeu Mengajar

- 1) Kegiatan Kemenkeu Mengajar dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 November 2025 bertempat di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung.
- 2) Panitia yang terlibat terdiri dari 47 orang panitia daerah, 95 orang Relawan dan 14 orang Wild Card yang berasal dari berbagai unit eselon I di Kementerian Keuangan serta SMV Kementerian Keuangan.
- 3) Kegiatan ini diikuti sebanyak 504 siswa/i SMK Negeri 4 Bandar Lampung.
- 4) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai peran APBN dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan beragam profesi di Kementerian Keuangan serta menanamkan nilai-nilai integritas, pelayanan, dan semangat berkarya yang menjadi karakter insan Kemenkeu.

g. Bakti Sosial

- 1) Kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan pada hari Rabu, 12 November 2025, bertempat di Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Kegiatan Bakti Sosial dihadiri oleh perwakilan pimpinan dan pegawai dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu Satu Lampung, yaitu Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, serta Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Selain itu, kegiatan juga melibatkan pengurus panti serta 81 lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Natar sebagai penerima manfaat bantuan.
- 3) Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Natar, melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup mereka. Selain berfokus pada pemberian bantuan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa empati di kalangan pegawai Kemenkeu Satu Lampung, memperkokoh nilai-nilai solidaritas, integritas, dan kepedulian yang menjadi bagian dari budaya organisasi.
- 4) Bantuan sosial yang diserahkan kepada Panti Sosial Tresna Werdha Natar memiliki nilai total sebesar Rp34.400.000,- yang bersumber dari kontribusi seluruh unit Eselon I Kemenkeu Satu Lampung serta hasil penjualan barang donasi pada kegiatan UMKM Expo 2025. Bantuan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan prioritas yang disampaikan pihak panti dan terdiri dari kasur ukuran 80 sebanyak 15 unit, Lemari plastik tiga susun sebanyak 5 unit, bantal sebanyak 12 buah, Sprei sebanyak 20 buah, pampers dewasa ukuran L dan XL sebanyak 200 bungkus, sapu (lidi & ijuk) sebanyak 30 buah, pel lantai (kain & karet) sebanyak 25 buah, sikat WC sebanyak 15 buah, wadah sabun sebanyak 7 buah, minyak kayu putih sebanyak 7 buah, susu lansia sebanyak 81 kotak, sabun mandi sebanyak 81 buah, buah jeruk sebanyak 30 kg, biskuit sebanyak 81 bungkus, dan uang santunan bagi 81 lansia.

- 5) Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan harian panti, meningkatkan kenyamanan lansia, serta membantu meringankan beban operasional panti yang sebagian besar ditanggung secara mandiri oleh pengurus.
- 6) Pelaksanaan bakti sosial ini diharapkan dapat mempererat hubungan Kementerian Keuangan dengan masyarakat, menghadirkan kehadiran pemerintah secara langsung, serta memastikan bahwa makna peringatan HORI terwujud dalam aksi konkret yang memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan.

3. Publikasi Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Oeang - Kemenkeu Satu Provinsi Lampung.

- Upacara Hari Oeang Republik Indonesia (30 Okt 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQdWY8uj73A/?igsh=dmNpamZhbmo4ZGg3>
- UMKM Expo (30 Okt 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQqP3Dskp9d/?igsh=MXc5b2czdTZjOXI5ag==>
- Press Conference APBN (30 Okt 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQoZSDIElBx/?igsh=eHQ3NDdnNWsyMHV4>
- Donor Darah (4 Nov 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQtC4FKEqN7/?igsh=MWZsMzBvY2N4anAwbw==>
- Kemenkeu Mengajar 10 (10-11 Nov 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQ30CQuklCR/?igsh=ajVjZDZteXZscDZ5>
- Bakti Sosial (12 Nov 2025)
<https://www.instagram.com/p/DQ-t1U5kpLt/?igsh=OWh6OGLxdm50M3hk>

Dokumentasi Kegiatan



djp

Hari Oeang
Kemenkeu Satu Kawal Asta Cita

UMKM EXPO HORI KE-79

bersama

Kemenkeu Satu Prov Lampung

Geser untuk **Informasi Selengkapnya** >>>

www.pajak.go.id



djp

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung



PRESS CONFERENCE

APBN KITA - KEMENKEU SATU LAMPUNG

Geser untuk Informasi Selengkapnya >>



www.pajak.go.id



Kolaborasi Kemenkeu Satu Prov. Lampung-PMI gelar Donor Darah HORI ke-79



djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung





djp

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung



KEMENKEU SATU LAMPUNG

BAKTI SOSIAL

KE PANTI SOSIAL LANJUT USIA
TRESNA WERDHA NATAR

Ceser untuk [Informasi Selengkapnya >>](#)



www.pajak.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA